



Laporan Tahunan
Annual Report
2013

Internalizing the Externalities

Daftar Isi Contents

Internalizing the Externalities

Sekilas PT PII	1
IIGF at a Glance	2
Proses Bisnis PT PII	6
IIGF Business Process	8
Visi, Misi & Tujuan	8
Vision, Mission & Objectives	9
Nilai-Nilai Utama: InTIME	9
Core Values: InTIME	10
Sejarah & Jejak Langkah Perusahaan	10
Company History & Milestones	12
Strategi Pengembangan Jangka Panjang PT PII	12
IIGF Long-Term Growth Strategy	13
Ikhtisar Keuangan	13
Financial Highlights	14
Peristiwa Penting dan Penghargaan 2013	14
Event Highlights and Awards 2013	18
Laporan Dewan Komisaris	18
Report from the Board of Commissioners	24
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	24
Board of Commissioners Supervisory Report	30
Laporan Direksi	30
Report from the Board of Directors	

38 Tinjauan Usaha Business Review

Kapasitas Penjaminan	39
Guarantee Capacity	41
IIGF Institute	41
IIGF Institute	44
Sumber Daya Manusia	44
Human Resources	47
Pengadaan	47
Procurement	

50 Pengembangan Usaha Business Development

Proyek PLTU Jawa Tengah	51
Central Java Power Plant Project	53
Proyek Sistem Penyediaan Air Minum	53
Clean Water Supply Project	54
Proyek PLTU Mulut Tambang	54
Mine-Mouth Power Plant Project	55
Proyek Kereta Api Batu Bara	55
Coal Railway Project	

58 Tinjauan Keuangan Financial Review

66 Penerapan Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Implementation

84 Pengelolaan Risiko Risk Management

96 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

101 Laporan Keuangan Financial Statements

145 Data Perusahaan Corporate Data

Profil Dewan Komisaris	146
Board of Commissioners Profile	148
Profil Direksi	148
Board of Directors Profile	151
Profil Komite Audit	151
Audit Committee Profile	153
Profil Sekretaris Komisaris	153
Secretary to the Board of Commissioner Profile	154
Struktur Organisasi	154
Organization Structure	

Berbagai tantangan yang terutama terkait dengan faktor-faktor eksternal di luar kendali Perusahaan masih menjadi hambatan bagi langkah maju PT PII di tahun 2013. Di lain sisi, dengan menyikapi berbagai kondisi eksternal tersebut sebagai bagian integral dari keberadaannya sendiri, PT PII memperoleh peluang untuk mengembangkan dan memperkuat kapasitas internal perusahaan pada arah yang tepat, termasuk dengan proaktif berkontribusi pada pembangunan kapasitas eksternal. Melalui langkah-langkah ini, PT PII menggalang momentum pertumbuhan ke depan dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

1

Internalizing the Externalities

The progress of IIGF in 2013 continued in constraint by a variety of challenges having to do mainly with external factors outside the control of the Company. On the other hand, by placing these externalities as an integral part of its own existence as an institution, IIGF has made the most of opportunities to develop and strengthen the Company's internal capacity in the right direction, including by proactively contributing to external capacity building. Through these initiatives, IIGF is building its growth momentum going forward in support of accelerated infrastructure development in Indonesia.

Sekilas PT PII

IIGF at a Glance

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PT PII, yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Desember 2009, adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola penyediaan penjaminan risiko pada proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

2

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) or Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), is a State-Owned Enterprise established on 30 December 2009 by the Government of Indonesia to manage the provision of guarantee for risks in infrastructure projects under the Public Private Partnership (PPP) scheme.



Dalam melaksanakan mandatnya, PT PII berperan dalam kerangka Kebijakan Satu Pelaksana (*Single Window Policy*), yang dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi serta konsistensi dalam pemberian jaminan dan pemrosesan klaim, guna meningkatkan kepercayaan investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, namun dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah akibat pemberian penjaminan pemerintah.

In carrying out its mandate, IIGF plays its role under the Single Window Policy framework, which is aimed to ensure accountability, transparency and consistency in guarantee provisioning and claim processing, in order to improve market confidence to participate in infrastructure projects in Indonesia, while at the same time safeguarding the interest of the Government, particularly related to potential contingent liability to the Government vis-a-vis government guarantees.

Hingga saat ini, Pemerintah telah melakukan penyertaan modal dari APBN ke PT PII sebesar Rp 4,5 triliun. PT PII secara bertahap akan mengurangi ketergantungan pada APBN, dan akan meningkatkan kapasitas penjaminannya melalui kerja sama dengan berbagai institusi keuangan, baik institusi multilateral (Bank Dunia, ADB, IDB, MIGA), institusi bilateral, maupun lainnya.

Up to now, the Government of Indonesia has injected capital from the State Budget of Rp 4.5 trillion into IIGF. IIGF will gradually reduce its dependence on the State Budget, and increase its guarantee capacity through cooperation with several financial institutions such as multilateral agencies (World Bank, ADB, IDB, MIGA), bilateral institutions, and others.

Nilai tambah dari keberadaan PT PII diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan utama.

Manfaat bagi Indonesia:

- Mendukung pembangunan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan skema KPS.
- Menjembatani kesenjangan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur.

The value proposition of IIGF is expected to provide benefits to various key stakeholders.

Benefits for Indonesia:

- Support economic growth through the development of quality infrastructure using PPP scheme.
- Bridge the funding gap for the development of infrastructure projects.

Manfaat bagi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama/PJPK (Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD):

- Menarik minat sektor swasta untuk berpartisipasi.
- Memfasilitasi tercapainya tujuan-tujuan PJPK.
- Mendorong kompetisi dalam proses tender proyek sehingga menghasilkan proposal proyek yang lebih berkualitas dengan harga bersaing.

Manfaat bagi sektor swasta:

- Mitigasi risiko bagi sektor swasta yang tidak dapat diperoleh dari pasar.
- Peningkatan transparansi, kejelasan dan konsistensi proses evaluasi dan pemberian penjaminan bagi proyek.
- Peningkatan *bankability* dari proyek.
- Memperpanjang jangka waktu pinjaman, yang berdampak pada harga penawaran (*bid*) yang lebih kompetitif.
- Memberikan insentif bagi PJPK untuk membuat kontrak yang memenuhi praktik yang berlaku umum/internasional.

Tahapan pemberian penjaminan PT PII meliputi:

- Konsultasi/Bimbingan: Memberikan informasi rinci tentang penjaminan oleh PT PII, seperti kriteria penjaminan, proses yang harus dilakukan untuk memperoleh jaminan, contoh perjanjian konsesi, dan sebagainya.
- Penyaringan: Mengevaluasi Formulir Penyaringan (*Screening Form*) yang disampaikan PJPK kepada PT PII untuk menentukan kualifikasi proyek atau eligibilitas dalam memperoleh jaminan berdasarkan regulasi atau ketentuan yang ada. Beberapa kriteria umum antara lain: termasuk sektor yang tercantum dalam Perpres No. 67/2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 13/2010 dan Perpres No. 56/2011; proyek selaras dengan prioritas Pemerintah dan dokumentasi proyek telah disiapkan oleh tenaga ahli yang kredibel.
- Penilaian: Melakukan evaluasi kelayakan (*Appraisal*) proyek secara rinci dari aspek legal, teknik, ekonomi dan keuangan, serta lingkungan dan sosial, termasuk juga evaluasi terhadap kemampuan PJPK untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai perjanjian konsesi.
- Penstrukturan: Menetapkan struktur penjaminan (*Guarantee Structuring*) serta menyusun ketentuan dan kondisi penjaminan, misalnya jangka waktu, kewajiban finansial dan risiko yang dijamin, yang disesuaikan untuk masing-masing proyek KPS.

Benefits for Contracting Agency/CA (Central/Regional Government, SOEs, Regional Government-Owned Enterprise):

- Attract private sector participation.
- Facilitate the achievement of CA's objectives.
- Encourage fair competition in project procurement process, to obtain higher quality projects and competitive costs.

Benefits for the private sector:

- Mitigate risks that are otherwise not covered by the market.
- Improve transparency, clarity and consistency in appraisal and guarantee provision process for project.
- Improve project bankability.
- Extend the tenor of funding from lenders which results in more competitive bids.
- Provide incentive for CAs to formulate project contracts according to generally-accepted or international practice.

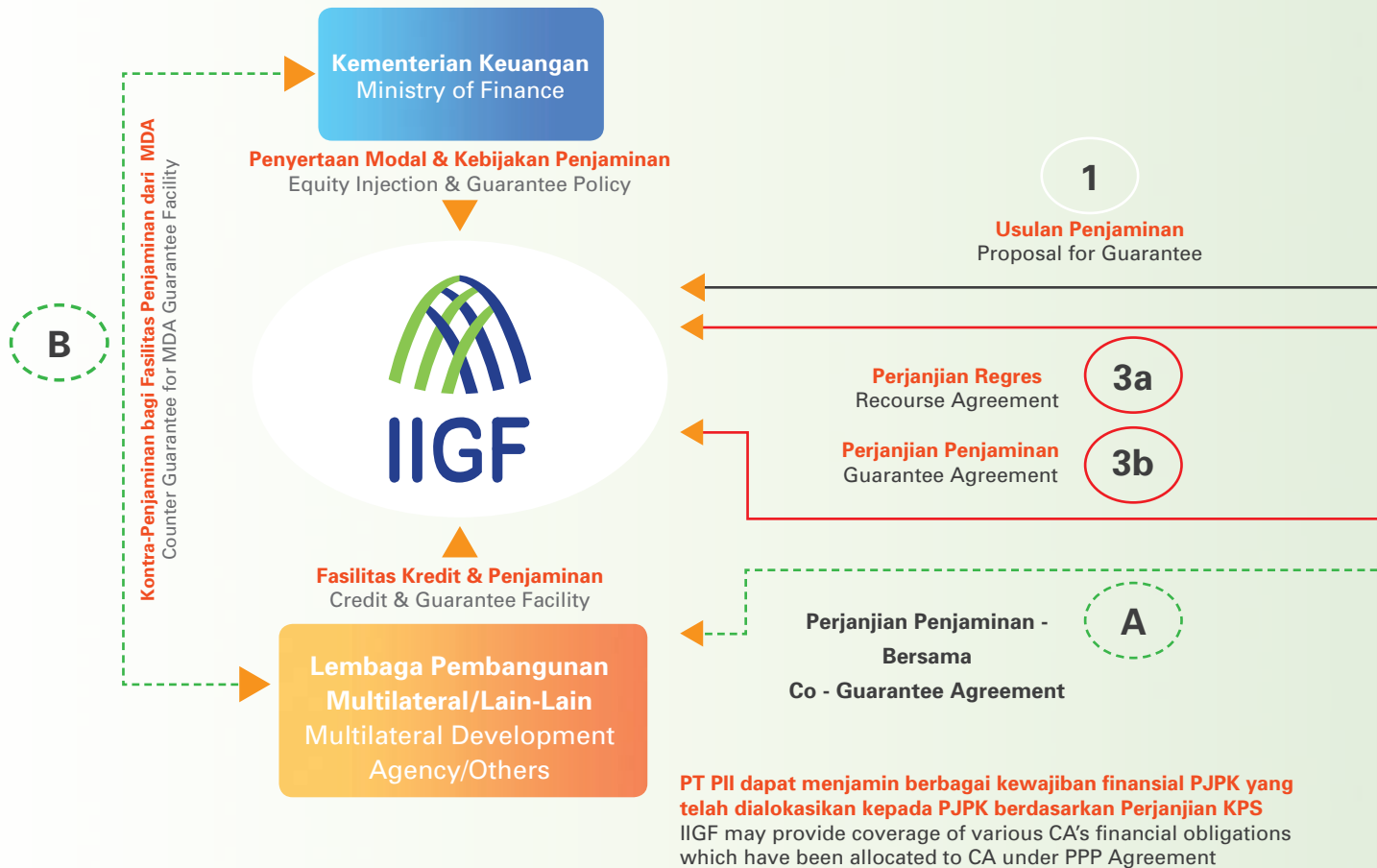
Stages in IIGF guarantee provisioning are as follows:

- Consultation/Guidance: Provide detailed information on IIGF's guarantee provision, such criteria for guarantee, the guarantee provision process, sample concession agreement, etc.
- Screening: Evaluate the Screening Form submitted by CA to determine project qualification or eligibility in obtaining a guarantee based on existing regulations. The general criteria includes among other things, the sectors named in Presidential Regulation (Perpres) No. 67/2005, as subsequently amended by Perpres No. 13/2010 and Perpres No. 56/2011; that the project is in line with the Government's priority; and that project documentation has been prepared by professional credible experts.
- Appraisal: Conduct detailed assessment of project feasibility in various aspects i.e.: on legal, technical, economic and financial, as well as social and environment aspects, and also evaluate of CA's ability to meet its financial obligation under the concession agreement.
- Structuring: Determine the guarantee structure as well as terms and conditions, such as the guarantee period, financial obligation and risk coverage to be guaranteed, customized for each PPP project.

Proses Bisnis PT PII

IIGF Business Process

Proyek KPS tipikal mencakup perjanjian-perjanjian seperti berikut ini:
A typical PPP project involves the following agreements:



Alokasi Risiko dalam Perjanjian KPS – sebuah ilustrasi

Allocation of Risks in a PPP Agreement – an Illustration

PC	Shared	CA
A		
B*		
C		
	D	
	E*	
		F
		G*
		H*

*) Risiko terjadinya suatu kewajiban finansial tertentu pada para pihak

*) Risk that leads to certain financial obligation of the bearer

PC: Pelaksana Proyek

CA: PJPK

PC: Project Company

CA: Contracting Agency

Cakupan Penjaminan oleh PT PII
Possible IIGF Guarantee Coverage

Contoh:

- Kewajiban pembayaran PJPK
 - Ketidak-mampuan bayar
 - Ketidaksediaan untuk membayar
- Terminasi dini/kewajiban pembayaran lainnya akibat adanya/tidak adanya suatu tindakan Pemerintah, seperti:
 - Perubahan undang-undang
 - Penyitaan
 - Mata uang yang tidak dapat dikonversi/transfer
 - PJPK mengalami Force Majeure

Catatan | Note:

B

hanya akan ada bila
will exist only if

A

ada, yaitu saat
exist, i.e. when

A

terjadi
become

bagian dari struktur penjaminan kepada investor
part of guarantee structure provided to investor

PJKP
(Kementerian, BUMN, Pemda)
Contracting Agency
(Ministry, SOE, Regional Government)

2

Perjanjian KPS
PPP Agreement

Pelaksana Proyek/Investor
Project Company/Investor

Examples:

- CA Payment Obligations
 - Inability to Pay
 - Unwillingness to Pay
- Early Termination/Other Payment Obligations due to Government Actions/Inactions, such as:
 - Change in Law
 - Expropriation
 - Currency Inconvertibility/Non Transfer
 - Force Majeure Affecting CA



Transportasi
Transport

Jalan Tol
Toll Roads

Listrik
Electricity

Air Minum
Water Supply

Pengolahan Limbah Cair
Waste Water

Telekomunikasi Tertentu
Selected Telecom

Irigasi
Irrigation

Migas Tertentu
Selected Oil & Gas

Sectors: As per Presidential Regulation No. 67/2005 **
Sektor: Sesuai Peraturan Presiden No. 67/2005**

Visi, Misi dan Tujuan

Vision, Mission & Objectives

Visi Vision

Menjadi penyedia penjaminan yang memainkan peran penting dalam menarik modal swasta untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

To be a guarantee provider that plays a pivotal role in attracting private capital for infrastructure development to accelerate Indonesia's economic growth.

Misi Mission

- Menyediakan produk-produk penjaminan melalui proses bisnis yang transparan dan baik.
- Melaksanakan kebijakan satu pelaksana dalam proses pemberian jaminan dengan modal yang kuat dan manajemen yang profesional.
- Meningkatkan kelayakan kredit proyek infrastruktur Indonesia.
- To provide guarantee products through transparent and robust business processes.
- To implement a "Single Window" policy in guarantee provision through a solid capital base and professional management.
- To improve the creditworthiness of infrastructure projects in Indonesia.

Tujuan Objectives

- Meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek-proyek infrastruktur KPS melalui kerangka evaluasi dan pengelolaan klaim atas penjaminan.
- Meningkatkan tata kelola dan transparansi pelaksanaan penyediaan penjaminan.
- Memfasilitasi keberhasilan transaksi bagi PJP (Kementerian, BUMN, Pemda) melalui penyediaan penjaminan bagi proyek KPS yang distruktur dengan baik.
- Memagari kewajiban kontingen Pemerintah dan meminimalkan kejutan langsung kepada APBN.
- To improve creditworthiness and quality of PPPs in infrastructure projects by establishing a clear and consistent appraisal and claim framework for guarantees.
- To improve the governance and transparency of guarantee provision.
- To facilitate the deal flow for Contracting Agencies (i.e. Ministries, SOEs, Regional Governments) by providing guarantees to well-structured PPPs.
- To ring-fence Government contingent liability and minimize sudden shock to State Budget.

Nilai-Nilai Utama: InTIME

Core Values: InTIME

“INTEGRITY” (INTEGRITAS)

1. Bekerja dengan standar etika tertinggi
2. Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam segala urusan
3. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak-pihak lain
4. Menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas
5. Mentaati aturan perusahaan
6. Bertanggung jawab dalam seluruh tindakan

“TEAM WORK” (KERJA SAMA)

1. Beroperasi sebagai sebuah tim
2. Memberi kontribusi ketrampilan dan pengetahuan demi kepentingan tim
3. Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan perusahaan

“THINK BIG” (BERPIKIRAN LUAS)

1. Memiliki pemikiran luas dan mutakhir
2. Mempertimbangkan berbagai alternatif untuk hasil yang lebih baik bagi perusahaan dan bagi pemangku kepentingan
3. Menggali secara terus menerus ide-ide baru untuk perkembangan perusahaan
4. Terbuka terhadap berbagai perkembangan yang ada di lingkungan demi hasil terbaik tanpa meninggalkan prinsip tata kelola yang baik

“MUTUAL TRUST” (SALING PERCAYA)

1. Memegang teguh etika bisnis bersama seluruh komponen internal perusahaan maupun dengan mitra perusahaan
2. Konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan
3. Mempercayai dan menghormati satu sama lain dengan itikad baik untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan kerja dan mitra bisnis

“EXCELLENCE” (KEUNGGLUAN)

1. Berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam melaksanakan apapun yang dilakukan
2. Berusaha untuk melakukan perbaikan yang terus menerus
3. Memiliki pengetahuan mendalam guna mendukung kegiatan dan mendapatkan hasil yang melebihi harapan

“INTEGRITY” (INTEGRITAS)

1. To work with the highest standard of ethics
2. To be honest with oneself or other persons in all interactions
3. To put the interest of the Company above the interest of the individual, group and/or other parties
4. To maintain commitment in the execution of one's duties
5. To always comply with company regulations
6. To always be responsible in all actions

“TEAM WORK” (KERJA SAMA)

1. To operate as a team
2. To contribute in skills and knowledge for the benefit of the team
3. To uphold the interest of the team in striving for company's objectives

“THINK BIG” (BERPIKIRAN LUAS)

1. To be broad-minded and cognizant of the latest issues
2. To consider alternatives that can led to improved results for the benefit of the company and stakeholders
3. To strive at all times for innovations for the progress of the company
4. To be receptive to current developments in the work environment that can led to the best results while adhering to the principles of good governance

“MUTUAL TRUST” (SALING PERCAYA)

1. To uphold the highest of business ethics with all components within the company as well as with business partners
2. To consistently fulfil the agreed service level standard
3. To trust and respect one another in good faith in order to earn the confidence of co-workers and business partners

“EXCELLENCE” (KEUNGGLUAN)

1. To commit to be the best in all of one's endeavor
2. To strive for continuous improvement
3. To develop comprehensive and thorough knowledge that can support one's work and deliver results that are above expectation

Sejarah & Jejak Langkah Perusahaan

Company History & Milestones

2009

Pembentukan PT PII

Pada tanggal 30 Desember 2009, Pemerintah Indonesia mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), atau PT PII, sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penempatan Modal Negara sebesar Rp 1 triliun sesuai PP no 35 tahun 2009, sebagai modal dasar ditempatkan dan disetor penuh.

Establishment of IIGF

On 30 December 2009, the Government of Indonesia established PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), or Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) as a State-Owned Enterprise (SOE) through a State Capital Injection of Rp 1 trillion as paid-up capital., referring to Government Regulation no 35/2009.

2010

Peresmian Operasional PT PII

Pada tanggal 11 Mei 2010, PT PII secara resmi mulai beroperasi sesuai mandatnya untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

IIGF Operational Commencement

On 11 May 2010, IIGF officially commenced with its operations as mandated, in the provision of guarantee facilities for infrastructure projects under the Public Private Partnership (PPP) scheme as an effort to accelerate infrastructure development in Indonesia.

Peraturan Presiden No. 78/2010

Terbitnya Peraturan Presiden No. 78/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur menandakan dimulainya era baru proses penjaminan infrastruktur di Indonesia.

Presidential Regulation No. 78/2010

The issuance of Presidential Regulation No. 78/2010 dated 21 December 2010 on Guarantees for Infrastructure Projects in Partnership of Government and Private Sector Through an Infrastructure Guarantee Business Entity marked the beginning of a new era in the process of infrastructure guarantees in Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010

Pada tanggal 31 Desember 2010, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden No. 78/2010.

Minister of Finance Regulation No. 260/2010

December 31, 2010, Regulation of the Minister of Finance No. 260/2010 On 31 December 2010, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia issued Regulation of Ministry of Finance No. 260/PMK.011/2010 on Directive for Infrastructure Guarantees in Partnership Projects of Government and Private Sector, as the implementing regulation for Presidential Regulation No. 78/2010.

Penambahan Penyertaan Modal Negara 2010

Pada akhir Desember 2010, Pemerintah RI menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT PII sebesar Rp 1 triliun, merujuk pada PP No. 88/2010, sehingga total (PMN) menjadi Rp 2 triliun.

Additional State Equity Participation 2010

At end of December 2010, the Government of Indonesia made an additional Capital Injection from State Budget (PMN) into IIGF in the amount of Rp 1 trillion, as stipulated in Government Regulation (PP) No. 88/2010, making for a total PMN of Rp 2 trillion.

2011

Acuan Alokasi Risiko

Pada bulan Maret 2011, PT PII menerbitkan dokumen Acuan Alokasi Risiko yang berisi kategori dan distribusi risiko infrastruktur yang akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam skema KPS untuk proyek infrastruktur.

Risk Allocation Guidelines

In March 2011, IIGF published a Risk Allocation Guidelines document, which defines the infrastructure risk category and distribution as a reference for stakeholders in infrastructure project under PPP scheme.

Keberadaan PT PII merupakan bagian dari upaya Pemerintah RI untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur, yang diperlukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyediaan fasilitas penjaminan bagi proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

The establishment of IIGF is part of the efforts by the Government of Indonesia to facilitate the development of infrastructure needed to support national economy growth, through the provision of guarantee facilities for infrastructure projects developed under the Public Private Partnership (PPP) scheme.

2011

Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur

PT PII juga meluncurkan dokumen Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur yang bertujuan memberikan ilustrasi tentang langkah-langkah dalam proses pemberian penjaminan infrastruktur oleh PT PII.

Infrastructure Guarantee Provision Guidelines

IIGF also published the Infrastructure Guarantee Provision Guidelines document that illustrates the various steps in the processing of infrastructure guarantee provision by IIGF.

2011

PLTU Jawa Tengah

Pada tanggal 6 Oktober 2011, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 1.000 MW di Batang, Jawa Tengah, yang menjadi proyek pembangunan infrastruktur skema KPS pertama yang berhasil diwujudkan oleh Pemerintah menggunakan fasilitas penjaminan bersama oleh PT PII dan Kementerian Keuangan RI.

Central Java Power Plant

In October 6, 2011, IIGF signed the Guarantee Agreement for the Central Java Coal- Fired Power Plant 2 x 1,000 MW located in Batang, Central Java, which represented the first PPP infrastructure development project successfully implemented by the Government of Indonesia using a joint guarantee facility provided by IIGF and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

2011

Penambahan Penempatan Modal Negara

Pada tanggal 31 Desember 2011, Pemerintah RI meningkatkan jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh PT PII melalui tambahan Penempatan Modal Negara sebesar Rp 1,5 triliun, sesuai dengan PP no 55/2011, untuk memperkuat kapasitas penjaminan PT PII menjadi total Rp 3,5 triliun.

Additional State Equity Participation

In 31 December 2011, the Government of Indonesia has increased the fully placed and paid-up capital of IIGF through an additional Rp 1.5 trillion of State Capital Injection, referring to Government Regulation no 55/2011, strengthening the guarantee capacity of IIGF to Rp 3.5 trillion

2012

Penambahan Penempatan Modal Negara

Perseroan telah menerima Penyerahan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun pada tanggal 17 Desember 2012 sehingga total kapasitas penjaminan menjadi Rp 4,5 triliun.

Additional State Equity Participation

The Company received additional State Equity Participation (PMN) of Rp 1 trillion on December 17, 2012, strengthening its guarantee capacity to a total of Rp 4.5 trillion.

2013

Peningkatan Kapasitas Penjaminan

Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman dari World Bank Loan senilai USD 25 juta dan implementasi Co-guarantee dengan MIGA senilai USD50 juta untuk peningkatan kapasitas penjaminan dalam rangka mendukung proyek SPAM Bandar Lampung.

Strengthening Guarantee Capacity

The Company secured a US\$ 25 million loan facility from the World Bank, and a co-guarantee commitment for US\$ 50 million from MIGA as part of strengthening guarantee capacity in connection with the underwriting of the Bandar Lampung Clean Water project.

Pengakuan Peringkat Kredit

Perseroan mendapatkan peringkat kredit BBB- (outlook stabil) dari Fitch Rating, lembaga pemeringkat keuangan internasional, setara dengan peringkat Pemerintah Indonesia yang menunjukkan pengakuan atas kapasitas dan kinerja keuangan Perseroan.

Credit Rating

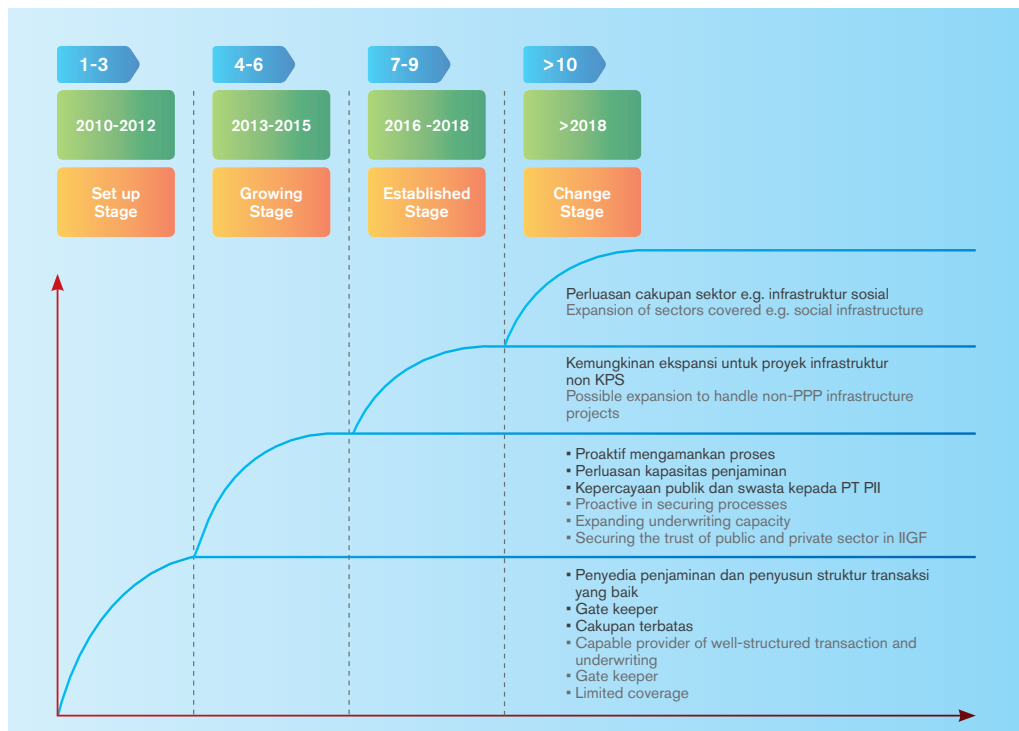
Fitch Ratings, the global credit rating agency, confirmed a rating of BBB- with Stable Outlook for the Company, which is equivalent with Indonesia's sovereign rating in recognition of the Company's financial capacity and performance.

Strategi Pengembangan Jangka Panjang PT PII

IIGF Long-Term Growth Strategy

PT PII telah merumuskan sebuah road-map strategi yang membagi rencana pengembangan PT PII dalam empat tahapan utama.

IIGF has formulated a strategy road map that defines IIGF's long term growth plans, into four principal stages.



- Tahap Persiapan: PT PII akan meletakkan landasan serta dasar-dasar proses penjaminan, sekaligus memastikan *good governance* dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan suatu proyek yang akan diberikan penjaminan.
- Tahap Pertumbuhan: PT PII akan berusaha mendapatkan kepercayaan publik dan sektor swasta atas perannya, memperluas jenis risiko yang dapat dijamin Perseroan serta meningkatkan kapasitas penjaminan.
- Tahap Pemantapan: PT PII akan melakukan ekspansi penjaminan di luar proyek-proyek Kerjasama Pemerintah Swasta.
- Tahap Perubahan: PT PII akan melakukan ekspansi penjaminan di luar proyek infrastruktur ekonomi.
- Set-up Stage: IIGF will lay the foundation and the basic principles of the underwriting process, while ensuring good governance in assessing the feasibility of any project that will receive underwriting.
- Growth Stage: IIGF will strive to earn the trust of the public and private sector in its role, expand the types of risks that the Company can underwrite and improve its underwriting capacity.
- Established Stage: IIGF will expand its underwriting activities beyond Public-Private Partnership projects.
- Transformation Stage: IIGF will expand its underwriting beyond economic infrastructure projects.

Ikhtisar Keuangan

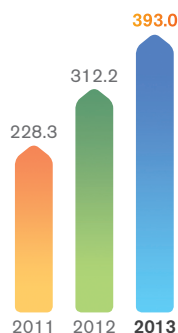
Financial Highlights

Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik dalam Laporan Tahunan ini menggunakan notasi bahasa Inggris, kecuali disebutkan lain
Rp000

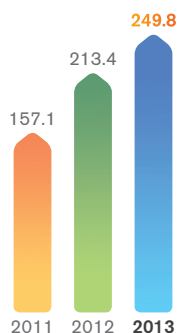
Numerical notations in all tables and graphs in this Annual Report are in English, unless specified otherwise
Rp000

	2013	2012	2011	
Laba Rugi Komprehensif				Comprehensive Income
Pendapatan Operasi	392,961,435	312,240,468	228,349,244	Operating Revenue
Beban Operasi	88,261,147	50,666,380	37,218,439	Operating Expenses
Laba Sebelum Pajak	304,700,288	261,574,088	191,130,805	Profit Before Income Tax
Laba Bersih	249,759,988	213,378,069	157,141,089	Net Income
Jumlah Laba Komprehensif	232,322,909	214,778,786	157,657,468	Total Comprehensive Income
Neraca				Balance Sheet
Kas dan Setara Kas	1,218,009,773	2,746,643,432	2,632,388,309	Cash and Cash Equivalent
Investasi	3,861,052,807	2,142,262,853	1,078,119,828	Investment
Aset Lainnya	117,405,527	77,931,051	28,122,990	Other Assets
Modal Kerja Bersih	97,350,242	85,047,118	15,978,103	Net Working Capital
Jumlah Aset	5,196,468,107	4,966,837,336	3,738,631,127	Total Assets
Kewajiban	48,477,933	49,720,071	34,842,648	Liabilities
Ekuitas	5,147,990,174	4,917,117,265	3,703,788,479	Equity
Laporan Arus Kas				Cash Flow Statement
Arus Kas dari (untuk) Operasi	212,207,977	179,653,661	176,871,698	Cash Flow from (for) Operations
Arus Kas dari (untuk) Investasi	-1,740,531,391	-1,064,620,365	-1,050,473,285	Cash Flow from (for) Investment
Arus Kas dari (untuk) Pendanaan	-310,245	999,221,827	1,499,992,765	Cash Flow from (for) Financing
Rasio-Rasio (%)				Ratio (%)
Marjin Laba Operasi	77.5	83.8	82.1	Operating Profit Margin
Marjin Laba Bersih	63.5	68.3	68.8	Net Profit Margin
ROE	4.96	5.47	7.0	ROE
BOPO	22.3	16.3	16.3	BOPO

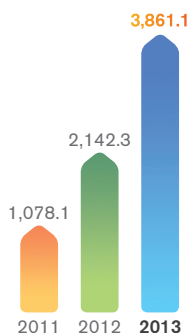
Pendapatan Operasi
Operating Revenue
(Rp Miliar Rp Billion)



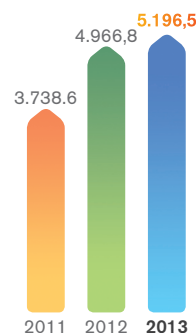
Laba Bersih
Net Income
(Rp Miliar Rp Billion)



Investasi
Investment
(Rp Miliar Rp Billion)



Jumlah Aset
Total Assets
(Rp Miliar Rp Billion)



Peristiwa Penting dan Penghargaan 2013

Event Highlights and Awards 2013

Januari | January 30

Rapat Kerja PT PII tahun 2013 membahas tentang Rencana Strategis tahun 2013 – 2017 pada tanggal 30 Januari – 1 Februari 2013

Work Meeting 2013 of IIGF on January 30 – February 1, 2013 to discuss the 2013–2017 Strategic Plan.



Februari | February 28

UI, ITB, dan UGM bersama dengan IIGF Institute menyelenggarakan *Indonesia Infrastructure Roundtable II* dengan topik 'Investasi sektor swasta pada bidang air minum di Kabupaten Tangerang' pada tanggal 28 Februari 2013.

UI, ITB and UGM along with the IIGF Institute held the *Indonesia Infrastructure Roundtable II* on February 28, 2013, with the topic of 'Private Sector Investment in Clean Water Provision in Tangerang Regency'.



Maret | March 5

PT PII dan Universitas Indonesia sebagai perwakilan dari tiga Universitas (UI, ITB, dan UGM) menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Kegiatan *Indonesia Infrastructure Roundtable* pada tanggal 5 Maret 2013

IIGF and Universitas Indonesia (UI), the latter representing the three universities of UI, ITB and UGM, on March 5, 2013, signed a Cooperation Agreement on the Organizing of the *Indonesia Infrastructure Roundtable*.



Maret | March 7

PT PII berpartisipasi dalam Lokakarya Percepatan Pembangunan Infrastruktur di DKI Jakarta melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta pada tanggal 7 Maret 2013.

IIGF participated in the Workshop for Accelerated Infrastructure Construction in DKI Jakarta through the Public Private Partnership Scheme held on March 7, 2013.



Maret | March 14-15

Workshop Implementasi Proses Penjaminan Infrastruktur Proyek KPS pada tanggal 14 – 15 Maret 2013.

Workshop on Implementation of Guarantee Process for PPP Infrastructure Project on March 14 – 15, 2013.



Maret | March 19

One-on-One Meeting Proyek SPAM Bandar Lampung tanggal 19 Maret 2013.

One-on-One Meeting for the Bandar Lampung SPAM project on March 19, 2013.



Maret | March 19

PT PII bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 19 Maret 2013

IIGF and National Public Procurement Agency (LKPP) signed a Memorandum of Understanding on March 19, 2013.



April | April 25

UI, ITB, dan UGM bersama dengan IIGF Institute menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Roundtable III dengan topik 'Land Provision: studi kasus Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kanci – Pejagan' pada tanggal 25 April 2013.

UI, ITB and UGM along with the IIGF Institute held the Indonesia Infrastructure Roundtable III on April 25, 2013, with the topic of 'Land Provision: A Case Study on Land Provision for the Kanci - Pejagan Toll Road Construction'.



Juni | June 17

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2012 pada tanggal 17 Juni 2013.

The Annual General Meeting of Shareholders for 2012 was held on June 17, 2013.



Juli | July 4-6

Workshop Proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 & 10 pada tanggal 4 - 6 Juli 2013.

Workshop on Sumsel 9 & 10 Minemouth Powerplant Project March 4 - 6, 2013



Juli | July 25

Penyelenggaraan *Indonesia Infrastructure Roundtable IV* dengan topik '*Project Planning Studi Kasus Pembangunan Terminal Kalibaru*' pada tanggal 25 Juli 2013.

Indonesia Infrastructure Roundtable IV was held on July 25, 2013, with the topic 'Project Planning: A Case Study of the Construction of Kalibaru Terminal'.



September | September 25

Pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) Komisaris Utama PT PII dari Komisaris Utama sebelumnya, Bapak Freddy Saragih kepada Komisaris Utama yang baru Bapak Luky Alfirman pada tanggal 25 September 2013.

The inauguration and handover ceremony of the post of President Commissioner of IIGF from Freddy Saragih to Luky Alfirman on September 25, 2013.



Oktober | October 17

Workshop KPS SPAM Bandar Lampung bersama DPRD kota Bandar Lampung pada tanggal 17 Oktober 2013.

Workshop on Bandar Lampung SPAM PPP Project with Bandar Lampung Regional Representative Assembly on October 17, 2013.



November | November 13 - 15

PT PII ikut serta sebagai sponsor dalam *Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition 2013* yang diadakan pada tanggal 13 - 15 November 2013.

IIGF participated as official sponsor of the Indonesia Infrastructure Conference & Exhibition 2013 held on November 13 - 15, 2013.



November | November 21

Penyelenggaraan *Indonesia Infrastructure Roundtable V* bersama dengan UI, ITB, UGM dengan topik 'Pendanaan Infrastruktur Studi Kasus Pembangunan Monorail di Jakarta' yang diadakan pada tanggal 21 November 2013.

Indonesia Infrastructure Roundtable V held in cooperation with UI, ITB and UGM on November 21, 2013, with the topic 'Infrastructure Funding: A Case Study for Monorail Construction in Jakarta'.



November | November 26

PT PII menjadi sponsor dan pembicara pada acara 'International Project Finance Association (IPFA) – Recent Developments in the Indonesia PPP Market & What the Government Still Needs to Do' pada tanggal 26 November 2013.

IIGF sponsored and delivered a speech at the seminar 'IPFA - Recent Developments in the Indonesia PPP Market & What the Government Still Needs to Do' held on November 26, 2013.



Desember | December 6

Seremonial Program Konservasi sumber air dan pelestarian lingkungan, sebagai salah satu program CSR PT PII pada tanggal 6 Desember 2013 di Lampung.

Inauguration ceremony of one of IIGF's CSR programs, the Water Conservation and Environment Preservation Program in Lampung, on December 6, 2013.



Laporan Dewan Komisaris

Report from the Board of Commissioners

Kinerja dan pencapaian sepanjang tahun 2013 telah meningkatkan keyakinan dan kepercayaan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) mampu untuk terus mengambil peran penting dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

The Company's performance and achievements throughout 2013 has given added confidence that the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) is capable of carrying out its important role in support of infrastructure development and accelerated economic growth in Indonesia.

PEMEGANG SAHAM YANG KAMI HORMATI,

DEAR VALUED SHAREHOLDERS,

18

Dengan berbangga kami sampaikan bahwa PT PII terus mencatat kemajuan penting dalam usianya yang masih terbilang muda. Setelah menyelesaikan tahapan persiapan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, PT PII memasuki tahapan berikutnya yaitu tahapan pertumbuhan pada tahun 2013. Berbagai pencapaian positif berhasil diraih pada tahun 2013, seperti penghargaan dari IFC USA atas transaksi *Central Java Power Plant* (CJPP) sebagai salah satu proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) terbaik serta keberhasilan PT PII dalam memperoleh peringkat kredit "BBB-" dan *stable outlook* dari *Fitch Ratings*.

Di tengah berbagai tantangan yang terutama bersumber dari belum pulihnya kondisi perekonomian global, kita perlu berbangga hati karena capaian-capaian tersebut telah menunjukkan bahwa PT PII berada di jalur yang tepat dalam melaksanakan mandatnya sebagai pelaksana satu pintu untuk melakukan evaluasi, penstrukturan penjaminan, serta penyediaan jaminan KPS dalam proyek infrastruktur. Dengan terus mengembangkan kerangka kerja yang lebih baik, kita harapkan PT PII akan dapat terus meningkatkan perannya dalam menarik investasi serta partisipasi swasta dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

We are pleased to report that IIGF has continued to deliver significant progress in its early formative years. Following completion of the set-up stage during the 2010 to 2012 period, IIGF in 2013 has entered into the next phase, namely the growth stage. A number of noteworthy achievements have been made in 2013, including the recognition by IFC USA of the Central Java Power Plant (CJPP) transaction as one of the best undertakings in Public Private Partnership (PPP) projects, and the assignment of a credit rating of "BBB-" with "Stable Outlook" for IIGF from Fitch Ratings.

Amidst many challenges that are mostly attributable to the uncertain course of recovery in global economies, we are encouraged by these achievements, as it goes to show that the IIGF is on the right track in the implementation of its mandate to function as a single-window mechanism for the evaluation, structuring and provision of guarantee facility for PPP infrastructure projects. By the continuous development of improved work processes, we can expect that the IIGF will continue to improve its effective role in attracting private sector investments and participation in the development of infrastructure projects in the interest of accelerated economic growth for the country.



Luky Alfirman
Komisaris Utama
President Commissioner



Luky Alfirman
Komisaris Utama
President Commissioner

Ayu Sukorini
Komisaris
Commissioner

Penilaian Komisaris terhadap Kinerja Direksi

Dewan Komisaris memberikan apresiasi tinggi kepada Direksi atas kinerja dan pencapaian PT PII pada tahun 2013.

Dewan Komisaris terutama berbangga hati melihat bahwa Direksi dan manajemen PT PII telah bersikap proaktif dalam menjembatani berbagai kepentingan yang terlibat untuk mencari solusi atas kendala-kendala yang dijumpai tersebut, dan tidak sekedar terpaku pada pelaksanaan fungsi bisnisnya dalam penyediaan fasilitas penjaminan proyek infrastruktur KPS. Dewan Komisaris juga menilai bahwa Direksi sejauh ini telah berhasil mempersiapkan dan membangun kapasitas internal PT PII dalam rangka mengembangkan model-model penjaminan yang dapat diterapkan untuk pembangunan proyek infrastruktur di berbagai sektor.

Hal ini menjadi suatu prestasi tersendiri bagi PT PII dalam proses pembelajarannya menjadi sebuah institusi yang kredibel, akuntabel dan memiliki tata kelola yang baik sebagai penyedia fasilitas penjaminan proyek infrastruktur KPS.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Komisaris

Dewan Komisaris telah menyusun program kerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2013 PT PII, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan atas jalannya roda Perseroan. Pada tahun 2013, Dewan Komisaris terutama fokus mengawasi kegiatan manajemen PT PII agar tetap berada dalam koridor Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) maupun kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris juga melakukan pemantauan atas penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) sesuai peruntukannya, serta mengkaji pelaksanaan strategi Perseroan termasuk bekerja sama dengan manajemen PT PII mengupayakan solusi atas berbagai masalah eksternal yang ada.

Evaluation of the Board of Director's Performance

The Board of Commissioners commends the Directors for the achievements and performance of IIGF in 2013.

The Board of Commissioners is especially encouraged to note that the Board of Directors and the management of IIGF has taken a proactive stand in bringing together the various interests involved in order to seek workable solutions, over and beyond its mandated business function in the provision of guarantee facilities for PPP infrastructure projects. The Board of Commissioners is also of the opinion that the Board of Directors has been successful in building the needed internal capacity to develop workable models of guarantee structuring that could be applied to other infrastructure development projects in various sectors.

This, in our view, is a milestone achievement for IIGF in its learning curve into becoming a credible and accountable institution with good governance process as a provider of guarantee facility for PPP infrastructure projects.

Supervision by the Board of Commissioners

In supervising the actions of the Board of Directors in the management of IIGF, the Board of Commissioners undertook the annual work plan as set out in IIGF's 2013 Work Plan and Budget (RKAP). During 2013, the Board of Commissioners mainly focused on supervising management activities to ensure compliance with the corridor of Good Corporate Governance (GCG) as well as with relevant prevailing regulations. The Board of Commissioners also monitored the proper utilization of the State Equity Participation (PMN) in the Company, reviewed the implementation of Company's strategies, and worked with IIGF management in seeking solutions to a variety of external issues.

Dalam pelaksanaan program-program kerja tersebut, Dewan Komisaris mengadakan rapat koordinasi bersama Direksi sebanyak 15 kali sepanjang tahun 2013. Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris juga dilakukan melalui kegiatan Komite Audit, yang telah berfungsi dengan baik dan efektif sepanjang tahun 2013 khususnya dalam mengawasi aktivitas audit internal serta mekanisme pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perseroan.

Perubahan Jajaran Komisaris

Sesuai dengan keputusan Pemegang Saham, saya memperoleh kepercayaan untuk menjabat Komisaris Utama PT PII sejak 19 Agustus 2013, menggantikan Bapak Freddy R. Saragih yang mendapat penugasan lain dari Pemegang Saham. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Freddy R. Saragih atas kontribusinya selama ini dalam mengawal perjalanan PT PII sejak dibentuk di akhir tahun 2009.

Pandangan atas Prospek Perusahaan

Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebuah negara. Hambatan-hambatan infrastruktur dapat melemahkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi karena menjadi salah satu sebab munculnya ekonomi biaya tinggi. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memiliki *multiplier effects* tinggi yang dapat meningkatkan mobilitas masyarakat serta meningkatkan keterhubungan dan aktivitas ekonomi sehingga membuka lapangan pekerjaan serta memfasilitasi pertumbuhan sektor industri dan usaha kecil menengah yang merupakan tulang punggung ketahanan ekonomi Indonesia.

Akan tetapi alokasi anggaran belanja infrastruktur pemerintah tidak akan cukup untuk memacu pembangunan infrastruktur secara masif tanpa diiringi dengan keterlibatan pihak swasta. Peran swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, sangat penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur. Masih belum pulihnya pertumbuhan

In the execution of its work programs, the Board of Commissioners held 15 coordination meetings with the Board of Directors of IIGF throughout 2013. The Board of Commissioners was also ably assisted in its supervisory duties by the Audit Committee, which has effectively performed its function throughout 2013, particularly in regard the supervision of internal audit activities as well as the mechanism for internal control over financial reporting at the Company.

Change in Board Composition

In accordance with a decision by Shareholders, I was entrusted with the position of President Commissioner of IIGF since August 19, 2013, taking over from my predecessor, Freddy R. Saragih, who received another assignment by the Shareholders. In this occasion, I would like to thank Freddy R. Saragih for his many contributions throughout the years since IIGF was established near the end of 2009.

Review of Company Prospects

For any country, infrastructure development is a primary pre-requisite to sustain economic growth. Infrastructure-related constraints are one the the causes of a high-cost economy, reducing Indonesia's attractiveness as an investment destination. In addition, infrastructure development also have beneficial multiplier effect in terms of higher mobility and connectivity as well as promoting economic activities. These lead to employment opportunities as well as growth of the small and medium sector industries that form the backbone of Indonesia's economic resiliency.

However, the state budget allocation for infrastructure development is not sufficient to drive the needed level of infrastructure development. Thus, it is important to invite the participation of the private sector from domestic as well as overseas investors. The sluggish economic recovery in the United States and some countries in the European

ekonomi di sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menarik investor-investor luar negeri untuk terus berinvestasi di Indonesia.

Peran PT PII dalam rangka turut mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, dan khususnya pembangunan infrastruktur melalui skema KPS sangatlah penting. Oleh karena itu, PT PII harus terus meningkatkan kapasitas internal agar dapat melaksanakan fungsinya dengan secara lebih efektif. Dewan Komisaris optimis akan prospek Perseroan pada masa mendatang, termasuk kemampuan untuk mewujudkan penjaminan atas beberapa proyek infrastruktur yang saat ini ditangani. Pencapaian-pencapaian yang telah diraih serta prospek PT PII kedepan akan dapat memberikan keyakinan bagi seluruh pemangku kepentingan atas efektivitas PT PII sebagai sebuah institusi yang turut berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ucapan Terima Kasih

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Direksi, manajemen dan seluruh jajaran karyawan PT PII atas kerja keras, dedikasi dan prestasi yang mereka capai sepanjang tahun 2013. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham serta semua pemangku kepentingan di sektor publik maupun swasta, atas dukungan dan kerja sama yang terus diberikan kepada PT PII dalam mewujudkan misi yang diamanatkan, demi terjaganya laju pembangunan ekonomi Indonesia ke tahun-tahun mendatang.



Luky Alfirman

Komisaris Utama
President Commissioner

Zone should be seen as our opportunity to improve the welfare of Indonesia's people, by attracting overseas investors to invest in Indonesia.

IIGF played a crucial and key role in support of accelerated infrastructure development, and especially infrastructure development within the PPP scheme. Accordingly, IIGF should continue to strive to improve its internal capacities in order to function more effectively. The Board of Commissioners has an optimistic view of the Company's future prospects, including its ability to realize guarantee agreements on a number of ongoing infrastructure projects. With the current progress and achievements to date, as well as optimistic future prospects, stakeholders may rest assured of the institutional effectiveness of IIGF in actively supporting growth of the national economy.

Appreciation

The Board of Commissioners would like to convey the highest appreciation to the Board of Directors, management and the entire staff of IIGF for their hard work and dedication that has resulted in the achievements in 2013. We also want to thank the Shareholders and other stakeholders in the public and private sectors, for the continuing support and cooperation accorded to IIGF in the execution of its mandated missions, to safeguard Indonesia's economic growth momentum in future years.

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris

Board of Commissioners
Supervisory Report

Sehubungan dengan telah disampaikan Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2013 yang telah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC), dengan ini kami sampaikan laporan pengawasan dan tanggapan sebagai berikut:

1. Terkait dengan kinerja keuangan PT PII (Persero), secara ringkas dapat kami sampaikan bahwa realisasi pendapatan tahun 2013 mencapai Rp 393,0 miliar, atau 81,7% dari target RKAP-Revisi Tahun 2013 sebesar Rp 480,9 miliar. Realisasi pendapatan ini mencerminkan peningkatan sebesar Rp 80,7 miliar, atau 25,8%, dibandingkan pendapatan tahun 2012 sebesar Rp 312,2 miliar. Namun demikian, pertumbuhan pendapatan ini masih lebih rendah dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 156,0 miliar. *Return on Equity* (ROE) yang dicapai adalah sebesar 4,96%, atau 86,2% dari target yang ditetapkan sebesar 6,5%. Dari segi efisiensi operasi, yang diukur dari perbandingan biaya operasi terhadap pendapatan operasi (BOPO), pencapaiannya adalah sebesar 22%, yaitu lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 26%. Lebih lanjut, terkait dengan pencapaian kinerja keuangan di atas, kami sampaikan juga hal-hal berikut ini:

a. Tidak tercapainya realisasi pendapatan karena pendapatan yang dapat direalisasikan hanya berasal dari Pendapatan Pengelolaan Dana saja, sedangkan Pendapatan Penjaminan yang dianggarkan sebesar Rp 98,6 miliar tidak berhasil direalisasikan karena Proyek PLTU Jawa Tengah tidak mencapai tahap *Financial Close* dan Proyek Air Minum Bandar Lampung tidak mencapai tahap *Guarantee Signing*. Kami melihat bahwa tidak dapat direalisasikannya pendapatan dari kegiatan penjaminan ini lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali perusahaan. Sementara itu,

In regards the submission of the 2013 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) that has been prepared based on the 2013 Financial Statements that has been audited by Public Accountant Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Partners (PwC), we hereby submit our supervisory report and response as follows:

1. In terms of PT PII (Persero) financial performance, we can report in summary that realized revenues in 2013 amounted to Rp 393.0 billion, or 81.7% of the target in the 2013 Revised-RKAP of Rp 480.9 billion. Realized revenues in 2013 represent an increase of Rp 80.7 billion, or 25.8%, compared with realized revenues in 2012 of Rp 312.2 billion. However, the increase in revenues was below the targeted amount of Rp 156.0 billion in the 2013 budget. Return on Equity (ROE) was 4.96%, or an achievement rate of 86.2% from the target of 6.5%. In terms of operational efficiency as measured by the ratio of operating expenses to operating revenues (BOPO), the achievement was 22%, or better than the target for BOPO of 26%. In regards the above mentioned financial performance achievements, we would also like to report the following:

a. The target for revenues was not achieved as realized revenues were derived solely from Revenues from Fund Management, while the targeted Revenues from Guarantee Activities of Rp 98.6 billion were not achieved, due to the non-achievement of Financial Close on the Central Java Power Plant project and Guarantee Signing of the Bandar Lampung Clean Water project. In our opinion, the non-achievement of revenues from guarantee activities was mainly due to external factors that are outside the control of the Company. Meanwhile, realized Revenues from Fund Management in the

realisasi Pendapatan Pengelolaan Dana sebesar Rp 393,0 miliar mencerminkan pencapaian 103% dari target yang dianggarkan sebesar Rp 382,3 miliar.

amount of Rp 393.0 billion represented an achievement rate of 103% of the targeted amount in the budget of Rp 382.3 billion.

- b. Realisasi beban usaha adalah sebesar Rp 88,3 miliar, atau 80% dari beban usaha yang dianggarkan sebesar Rp 110,6 miliar pada tahun 2013. Artinya, terdapat deviasi positif sebesar Rp 22,3 miliar. Penghematan terjadi pada hampir semua jenis biaya, kecuali beban depresiasi dan beban lain.

- b. Realized operational expenses was Rp 88.3 billion, or 80% of the targeted budget for 2013 of Rp 110.6 billion. This represents a positive difference of Rp 22.3 billion, attributable to cost efficiencies in almost all cost components, with the exception of depreciation expenses and other expenses.

- c. Pencapaian Laba Tahun Berjalan sebesar Rp 249,7 miliar atau sekitar 83% dari target anggarannya sebesar Rp 299,4 miliar. Namun demikian, laba tahun berjalan tersebut tetap menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 17,0% dibandingkan tahun 2012. Pertumbuhan laba ini berhasil dicapai karena masih tingginya tingkat pertumbuhan pendapatan dari pengelolaan dana, sementara realisasi beban usaha lebih rendah dari yang dianggarkan.

- c. Realized Profit for the Year amounted to Rp 249.7 billion, or 83% of the budgeted amount for 2013 of Rp 299.4 billion. However, realized profit for the year in 2013 represented a growth of 17.0% compared with realized profit in 2012. This increase is due to the excellent achievement of revenues from fund management, while realized operational expenses was lower than the budgeted amount.

- d. Realisasi Total Aset/Total Kewajiban dan Ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 5.196,5 miliar, sedikit lebih rendah dari target anggarannya sebesar Rp 5.221,6 miliar. Namun demikian, pencapaian ini masih mencerminkan pertumbuhan sebesar 4,6% dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp 4.966,8 miliar.

- d. Realized Total Assets / Total Liabilities and Equity as of December 31, 2013, amounted to Rp 5,196.5 billion, slightly lower than the budgeted amount of Rp 5,221.6 billion. Nevertheless, the amount realized represents a growth of 4.6% compared with the realized amount in 2012 of Rp 4,966.8 billion.

2. Perkembangan proyek PLTU Jawa Tengah dengan estimasi nilai proyek Rp 30 triliun saat ini sedang dalam proses amandemen PPA terkait perpanjangan waktu *Financial Close* (FCP) dan upaya penyelesaian pembebasan lahan dan sertifikasi lahan yang masih terus berjalan.
3. Perkembangan proyek Air Minum-Bandar Lampung, proyek PLTU Mulut Tambang 9 dan 10-Sumsel, proyek Air Minum-Umbulan,

2. Developments of the Central Java Power Plant project with an estimated project value of Rp 30 trillion is currently in the PPA amendment stage related to the extension of Financial Close (FCP) as well as ongoing efforts in land acquisition and land certification.
3. Developments of other projects, namely the Bandar Lampung Clean Water project, Sumsel-9 & 10 Minemouth Power Plant

proyek Air Minum-Semarang Barat, dan proyek Kereta Api Batubara-Kalimantan Tengah masih terus berjalan melalui proses-proses yang sesuai dengan kebutuhan dan kelengkapan kegiatan penjaminan.

projects, Umbulan Clean Water project, Semarang Barat Clean Water project, and the Central Kalimantan Coal Railway project, all are ongoing in the due processes of the guarantee preparation activities.

4. Dalam jangka menengah dan panjang, Perusahaan akan menghadapi tantangan atas ketersediaan proyek-proyek infrastruktur baru dengan skema KPS, diantaranya berbagai kesiapan PJPk dalam menyiapkan proyeknya, serta melakukan koordinasi dengan regulator seperti Bappenas, Kementerian Keuangan dan kementerian teknis untuk mendorong percepatan realisasi proyek-proyek KPS yang telah ada dan yang akan membutuhkan kegiatan penjaminan.
5. Perusahaan pada tahun 2013 telah mencapai keberhasilan penting dengan memperoleh peringkat kredit 'BBB' dan *Stable Outlook* dari *Fitch Ratings*, sebuah lembaga pemeringkatan kredit internasional.
6. Dari 17 Indeks Kinerja Utama (IKU) Perusahaan untuk tahun 2013, hanya ada 2 indikator yang tidak mencapai target, yaitu untuk kategori keuangan: Maksimalisasi nilai perusahaan pada indikator ROE yang pencapaiannya hanya sebesar 86,2% dari target RKAP-Revisi 2013, dan pada indikator pertumbuhan pendapatan perusahaan yang hanya mencapai 81,7% dari target RKAP-Revisi 2013.
7. Untuk mendukung dan mencapai target-target Perusahaan, manajemen Perusahaan melakukan program peningkatan kapasitas (*capacity building*) karyawan melalui peningkatan kompetensi karyawan Perusahaan, dengan dilaksanakannya berbagai program pelatihan dan seminar serta melakukan penambahan SDM secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara berkesinambungan.

4. In the medium to long-term horizon, the Company is expected to face the challenge of finding new eligible infrastructure projects with the PPP scheme. The Company is currently dealing with the capacity of the Government Contracting Agency (PJPk) in terms of project preparation, and is engaged in coordination with regulators such as the Ministry of Finance and related line ministries to facilitate the realization of current PPP projects eligible for guarantee facility.
5. An important achievement by the Company in 2013 was the credit rating assignment of 'BBB' with *Stable Outlook* from *Fitch Ratings*, an international rating agency.
6. From the total of 17 Core Performance Indicator (IKU) for the Company in 2013, there are only 2 indicators that were short of the respective targets, namely in the financial category: Maximizing company value, the indicator for ROE is only 86.2% from the target in 2013 Revised RKAP, and the indicator for revenue growth that is only 81.7% of the target set in the 2013 Revised RKAP.
7. In support of the achievement of Company's objectives and targets, the management of the Company engaged in employee capacity building program to improve the competences of employees through the provision of a variety of training programs and seminars as well as through the recruitment of additional employees in a selective and continuous manner on the basis of need.

Selanjutnya, Perusahaan juga melakukan perbaikan proses bisnis, pengembangan prosedur operasi standar dan teknologi informasi untuk mendukung operasional Perusahaan agar dapat menyediakan informasi yang cepat, andal dan akurat.

8. Disamping itu, dalam rangka pengembangan usaha untuk kegiatan penjaminan, Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong lebih cepatnya kemajuan proyek infrastruktur dengan menyelenggarakan berbagai *workshop* atau edukasi untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan. Upaya lainnya dilakukan Perusahaan yaitu pembentukan IIGF Institute yang lebih fokus dalam membantu kapasitas pemangku kepentingan dalam memahami, melaksanakan dan menyelesaikan proyek-proyek KPS, dan salah satu kegiatan IIFG Insitute selama tahun 2013 dengan mengadakan *workshop* sebanyak 4 (empat) kali melalui forum *Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR)*.
9. Perusahaan turut aktif melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai bentuk kepeduliannya untuk berkontribusi secara langsung dalam memperbaiki kondisi kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan terdekat di sekitar lokasi proyek-proyek yang sedang ditangani oleh Perusahaan maupun di wilayah Kantor Pusat Perusahaan, melalui program-program pendidikan, pelestarian lingkungan, maupun kegiatan donasi sosial untuk membantu kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Further, the Company also improved its business processes, developed standard operating procedures and enhanced its information technology to support operational activities and provide timely, reliable and accurate information.

8. In addition, with regards to business development in guarantee provision, the Company has engaged in a variety of initiatives to facilitate progress in infrastructure projects through workshops and education or knowledge-sharing sessions to build the capacity of key stakeholders. Another initiative taken by the Company is the establishment of IIGF Institute to focus on facilitating capacity building of stakeholders in understanding, preparing and executing PPP infrastructure projects. A major program of IIGF Institute in 2013 was the organizing of 4 (four) workshops through the Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) forum.
9. The Company is also active in Corporate Social Responsibility activities through its direct contribution towards improving the social welfare of communities in the immediate locations of its ongoing infrastructure development projects as well as around the location of its Head Office. This objective is pursued through the implementation of programs in the areas of education and environment preservation, as well as through social charity or donations initiatives to assist communities in needs.

10. Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasi Perusahaan pada tahun buku 2013, Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Audit telah memberikan berbagai arahan kebijakan kepada Direksi untuk pembenahan dan perbaikan kinerja Perusahaan agar tetap fokus dan bertahan dalam menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan penjaminan, serta mendorong untuk tetap menjaga tata kelola perusahaan dan memupuk budaya kekompatan team serta profesionalisme di lingkungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) agar ke depan dapat terwujud capaian target dan realisasi kegiatan penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur melalui KPS.

Demikian Laporan Pengawasan dan tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun 2013.

10. In the implementation of its duties in supervising the operations of the Company in fiscal 2013, the Board of Commissioners, with the assistance of the Audit Committee, has provided policy directives to the Board of Directors towards the improvement of Company performance so as to stay in focus in dealing with various challenges encountered in the guarantee activities, and to encourage better corporate governance, better team work and higher professionalism within PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), in order to achieve future targets in the provision of guarantee to infrastructure development projects in the PPP scheme.

Hereby we submit the Board of Commissioner Supervisory Report on the 2013 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

30

PEMEGANG SAHAM YANG TERHORMAT,

Sesuai dengan *roadmap* strategi pengembangan jangka panjangnya, PT PII telah menyelesaikan Tahapan Persiapan dan selanjutnya mulai memasuki Tahapan Pertumbuhan pada tahun 2013. Berbagai inisiatif strategis dalam pengembangan kapasitas internal, sistem pendukung maupun Sumber Daya Manusia telah berhasil diselesaikan dengan baik. Meskipun terdapat tantangan dalam pencapaian target-target bisnis terkait kemajuan proses-proses pengembangan proyek infrastruktur yang ditangani, PT PII secara keseluruhan telah lebih siap untuk berperan efektif dalam mendorong pembangunan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di Indonesia.

Kinerja Perseroan di Tahun 2013

PT PII terus mendorong dan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan proses-proses penjaminan proyek secara efisien dan akuntabel. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan pada tahun 2013 terkait aspek pembangunan kapasitas internal tersebut antara lain adalah pengembangan *consultant pool* untuk memfasilitasi pengadaan konsultan ahli eksternal yang diperlukan dalam mengeksekusi *project appraisal* dan *project structuring*, serta implementasi sistem *e-Procurement* untuk proses pengadaan barang dan jasa yang efisien dan transparan.

Salah satu pencapaian penting di tahun 2013 adalah keberhasilan PT PII memperoleh peringkat kredit 'BBB-' dan *Stable Outlook* dari *Fitch Ratings*, sebuah lembaga pemeringkatan kredit internasional. Peringkat tersebut setara dengan peringkat *sovereign rating* Indonesia, dan mencerminkan dukungan penuh Pemerintah RI melalui kepemilikan saham 100% di PT PII serta

DEAR SHAREHOLDERS,

In 2013, following the completion of the Set-up Stage, IIGF has entered the Growth Stage, and progressing on track with its long-term growth strategy road map. The Company successfully engaged in a variety of initiatives in the development of internal capacity building, support systems and human capital enhancement. The challenge remains as to the achievement of certain business targets related to the ongoing progress of infrastructure projects in our project portfolio. Nonetheless, IIGF is now in a better position, overall, to play an effective role in facilitating the development of infrastructure projects in Indonesia within the Public Private Partnership (PPP) scheme.

Company Performance in 2013

IIGF continues to strive to improve its capabilities to execute efficient and accountable underwriting processes of infrastructure projects. Among various initiatives undertaken in 2013 related to capacity building were the establishment of a consultant pool to facilitate the procuring of external expert consultants needed for project appraisal and project structuring processes, and also the development and implementation of an E-Procurement application system towards more efficient and transparent procurement of goods and services.

Among the more noteworthy achievements of IIGF in 2013 was the assignment of a credit rating of 'BBB-' with 'Stable Outlook' from Fitch Ratings, a global credit rating agency. The credit rating given to the Company is equivalent to Indonesia's sovereign rating, reflecting both the full commitment of the Government of Indonesia through its 100% ownership in IIGF, and the



Sinthya Roesly
Direktur Utama
President Director

peran PT PII sebagai pelaksana kebijakan publik di bidang pembangunan infrastruktur di Indonesia. Peringkat kredit tersebut akan menunjang kredibilitas PT PII sebagai institusi keuangan, terutama dalam mendanai kapasitas penjaminan yang diperlukan dalam pelaksanaan bisnisnya.

Sebelumnya, PT PII juga telah berkontribusi memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan terkait fasilitas *Viability Gap Funding* (VGF), yang berujung pada penerbitan Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2012 pada bulan Desember 2012. Kepastian mengenai ketersediaan fasilitas VGF diharapkan dapat mendorong pengembangan proyek-proyek infrastruktur yang selama ini kurang menarik minat investor swasta akibat struktur tarif yang harus lebih mengakomodasi kepentingan publik, seperti misalnya di sektor penyediaan air bersih.

Sepanjang tahun 2013, PT PII terus secara aktif mendorong kemajuan pada proses-proses yang sedang berjalan pada sejumlah proyek infrastruktur. Proses *financial close* pada proyek PLTU Jawa Tengah masih belum dapat tercapai sesuai tenggat waktu pada Oktober 2013, walaupun PT PII telah secara proaktif memfasilitasi komunikasi antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengupayakan percepatan penyelesaian masalah yang ada terkait dengan pengadaan lahan dan sertifikasi tanah.

Pihak Pemerintah RI dalam hal ini telah memperlihatkan dukungannya melalui keluarnya Peraturan Presiden No. 66/2013 tanggal 6 Oktober 2013, yang memberikan dasar hukum bagi perpanjangan tenggat waktu untuk *financial close* proyek PLTU Jawa Tengah sampai dengan Oktober 2014. Proyek ini juga telah memperoleh pengakuan dari *International Finance Corporation* (IFC) sebagai salah satu proyek KPS terbaik di dunia, yang merujuk kepada keberhasilan PT PII dalam melakukan strukturisasi penjaminan sehingga proyek dapat diterima oleh pihak swasta.

role of IIGF as an executor of public policies in infrastructure development in Indonesia. The credit rating should serve to enhance IIGF's credibility as a financial institution, and especially in securing the needed funding to bolster its guarantee capacity in the course of business.

In a previous development, IIGF has also contributed its input to the Ministry of Finance in regards the Viability Gap Funding (VGF) facility. This has led to the Ministry of Finance Regulation No. 223/PMK.011/2012 in December 2012, providing a legal basis for the issuance of VGF facilities. This, hopefully, will serve to attract more private sector investments in infrastructure projects that heretofore are deemed unattractive due to a tariff structure that necessarily favors the public interest, such as in the provision of clean water.

Throughout 2013, IIGF was actively involved in delivering progress in the ongoing processes of a number of infrastructure projects. The financial close transaction of the Central Java Power Plant project, however, remained undelivered past its scheduled deadline in October 2013, and despite proactive efforts by IIGF to facilitate communication between involved stakeholders in order to expedite the resolution of issues related to land acquisition and land certification.

Regarding these developments, the Government of Indonesia has shown its commitment through the issuance of Presidential Regulation No. 66/2013 dated October 6, 2013, which provides the legal basis for a deadline extension for the financial close of the Central Java Power Plant project until October 2014. Recognized by the International Finance Corporation (IFC) as one of the best PPP projects in the world, the Central Java Power Plant project showcases IIGF's success in project structuring to attract private sector investments in the project.



Armand Hermawan
 Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
 Director of Finance and Risk Management

Sinthya Roesly
 Direktur Utama
 President Director

Yadi J. Ruchandi
 Direktur Operasi
 Director of Operations

PT PII juga terus melanjutkan penyediaan konsultasi yang efektif dalam mempersiapkan dan menstruktur proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 dan Sumsel 10 serta proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung. PT PII juga telah meminta Pemerintah Daerah Bandar Lampung sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) SPAM Bandar Lampung untuk membuat Peraturan Daerah terkait mitigasi risiko proyek, mengingat bahwa penjaminan dan KPS merupakan hal baru bagi semua pihak.

Dari sisi kinerja keuangan, PT PII tercatat membukukan kenaikan pendapatan sebesar 25,8% dari Rp 312,2 miliar di tahun 2012 menjadi sebesar Rp 393,0 miliar pada tahun 2013. Seperti pada tahun 2012, perolehan pendapatan pada tahun 2013 sepenuhnya berasal dari pendapatan pengelolaan dana. Laba setelah pajak tercatat sebesar Rp 249,7 miliar pada tahun 2013, naik 17,0% dari laba setelah pajak tahun 2012 sebesar

IIGF also continued with effective project guarantee consultation processes in the preparation and structuring of the Mine mouth Power Plant Sumsel-9 and Sumsel-10 projects, and the Bandar Lampung Clean Water project. IIGF has requested the Municipal Government of Bandar Lampung as the Government Contracting Agency for the Bandar Lampung Clean Water project to draft a bylaw related to project risk mitigation, as PPP and project guarantee represent a new issue for the involved parties.

In terms of financial performance, IIGF posted an increase of 25.8% in revenues from Rp 312.2 billion in 2012 to Rp 393.0 billion in 2013. As in 2012, the revenue stream in 2013 consist entirely of income from investments. Profit after tax amounted to Rp 249.7 billion in 2013, which represented an increase of 17.0% over profit after tax recorded in 2012 of Rp 213.4 billion. Meanwhile, total assets of the Company grew by

Rp 213,4 miliar. Total aset sementara itu tumbuh 4,6% menjadi sebesar Rp 5.196,5 miliar di akhir tahun 2013, yang terutama mencerminkan peningkatan di sisi ekuitas pada pos laba ditahan dari laba bersih tahun 2013. Laporan Keuangan PT PII untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari auditor independen.

Pencapaian keuangan PT PII dalam beberapa aspek masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2013. Hal ini semata-mata akibat dari belum terealisasinya penandatanganan Perjanjian Penjaminan pada sejumlah proyek yang ditangani seperti yang direncanakan di awal tahun.

4.6% to reach Rp 5,196.5 billion as at year-end 2013. The increase in total assets mainly reflects the increase in equity on the retained earnings account, with the addition of net income from operations in 2013. The Financial Statements of IIGF for the year ended December 31, 2013, has received a fair opinion from the independent auditor.

In certain areas of achievement, IIGF financial performance in 2013 still fall short of the respective targets as set out in the Work Plan and Budget (RKAP) for 2013. This is entirely due to the non realization of the Guarantee Agreement signing phase on a number of projects, which formed the assumption basis for financial targets in the RKAP.

34

Tata Kelola Perusahaan

Pengelolaan bisnis dan aktivitas perusahaan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar-standar yang diakui internasional telah menjadi salah satu tujuan PT PII sejak pembentukannya. Pada tahun 2012, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan kajian dan *diagnostic assessment* atas proses-proses Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang ada di PT PII. Rekomendasi BPKP terkait kajian tersebut kemudian telah ditindaklanjuti untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada.

Upaya ini dilakukan bertahap sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan urgensi masing-masing aspek yang menjadi kekurangan atau kelemahan tersebut, maupun keberadaan sumber daya untuk pelaksanaannya secara seimbang dengan kebutuhan aktivitas bisnis dan operasional PT PII. Pada bulan Juni 2013, telah disusun Pedoman Komite Audit yang mengatur mengenai tujuan, tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam mendukung tugas Dewan Komisaris dalam pengawasan Perseroan. PT PII juga terus melakukan perbaikan terhadap kebijakan dan pedoman kerja untuk peningkatan kualitas tata kelola perusahaan sesuai dengan standar praktik terbaik.

Corporate Governance

Ever since its establishment, IIGF has aimed for, among other things, transparent and accountable business processes and operational activities in accordance with best practice international standards. In 2012, the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) performed a review and diagnostic assessment on the practice of Good Corporate Governance (GCG) in IIGF. The Company have followed-up on the recommendations of BPKP to improve certain deficiencies shown in the assessment results.

The improvement initiatives were undertaken in stages by priority according to the urgency of the respective deficiency or weaknesses, and in consideration of the available resources for its implementation as balanced against the needs of business and operational activities of IIGF. In June 2013, for example, the Audit Committee Manual was formulated, establishing the objectives, duties and responsibilities of the Audit Committee in assisting the supervisory duties of the Board of Commissioners. IIGF also continued with improvements in company policies and work procedures to bring the level of governance at par with best practice standards.

Tanggung Jawab Sosial

PT PII terus memelihara komitmennya pada pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) melalui beberapa program peningkatan kapasitas khususnya dalam bidang pendidikan menggandeng mitra universitas dan lembaga sosial masyarakat.

Di tahun 2013 PT PII juga melanjutkan inisiatif IIGF Institute sebagai lembaga yang menjadi pusat pengetahuan dan pembelajaran. Dalam menempuh misinya untuk mendukung pembelajaran praktis di kalangan pemangku kepentingan di tataran pusat maupun daerah dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS, IIGF Institute menggandeng beberapa universitas terkemuka sebagai mitra. IIGF Institute telah menyelenggarakan serangkaian sesi *Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR)* pada tahun 2013 sebagai salah satu program kegiatan dalam mendorong kesadaran akan masalah-masalah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan mendorong pengembangan kapasitas di kalangan pemangku kepentingan yang terkait.

Kendala yang Dihadapi

Ditinjau dari sisi kapasitas keuangan maupun kapabilitas sumber daya internal, PT PII sudah sangat siap untuk memberikan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur dalam skema KPS. Namun demikian, fakta bahwa sejauh ini baru satu proyek yang berhasil dijamin mengindikasikan adanya faktor-faktor lain yang menjadi kendala.

Keterbatasan kapasitas pemangku kepentingan di sektor publik dalam penanganan proyek dengan skema KPS menjadi salah satu kendala utama. Dalam kenyataannya, para PJPK sebagai pemilik proyek infrastruktur masih memiliki keterbatasan dalam mempersiapkan dan menstruktur suatu proyek agar menjadi *bankable*. Para PJPK juga banyak yang belum terbiasa dengan kompleksitas yang dituntut dalam skema KPS menyangkut alokasi sumber daya, termasuk pendanaan proyek, ataupun pembagian risiko, dan bagaimana semua itu harus dituangkan dalam suatu kontrak yang dipersiapkan dengan baik.

Social Responsibility

IIGF remains committed to Corporate Social Responsibility (CSR) engagement through capacity building programs and particularly in the area of education in collaboration with partner universities and community organizations.

In 2013, IIGF continued to develop the IIGF Institute as a knowledge and learning center to provide practical learning experiences to key stakeholders at the central government and regional government level related to the development of infrastructure projects within the PPP scheme. In carrying out its missions, the IIGF Institute has partnered with a number of leading universities. As one of its core activity programs, the IIGF Institute has organized several sessions of Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) workshop in 2013, with the objective of raising the level of awareness concerning existing issues in infrastructure development in Indonesia, while encouraging capacity building on the part of related stakeholders.

Our Constraints

In terms of available financial capacity as well as internal resources capacity, IIGF is amply equipped to provide guarantee facilities for infrastructure projects within the PPP scheme. Nevertheless, only one single project was guaranteed so far. This fact indicates that there are other factors at play, which poses a constraint to progress.

One of the major constraints is the limited capacity of public sector stakeholders in the handling of PPP projects. The Government Contracting Agency (PJPK) as project owner often shows certain limitations in preparing and structuring a bankable project that can attract private investments. These PJPKs are also mostly unfamiliar with the necessary complexities of a development project in the PPP scheme in terms of resources sourcing, project funding, or risk allocation, as well as how to put all of these down into a well-prepared contract.

Koordinasi yang masih kurang harmonis antara lembaga atau badan-badan pemerintah juga sering menjadi kendala. Hal ini menjadi penting karena beberapa proyek infrastruktur, misalnya proyek air minum, dapat melibatkan beberapa pemerintah daerah setingkat kabupaten yang berbeda. Kesulitan pengadaan lahan juga masih menjadi kendala bagi beberapa proyek infrastruktur tertentu.

Prospek 2014

Prioritas pertama PT PII untuk tahun 2014 adalah untuk memastikan tercapainya *financial close* pada proyek PLTU Jawa Tengah, sehingga proses pembangunan fisik proyek dapat segera dilakukan. Namun terlebih penting lagi, perkembangan tersebut akan menjadi bukti nyata bahwa skema KPS seperti yang telah dibangun selama ini oleh PT PII merupakan skema yang *workable*. Ini diharapkan akan berdampak positif dalam menarik minat investor swasta, termasuk swasta asing, untuk membangun proyek-proyek KPS infrastruktur lain di Indonesia.

PT PII juga cukup optimis dapat mencapai tahapan *Guarantee Agreement* pada beberapa proyek lain yaitu proyek SPAM Bandar Lampung, SPAM Umbulan di Jawa Timur, serta PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 dan Sumsel 10 di Sumatera Selatan. Pencapaian ini akan berdampak antara lain pada perolehan pendapatan Perseroan pada tahun 2014.

Dari sisi kapasitas penjaminan, PT PII akan berupaya mencari model kerja sama dengan institusi-institusi bilateral maupun multilateral, misalnya sebagai *co-guarantor*, atau melalui skema re-asuransi, atau bentuk kerja sama lainnya. Dengan demikian, PT PII dapat meningkatkan *leverage factor* dari kapasitas penjaminan yang dimiliki dalam rangka menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek KPS infrastruktur.

Often enough, problems exists due to lack of proper coordination among related government agencies or institutions. The aspect of coordination is important as certain infrastructure projects, for example a clean water supply project, may involve key public stakeholders from a number of different regency-level regional governments. Difficulties in land acquisition are also a constraint in certain infrastructure projects.

Prospects in 2014

IIGF first priority in 2014 would be to ensure the financial close transaction of the Central Java Power Plant project, to enable the physical construction to begin. This is all the more important as it will present a concrete evidence as to the doability of the PPP project structuring scheme as has been developed throughout these years by IIGF. In turn, this should serve positively in attracting the interest of private sector investments, including from overseas investors, to participate in the development of other infrastructure PPP projects in Indonesia.

IIGF is also optimistic of being able to reach the Guarantee Agreement stage in a number of other projects, namely the Bandar Lampung Clean Water project, the Umbulan-East Java Clean Water project, and the Sumsel-9 & 10 Minemouth Power Plant projects in South Sumatra. These will impact, inter alia, on the Company's prospective revenue streams in 2014.

In terms of guarantee capacity, IIGF will continue to seek collaboration with bilateral and multilateral financial institutions to act as project co-guarantor, provide a re-insurance coverage, or some other forms of collaboration. In this way, IIGF will leverage on the available guarantee capacity to provide guarantee facilities to more PPP infrastructure projects.

Ucapan Terima Kasih

Atas nama Direksi, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh karyawan PT PII yang selama ini telah bekerja sama dengan solid dan penuh dedikasi demi kemajuan PT PII. Kami juga sangat menghargai dukungan dan kerja sama dari Dewan Komisaris, pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk mitra kerja di berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintahan di pusat dan daerah, para Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, serta investor dan penyandang dana. Kami tetap mengandalkan pada dukungan dan kerja sama yang baik tersebut untuk membawa PT PII mencapai kemajuan lebih jauh dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan-tujuan Perseroan.

Appreciation

On behalf of the Board of Directors, I would like to sincerely thank all staff at IIGF for their solid and dedicated teamwork for the progress of IIGF. We also convey our deepest appreciation for the support and vote of confidence from the Board of Commissioners, shareholders, and all other stakeholders including our counterparts in Government line ministries and agencies at the central and regional government level, the various Government Contracting Agencies, as well as investors and financiers. We hope that IIGF can continue to rely on your support and cooperation as we move forward in accomplishing IIGF's vision, mission and objectives.



Sinthya Roesly
Direktur Utama
President Director

Tinjauan Usaha

Business Review



Kapasitas Penjaminan Guarantee Capacity

Kemampuan modal menentukan kapasitas PT PII dalam menyediakan penjaminan bagi proyek KPS infrastruktur yang kemudian berpengaruh pada kredibilitas PT PII di mata investor.

Sampai dengan akhir tahun 2013, kapasitas PT PII untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur KPS masih sepenuhnya bergantung pada kemampuan modal Perseroan yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN. Dengan total ekuitas sebesar Rp 5,1 triliun per 31 Desember 2013, PT PII masih memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan penjaminan bagi proyek-proyek pengembangan infrastruktur yang saat ini ditangani Perseroan.

Sampai saat ini, proyek yang telah mencapai tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan adalah proyek pembangunan PLTU Jawa Tengah di Kabupaten Batang, dengan nilai yang dijamin sebesar Rp 300 miliar. Sisa kapasitas yang dimiliki diperkirakan cukup untuk memberikan penjaminan bagi sejumlah proyek lain, yaitu proyek Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung, proyek PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan

IIGF's ability to underwrite PPP infrastructure projects is determined by the strength of its equity capital, which in turn will also impact on the Company's credibility in the eyes of investors.

Up through year-end 2013, IIGF's capacity to underwrite PPP infrastructure projects still relies solely on its equity capital in the form of Government Equity Participation (PMN) funds allocated from the State Budget. With total equity amounting to Rp 5.1 trillion as at December 31, 2013, IIGF still have adequate capacity to cover the underwriting of certain infrastructure development projects currently being processed by the Company.

To date, the Central Java Power Plant in Batang Regency remains the sole project that has been covered by IIGF with a Guarantee Agreement, with a coverage amount of Rp 300 billion. The remaining amounts of its equity capital is deemed adequate to underwrite several other projects in the pipeline, namely the Clean Water Supply (SPAM) Bandar Lampung project, the Sumatra Selatan-9 & 10 Mine mouth Power Plant projects,

9 & 10, serta proyek SPAM Umbulan di Jawa Timur. Apabila tidak tercukupi, maka sesuai regulasi yang berlaku, PT PII dapat melakukan penjaminan bersama dengan Pemerintah.

Selain melalui penjaminan bersama dengan Pemerintah sebagai upaya terakhir, PT PII juga dimungkinkan untuk meningkatkan kapasitas penjaminan melalui kerja sama dengan lembaga pembangunan multilateral maupun institusi keuangan internasional. Kerja sama tersebut dapat berbentuk penjaminan bersama, re-asuransi, ataupun penyediaan fasilitas pinjaman.

Terkait dengan perluasan kapasitas penjaminan, PT PII sejauh ini juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai institusi internasional seperti *Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)*, *China Exim*, *Islamic Development Bank (IDB)*, dan *Overseas Private Investment Corporation (OPIC)*.

Berbagai komitmen tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap proses-proses penjaminan PT PII yang transparan dan akuntabel. Salah satu contohnya adalah pada proyek SPAM Bandar Lampung, dimana PT PII telah mendapatkan komitmen dari MIGA untuk bertindak sebagai penjamin bersama dengan nilai sebesar nilai penjaminan PT PII pada proyek tersebut.

Pada bulan Mei 2013, PT PII juga telah menandatangani perjanjian pinjaman dari *World Bank* senilai USD 30 juta untuk fasilitas penjaminan dan bantuan teknis. Sampai dengan akhir tahun 2013, PT PII belum melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman tersebut.

Perkembangan penting lain di tahun 2013 adalah perolehan peringkat kredit BBB- untuk kategori jangka panjang dan F3 untuk jangka pendek dari lembaga pemeringkat terkemuka internasional *Fitch Ratings* bagi PT PII. Peringkat yang sejajar dengan peringkat pemerintah Indonesia ini memberikan kredibilitas tambahan bagi PT PII di mata investor dan penyandang dana.

and the Umbulan SPAM project in East Java. IIGF, should its balance sheet proves inadequate, is allowed by regulations to structure a co-guarantee scheme with the Government of Indonesia.

In addition to a co-guarantee scheme with the Government as a last resort, IIGF can also seek to increase its guarantee capacity through cooperation with multilateral development agencies and international financial institutions, in the form of co-guarantee, re-insurance, or loan facilities.

In regards efforts to increase its guarantee capacity, IIGF to date has cooperated with various international institutions such as the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), China Exim, Islamic Development Bank (IDB), and the Overseas Private Investment Corporation (OPIC).

All of these commitments reflect the confidence towards IIGF in terms of accountable and transparent project guarantee structuring processes. An example would be the Bandar Lampung SPAM project, in which IIGF has secured the commitment of MIGA to stand as co-guarantor, to the amount guaranteed by IIGF in the project.

In May 2013, IIGF has also signed a loan agreement with the World Bank for USD 30 million as a guarantee liquidity and technical assistance facility. As at year-end 2013, IIGF has yet to make a drawdown on this facility.

Another important development in 2013 was the credit rating assignment of BBB- for long-term credit and F3 for short-term credit for IIGF issued by the international rating agency, Fitch Ratings. The credit rating, equivalent to the sovereign rating of Indonesia, provides additional credibility to IIGF in the eyes of investors and financiers.



IIGF Institute

IIGF Institute



Indonesia Infrastructure Roundtable

41

Pada akhir tahun 2012, PT PII telah merintis pembentukan IIGF Institute (IIGFI) sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan terkait pemahaman, perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Tujuan ini diupayakan melalui sistem pelatihan, penelitian, dan perluasan jangkauan dan keterlibatan (*outreach*) pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan untuk pengembangan institut ini dalam cakupan yang lebih luas.

Keberadaan dan aktivitas IIGF Institute diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan dan menerapkan pembangunan infrastruktur, menjadikan institusi ini sebagai pusat pengetahuan di bidang pembangunan infrastruktur yang siap membantu para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dan menghadapi tantangan pembangunan yang berubah dengan cepat secara nasional dan global. IIGF Institute juga diharapkan

Towards the end of 2012, IIGF has initiated the establishment of IIGF Institute (IIGFI) as part of a strategy for capacity building on the part of stakeholders in terms of the understanding, planning and implementation of infrastructure development within the Public Private Partnership (PPP) scheme. Towards this objective, IIGFI will facilitate the provision of training and research initiatives as well as in widening the outreach of the Government, private sector and the general public, while leaving open the option of further development of the IIGFI to broaden its scope of activities.

Through its existence and activities, IIGF Institute aims to improve people capacity in the development and implementation of infrastructure projects, as well as in its function as a knowledge center in infrastructure development capable of assisting decision makers in the formulation of public policies in the face of the rapidly changing development challenges in both the domestic and global scope. IIGF Institute is also expected to encourage innovations in science and

dapat memberikan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2013, organisasi IIGF Institute telah ditetapkan terdiri atas penentu kebijakan yaitu Direksi PT PII, serta pengelola yaitu *Program Manager* yang dibantu seorang staf sebagai pelaksana administrasi dan komunikasi. PT PII juga telah menunjuk penasihat ahli yang memberikan masukan atas pengembangan institusi ini, termasuk penyusunan visi dan misi serta rencana strategis program IIGF Institute sehingga menjadi institusi yang mandiri.

Misi dari IIGF Institute adalah:

1. Menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas, keahlian, manajemen dan pengetahuan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur di bawah skema KPS berbasiskan tata kelola yang baik, dimana diharapkan memberikan kontribusi kepada daya saing dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Mendorong upaya-upaya kolaboratif diantara para pemangku kepentingan untuk mengisi kebutuhan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan infrastruktur agar bertumpu pada hasil-hasil penelitian.
3. Membangun sistem manajemen informasi untuk dukungan penelitian di bidang pembangunan infrastruktur yang berbasis cara terbaik (*best practices*), konteks lokal, dan akuntabel dengan pendekatan multi disiplin ilmu.

Saat ini, salah satu program kegiatan dari IIGF Institute adalah penyelenggaraan forum *Indonesia Infrastructure Roundtable* (IIR), yang secara rutin telah dilaksanakan sejak November 2012. Kegiatan IIR ini melibatkan kerja sama dengan tiga perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada. Tujuan dari kegiatan IIR adalah untuk memperluas jangkauan dan keterlibatan para pemangku kepentingan serta masyarakat yang bersifat *knowledge-sharing* dan

technology in support of the national infrastructure development agenda as well as improved welfare of the general public.

By 2013, the organization of the IIGF Institute has been established, comprising the Board of Directors of IIGF as policy maker, and a Program Manager as administrator assisted by a staff that handles the day to day administrative and communications work. IIGF has also appointed an expert advisor to assist in the development of IIGF Institute, including formulation of vision and mission statements and the strategic development plans towards becoming an independent institution.

The missions of IIGF Institute are:

1. To engage in activities to develop the capacity, expertise, management and knowledge in regards the development of infrastructure projects within the PPP scheme on the basis of good governance practices, in order to contribute to Indonesia's economic growth and competitiveness.
2. To encourage better collaboration among key stakeholders concerning the need for public policy formulation and infrastructure development planning on the basis of research results.
3. To develop a comprehensive management information system in support of research initiatives in infrastructure development on the basis of best practices, local context, and accountable processes with a multidisciplinary approach.

At present, a major program initiative undertaken by the IIGF Institute is the Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) forum that was held routinely since November 2012. The IIR forum is organized in collaboration with three of Indonesia's leading national universities, namely Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, and Universitas Gadjah Mada. Through the IIR forum, IIGF Institute aims to expand on the outreach and engagement of stakeholders and the general public through knowledge-sharing and publication of discussions,

publikasi, dimana IIGF Institute dapat berkontribusi pada terciptanya dan meningkatnya pemahaman pada pembangunan infrastruktur di masyarakat luas yang mencakup pemecahan masalah, pencerdasan dan pengembangan kapasitas.

Sepanjang tahun 2013 tercatat telah terselenggara sebanyak 4 kali kegiatan IIR, yaitu pada bulan Februari 2013 dengan tema *Legal and Regulatory Framework*, kemudian pada bulan April 2013 dengan tema *Land Provision*, lalu pada Juli 2013 dengan tema *Project Planning*, serta pada bulan November 2013 dengan tema *Infrastructure Financing*.

Ke depan, arah pengembangan IIGF Institute akan difokuskan pada 3 (tiga) aspek utama. Pertama, membangun landasan bagi Institut Berbasis Penelitian (*Research Based Institute*) sebagai tindak lanjut dari keberhasilan PT PII dalam membangun kerja sama dengan pihak perguruan tinggi lokal maupun internasional. Kedua, membangun kapasitas perorangan, dan tata kelola organisasi dan institusi yang baik (*good institute governance*). Ketiga, memperluas jangkauan dan keterlibatan (*outreach*) para pemangku kepentingan melalui kegiatan yang bersifat pengembangan kapasitas dan publikasi dimana hal ini diharapkan dapat terjadi melalui produk penelitian, produk lulusan pelatihan, dan produk pengetahuan yang dikembangkan IIGF Institute pada kompetensi intinya. Kemampuan IIGF Institute berkontribusi terhadap percepatan pembangunan infrastruktur akan berimplikasi balik terhadap peningkatan kepercayaan publik.

and thus to contribute towards increased understanding of infrastructure development among the general public in terms of problem solving, general education and capacity building.

Throughout 2013, there were four sessions of IIR conducted with different themes, namely in February 2013 with the theme of Legal and Regulatory Framework, in April 2013 with the theme of Land Provision, in July 2013 with the theme of Project Planning, and lastly in November 2013 with the theme of Infrastructure Financing.

Going forward, further development of the IIGF Institute will focus on three major areas. The first is to build on the foundation towards a research-based institution, following up on the successful efforts by IIGF in building a collaborative platform with local and overseas higher learning institutions. Secondly, to further develop the capacity of individuals in the organization as well as the framework for good institute governance. And thirdly, to expand the outreach of stakeholders through activities in capacity building and publications, with the expected output being in research products, people product as graduates of the various workshop sessions, and also knowledge products related to the core competences of IIGF Institute. In turn, the ability of IIGF Institute to contribute towards facilitating infrastructure development will help generate a higher level of confidence on the part of the general public.



Sumber Daya Manusia

Human Resources



44

Per akhir tahun 2013, PT PII didukung oleh 50 orang karyawan (selain Komisaris dan Direksi), meningkat dari 42 orang karyawan setahun sebelumnya. Selain karyawan tetap, PT PII juga mempekerjakan karyawan berstatus kontrak untuk pekerjaan-pekerjaan administratif. Dengan struktur tenaga kerja seperti itu, PT PII dapat mengoptimalkan sumber daya manusia Perseroan dari sisi produktivitas kerja maupun efektivitas program-program pengembangan kompetensi dan kesejahteraan karyawan.

PT PII merekrut sebanyak 13 orang karyawan tetap pada tahun 2013, untuk mengisi posisi-posisi yang telah dibakukan dalam struktur organisasi yang disempurnakan pada tahun 2012. Rekrutmen karyawan, terutama untuk karyawan tetap, dilakukan dengan mengutamakan aspek kompetensi profesional dalam rangka mencari talenta-talenta terbaik untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Dalam rekrutmen karyawan, PT PII juga mengedepankan prinsip kesetaraan kesempatan kerja tanpa membedakan jender, ras dan suku maupun agama.

As at year-end 2013, IIGF employs 50 personnel (other than members of the Board of Commissioners and Board of Directors), an increase from 42 personnel a year previously. In addition to permanent employees, IIGF employs contract workers for certain administrative jobs. This structure allows for optimum use of human capital, in terms of work productivity as well as effective human resources development programs for employee competences and welfare.

In 2013, IIGF recruited 13 permanent employees to fill vacant positions within the formal organization structure that has previously been further improved in 2012. Employee recruitment, and especially for permanent employees, emphasizes on professional competences in seeking the best talents for the positions available. Employee recruitment at IIGF also upholds the principle of equal opportunity employment with no discrimination in regard gender, race, ethnicity or religion.

Dengan upaya-upaya pengembangan yang dilakukan pada tahun 2012 dan 2013, PT PII kini telah memiliki elemen-elemen yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang efisien dan efektif. Pengisian personil untuk seluruh posisi dan fungsi dalam struktur organisasi telah lengkap, dan masing-masing posisi/fungsi tersebut telah dilengkapi dengan uraian jabatan yang baku. PT PII juga telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagai dokumen formal yang menjadi dasar bagi berbagai kebijakan Perseroan di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

As a result of development initiatives undertaken throughout 2012 and 2013, IIGF has put in place all the necessary elements for an effective and efficient management of its human capital. All positions and functions within the organization structure have been filled to capacity, and a formal job description has been developed for each of those position or function. IIGF also has a formal Company Regulations document as a basis for company policies in the area of human capital management.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan Employee Composition by Employment Status		
	2013	2012
Karyawan tetap Permanent employee	34	28
Karyawan kontrak Contract employee	16	14
Jumlah Total	50	42

Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender Employee Composition by Gender		
	2013	2012
Laki-laki Male	30	26
Perempuan Female	20	16
Jumlah Total	50	42

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition by Education		
	2013	2012
S-1 & Diploma Bachelor Degree & Diploma	29	24
S-2 Master Degree	19	16
S-3 Doctoral Degree	2	2
Jumlah Total	50	42

EVALUASI KINERJA BERBASIS KOMPETENSI

Evaluasi kinerja dilakukan setahun sekali dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) berbasis *Balanced Score Card* (BSC) atau lebih dikenal dengan istilah BSC KPI. Selain itu perusahaan juga melakukan *assessment* bagi karyawan ditingkat senior (tingkat SVP/EVP) menggunakan jasa konsultan *assessment* yaitu Daya Dimensi Indonesia (DDI).

COMPETENCE-BASED PERFORMANCE EVALUATION

Employee performance is evaluated annually using a *Balanced Score Card* (BSC)-based *Key Performance Indicators* (KPI), commonly known as BSC KPI. In addition, the performance of senior personnel (SVP/EVP levels) is also evaluated using the services of an independent assessment consultant, Daya Dimensi Indonesia (DDI).

HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia Perseroan, PT PII juga mengembangkan aplikasi *Human Resource Information System* (HRIS) yang memiliki modul absensi, cuti, pelatihan, fasilitas kesehatan (*medical benefit*) dan lainnya.

PROGRAM PELATIHAN KARYAWAN

PT PII juga terus memperhatikan aspek pengembangan kompetensi karyawan. Sejak tahun 2012, PT PII telah menyusun daftar kompetensi perusahaan, sehingga aktivitas rekrutmen dan pengembangan kompetensi karyawan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif untuk mencapai sasaran-sasaran Perseroan. Upaya pengembangan kompetensi karyawan dilakukan melalui pengadaaan berbagai pelatihan, lokakarya maupun seminar bagi karyawan mengenai berbagai topik di bidang penjaminan dan risiko terkait konsep KPS maupun kompetensi yang relevan dengan bidang kerja karyawan di berbagai fungsi atau posisi.

Sepanjang tahun 2013, PT PII menyelenggarakan sebanyak 7 sesi pelatihan/seminar/lokakarya yang diikuti oleh total 55 karyawan. Rata-rata hari pelatihan adalah 4 hari/karyawan/tahun pada tahun tersebut, dibandingkan dengan 6 hari/karyawan/tahun pada tahun 2012. Total biaya untuk pelatihan karyawan mencapai sebesar Rp 347.955.000 dan USD 69.478 pada tahun 2013.

SOSIALISASI BUDAYA PERUSAHAAN

Sesuai dengan Value Perusahaan 'InTIME' yang merupakan singkatan dari *Integrity Teamwork ThInk Big Mutual Trust Excellence* maka agar karyawan memiliki pemahaman yang baik mengenai budaya perusahaan tersebut, untuk kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan *half-day training, meeting*, maupun ketika rapat kerja.

HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM

To further improve the quality of its human capital management, IIGF has also developed a Human Resource Information System (HRIS) application system that currently features modules for employee absence, work leave, employee training, medical benefits, and others.

EMPLOYEE TRAINING PROGRAM

IIGF also continued with efforts at developing employee competences. Since 2012, IIGF has compiled a list of employee competences, leading to more effective and efficient recruitment activities and employee competence development programs in support of the Company's objectives. The development of employee's competency is undertaken through the provision of training courses, workshops and seminars for employees on various topics related to guarantee and risks within the PPP scheme, as well as the relevant competences needed by employees on various positions or functions.

Throughout 2013, IIGF conducted 7 training courses/seminars/workshops attended by a total of 55 participants, or equal to average training days of 4 days/employee/year compared to 6 day/employee/year of training in 2012. Total expenses for employee training in 2013 amounted to Rp 347,995,000 and USD 69,478.

SOCIALIZATION OF CORPORATE CULTURE

The corporate culture is based on the values of 'InTIME', which is an abbreviation of Integrity Teamwork ThInk Big Mutual Trust Excellence. To allow employees to have good understanding of corporate culture, these values are constantly and consistently socialized among employees through series of half-day training session as well as through meetings or group work sessions.



Pengadaan Procurement



47

CONSULTANT MANAGEMENT SYSTEM

PT PII menggunakan jasa konsultan eksternal untuk membantu pelaksanaan berbagai proses yang diperlukan guna mewujudkan penjaminan atas proyek pembangunan infrastruktur. Keterlibatan konsultan eksternal independen diperlukan untuk menjamin kualitas dan kredibilitas *output* yang dihasilkan pada tiap tahapan proses pengadaan penjaminan, mulai dari tahap penyaringan, penilaian dan penstrukturan. Dalam proses-proses tersebut, PT PII melibatkan konsultan ahli di berbagai bidang yang spesifik seperti konsultan hukum, hukum perusahaan, keuangan, manajemen proyek, dan lain-lain.

Proses pengadaan konsultan ahli dilakukan dengan membuka penawaran lelang untuk jasa konsultan tertentu pada saat terdapat kebutuhan untuk jasa tersebut sesuai dengan perkembangan tahapan pada proyek yang sedang ditangani. PT PII menyadari bahwa cara kerja seperti ini tidak efisien dipandang dari sisi waktu, biaya maupun tenaga yang dikeluarkan.

CONSULTANT MANAGEMENT SYSTEM

IIGF engages the services of external consultants to assist in the various processes involved in developing a guarantee structure for infrastructure projects. The involvement of independent external consultant is needed to ensure the quality and credibility of output at each stage of the guarantee process, starting from the project screening, project appraisal and guarantee structuring stages. In these processes, IIGF utilizes the services of expert consultants in various specific areas such as legal, corporate legal, finance, project management, and other areas of expertise.

The procurement of these consultants is undertaken through a tender process for each of the specific areas of expertise as needed in accordance with the progress and development stages of the various projects being handled. This, it was realized, is obviously inefficient in terms of time, cost and efforts spent.

Untuk itu, PT PII pada tahun 2013 mengembangkan apa yang disebut sebagai *Consultant Management System*, dengan membentuk suatu *consultant pool* yang dapat menyediakan berbagai jasa konsultan yang dibutuhkan. Berbagai penyedia jasa konsultan tersebut dipilih melalui proses lelang dengan penyaringan yang ketat untuk serangkaian kriteria, mulai dari kapabilitas profesional, rekam jejak, komitmen, sampai pada harga atau biaya konsultasi.

Masing-masing penyedia jasa dalam *consultant pool* menandatangani suatu kontrak kerja sama dengan PT PII untuk jangka waktu dua tahun, yang dapat diperpanjang untuk periode dua tahun bergantung pada kinerja yang diperlihatkan. Melalui *consultant management system*, PT PII kini dapat segera menunjuk konsultan ahli yang diperlukan setiap saat sesuai kebutuhan, tanpa harus mengadakan proses penawaran lelang tersendiri untuk pengadaannya.

Pada tahun 2013, setelah proses lelang dan penentuan pemenang, PT PII telah memiliki daftar sekitar 15 konsultan yang siap bertugas, terdiri dari konsultan *appraisal*, konsultan *legal* untuk proyek, konsultan *legal* untuk korporasi, konsultan teknik, konsultan lingkungan dan sosial.

Accordingly, IIGF in 2013 has developed the so-called Consultant Management System, by establishing a consultant pool that can provide for the various consultant services needed by IIGF. The various consultant firms in the consultant pool are selected through a stringent tender process that evaluates a variety of criteria, including professional capability, track record, level of commitment, and up to service or consultancy fee quoted.

Each of the service providers in the consultant pool is bound through a two-year service contract with IIGF, at the end of which another 2-year extension can be granted according to performance criteria. Through the consultant management system, IIGF is now able to obtain the necessary consultant services needed at any time, without having to go through a separate tender process for its procurement.

After completing the tender process and determination of the winning bidders, IIGF in 2013 has engaged some 15 consultants that are ready to provide their services, comprising experts in project legal, corporate legal, technical consultants, and social and environment consultants.



E-PROCUREMENT

Pada tahun 2013, PT PII telah menyelesaikan pengembangan sistem *E-Procurement* bagi proses pengadaan barang dan jasa. Melalui *E-Procurement*, para pemasok barang dan jasa kini dapat mendaftarkan diri untuk menjadi rekanan, melihat paket pengadaan barang dan jasa yang dilelang, memasukkan penawaran, dan melihat status dan hasil lelang, semuanya melalui proses yang *online*. Dengan demikian, proses pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung dengan lebih efisien dan sekaligus lebih transparan.

Sistem *E-Procurement* menangani pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam mendukung aktivitas operasional Perseroan sehari-hari seperti perlengkapan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan, perlengkapan computer dan IT, dan lain-lain sejenisnya. Sistem tersebut telah mulai diterapkan sejak bulan April 2013.

E-PROCUREMENT

In 2013, IIGF has completed the development of an E-Procurement application for the procurement of goods and services. Through the E-Procurement system, goods and services vendors could register their companies as registered supplier, obtain information on goods and services packages being offered for tender, submit their bids, and track the bid status and tender result, all through a convenient online process. This makes the procurement process more efficient as well as transparent.

The E-Procurement system handles the procurement of goods and services needed in the daily operational activities of IIGF, such as office equipment, office stationery, print materials, computer and IT equipment, and other such items. The E-Procurement system has been fully implemented since April 2013.

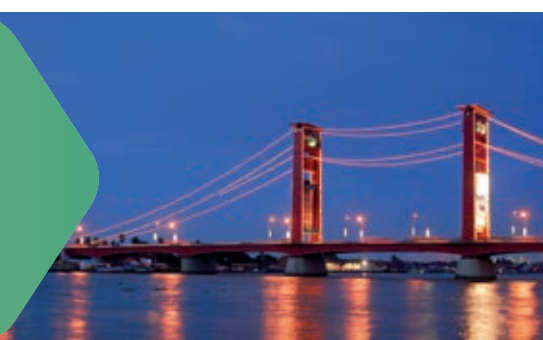


Pengembangan Usaha

Business Development



Proyek PLTU Jawa Tengah Central Java Power Plant Project



51

Proyek PLTU Jawa Tengah merupakan proyek pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2 x 1.000 MW berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Fasilitas PLTU senilai US\$ 4 miliar atau lebih dari Rp 40 triliun tersebut akan dibangun oleh konsorsium PT Bimasena Power Indonesia (BPI) dengan skema *Build-Operate-Transfer* selama masa konsesi 25 tahun. Ini merupakan proyek infrastruktur skema KPS sesuai Perpres 67/2005 pertama yang berhasil diwujudkan dengan memperoleh fasilitas penjaminan bersama oleh PT PII dan Pemerintah RI (Kementerian Keuangan) sesuai Perpres 78/2010.

Sebagaimana ketentuan Pemerintah RI dan mengacu pada PPA (*Power Purchase Agreement*) sebagai Perjanjian KPS yang ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan BPI, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan BPI serta Perjanjian Regres dengan PT PLN (Persero) sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) pada tanggal 6 Oktober 2011. Sesuai dengan prosedur yang ada, proses berikutnya adalah perolehan pembiayaan (*Financial Close* atau FC) oleh BPI, dalam tenggat waktu 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian para pihak atau pada 6 Oktober 2012.

The Central Java Power Plant project refers to the development of a 2 x 1,000 MW capacity coal-fired power plant in Batang Regency, Central Java. The power plant facility, representing an investment of some US\$ 4 billion or more than Rp 40 trillion, will be built by PT Bimasena Power Indonesia (BPI) consortium under a Build-Operate-Transfer scheme with a 25-year concession period. This is the first PPP infrastructure project as defined in Presidential Regulation (Perpres) 67/2005 to be accomplished with a co-guarantee facility by IIGF and the Government of Indonesia (Ministry of Finance) as provided for in Perpres 78/2010.

In accordance with Government regulations and with reference to the Power Purchase Agreement (PPA) as the PPP Agreement between PT PLN (Persero) and BPI, IIGF has signed a Guarantee Agreement with BPI and a Recourse Agreement with PT PLN (Persero) as the Government Contracting Agency (PJPK) of the project on October 6, 2011. Following established procedures, the next step should be the Financial Close (FC) by BPI to be accomplished within a 12-month period from the agreement signing, or by October 6, 2012.

Dalam kenyataannya kemudian, terjadi keterlambatan dalam penerbitan beberapa perizinan yang diperlukan, penyelesaian proses AMDAL, serta penuntasan pembebasan lahan untuk proyek. PT PII kemudian secara proaktif membentuk *Joint Monitoring Committee* (JMC) bersama perwakilan dari BPI dan PT PLN (Persero), untuk memantau upaya-upaya penyelesaian masalah-masalah tersebut. Namun, sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, proses FC belum dapat tercapai.

Agar transaksi proyek tetap memenuhi ketentuan yang ada, pihak BPI kemudian memperoleh perpanjangan tenggat waktu pencapaian FC selama 12 bulan, atau sampai dengan 6 Oktober 2013, sebagaimana disetujui oleh PT PLN dan dituangkan dalam amandemen PPA (pertama) pada tanggal 6 Oktober 2012. Namun karena kompleksitas isu pembebasan tanah oleh pemilik lahan dan adanya keterlambatan pada proses sertifikasi tanah, FC masih belum tercapai sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Setelah memperoleh perpanjangan tenggat waktu pencapaian FC yang kedua (dengan terbitnya Perpres 66/2013 pada tanggal 6 Oktober 2013), para pihak terus berupaya agar FC proyek PLTU Jawa Tengah dapat terlaksana sebelum tanggal 6 Oktober 2014.

As it turned out, there were delays related to the issuance of necessary permits, completion of AMDAL process, and also some land acquisition issues. IIGF has moved up-stream proactively in establishing the Joint Monitoring Committee (JMC) along with representatives from BPI and PT PLN (Persero) to monitor the progress in resolving those issues. However, up until the deadline set, BPI has been unable to go ahead with the FC process.

Following the prevailing rules on project transaction, BPI has been granted an extension on the deadline for FC by another 12-month period, or until October 6, 2013, as was agreed to by PT PLN (Persero) and defined in the Amended PPA document signed on October 6, 2012. However, the deadline for the FC was missed again due to unresolved issues in land acquisition as well as delays in the land certification process.

After obtaining a second extension for the FC deadline (as allowed for through the issuance of Perpres 66/2013 on October 6, 2013), the parties concerned have moved on to ensure a FC for the Central Java Power Plant project before the deadline on October 6, 2014.



Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Bandar Lampung

Bandar Lampung Clean Water
 Supply (SPAM) Project



Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung dimaksudkan untuk meningkatkan pasokan air bersih untuk kota Bandar Lampung, dimana fasilitas yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi untuk mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat. Dengan nilai investasi perkiraan antara US\$ 80 juta dan US\$ 100 juta, proyek SPAM Bandar Lampung meningkatkan kapasitas pasokan 500 liter/detik air bersih dan distruktur sebagai proyek *Built-Operate-Transfer* dengan masa konsesi 27 tahun. Proyek SPAM Bandar Lampung juga merupakan proyek pembangunan infrastruktur publik pertama yang akan didukung oleh fasilitas Dukungan Keuangan (DK) dari Pemerintah (Kementerian Keuangan).

Pada bulan Oktober 2012, PT PII telah menerbitkan Pernyataan Komitmen (*Letter of Intent*) untuk memberikan penjaminan atas proyek SPAM Bandar Lampung. Nilai yang akan dijamin masih menunggu keputusan Pemerintah mengenai besarnya DK untuk proyek tersebut. Dikeluarkannya PMK No. 223 /011/2012 mengenai DK pada tanggal 12 Desember 2012 memberikan arahan yang lebih jelas mengenai

The Bandar Lampung Clean Water Supply (SPAM) project is intended to increase the supply of clean water to the township of Bandar Lampung, where existing facilities are no longer adequate to keep up with growing demand. With an estimated investment value of between US\$ 80 million to US\$ 100 million, the Bandar Lampung SPAM project will provide the capacity for 500 liters/second of clean water, and is structured in a Built-Operate-Transfer scheme with a concession period of 27 years. The Bandar Lampung SPAM project is also the first public infrastructure project to be developed with the support of a Viability Gap Funding (VGF) facility from the Government (Ministry of Finance).

In October 2012, IIGF has issued a Letter of Intent for the provision of a guarantee facility on the Bandar Lampung SPAM project. The value to be guaranteed is still pending the Government decision in regards the amount of available VGF for the project. The issuance of Finance Minister Decree No. 223/011/2012 on Viability Gap Funding dated December 12, 2012, has provided a degree of certainty for the project to progress

kelanjutan proyek selama tahun 2013 sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung selaku PJPK mengajukan DK pada tanggal 24 Desember 2013. Diharapkan pada semester pertama tahun 2014 keputusan besaran DK sudah didapatkan sehingga lelang diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2014.

in 2013, and subsequently the Bandar Lampung Municipal Government as the PJPK has submitted a VGF application package on December 24, 2013. The Government decision of the amount of VGF is expected by the first semester of 2014, enabling the project tender process to be completed also in 2014.

PROYEK SPAM UMBULAN - JAWA TIMUR

Proyek SPAM Umbulan akan menyediakan penyediaan air curah dengan debit 4.000 liter/detik dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ke 5 (lima) daerah/kabupaten lainnya di Jawa Timur. Pada tanggal 7 Oktober 2013, PT PII telah menerbitkan Surat Dukungan (*Letter of Intent*) guna penjaminan proyek ini kepada Pemerintah Daerah Pasuruan sebagai PJPK. Selanjutnya, PT PII pada tanggal 19 Desember 2013 telah menyampaikan Rancangan Final Perjanjian Penjaminan kepada PJPK.

UMBULAN - EAST JAVA SPAM PROJECT

The Clean Water Supply (SPAM) Umbulan project will provide for a raw water supply of 4,000 liter/second from the Pasuruan Regency, East Java, to 5 (five) other municipalities/ regencies in East Java. In October 7, 2013, IIGF has issued a Letter of Intent for a guarantee facility for the project to the Regional Government of Pasuruan as PJPK. Subsequently, the final draft of the Guarantee Agreement document has been submitted by IIGF to the PJPK in December 19, 2013.

PROYEK SPAM SEMARANG BARAT

Proyek SPAM Semarang Barat akan menyediakan air bersih dengan kapasitas 1.050 liter/detik untuk melayani kebutuhan di wilayah kota Semarang bagian barat. PT PII telah menerbitkan surat *Confirmation to Proceed* kepada Pemerintah Daerah Semarang sebagai PJPK.

WEST SEMARANG SPAM PROJECT

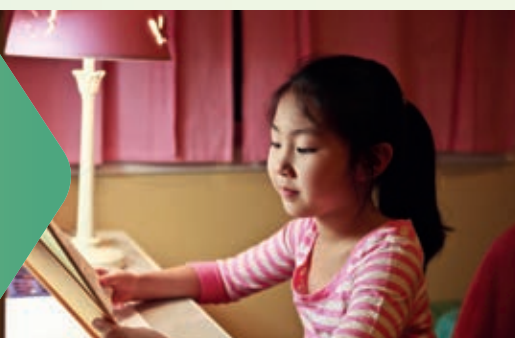
The West Semarang Clean Water Supply (SPAM) project will provide 1,050 liter/second of clean water to supply the needs of the western sector of the city of Semarang. IIGF has issued a Confirmation to Proceed letter to the Municipal Government of Semarang as PJPK.





Proyek PLTU Mulut Tambang

Mine-Mouth Power Plant Project



Proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel-9 & 10 mengacu pada pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2 x 600 MW (Sumsel-9) dan 1 x 600 MW (Sumsel-10) di lokasi yang bersebelahan dengan area tambang batubara, sehingga dapat menekan biaya pasokan batubara sebagai sumber energi masing-masing PLTU tersebut. PT PLN (Persero) adalah PJPK pada proyek-proyek tersebut.

Pada tahun 2013, aktivitas PT PII terkait dengan proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel-9 & 10 antara lain adalah:

- Mengirim Surat Tanggapan pada tanggal 24 Mei 2013 atas permintaan Dokumen Usulan Penjaminan/GAP).
- Menerima kelengkapan dokumentasi GAP dari PJPK pada tanggal 7 Juni 2013
- Meneruskan Usulan Penjaminan dan Usulan Pembagian Risiko kepada Menteri Keuangan pada 18 Oktober 2013
- *Workshop* dengan Kementerian Keuangan tanggal 21-23 Oktober 2013 membahas Hasil Evaluasi Usulan Penjaminan dan Usulan Pembagian Risiko
- Saat ini menunggu respons dari Kemenkeu untuk tindak lanjut Hasil Evaluasi Penjaminan.

The Sumsel-9 & 10 Minemouth Powerplant Project refers to the development of coal-fired powerplants with respective capacities of 2 x 600 MW (Sumsel-9) and 1 x 600 MW (Sumsel-10) to be built adjacent to coal mining areas so as to benefit from lower transportation costs of coal as the source energy of the power plants. PT PLN (Persero) is the PJPK for the projects.

In 2013, IIGF undertook the following activities towards the progress of Sumsel-9 & 10 Minemouth Powerplant project:

- Submitting a Response Letter on May 24, 2013, regarding the Guarantee Application Package (GAP) submitted.
- The completed GAP documentation from PJPK was received on June 7, 2013
- Forwarding the Guarantee Application and the Risk Allocation Application to the Finance Minister on October 18, 2013
- Attending a workshop with the Ministry of Finance in October 21-23, 2013, to discuss the Evaluation Result of Guarantee Application and the Risk Allocation Application
- Currently awaiting response from the Ministry of Finance on the follow up of Guarantee Evaluation Result

- Draft Perjanjian Penjaminan untuk Pemerintah dan PT PII sedang disiapkan, sambil menunggu posisi Kementerian Keuangan terhadap Penerusan Usulan Penjaminan dan Pembagian Risiko dengan PT PII.
- The draft document for Guarantee Agreement is being prepared, pending the position of the Ministry of Finance in regards the Guarantee Application and Risk Allocation Application from IIGF.



56

Proyek Kereta Api Batu Bara Coal Railway Project



PROYEK KERETA API BATU BARA KALIMANTAN TENGAH

Proyek Kereta Api Batu Bara Kalimantan Tengah merupakan proyek pembangunan jalur kereta api sepanjang sekitar 288 kilometer antara Puruk Cahu - Bangkuang di Kalimantan Tengah khusus untuk pengangkutan batu bara dengan kapasitas angkut 39 - 49 juta ton per tahun. Proyek ini merupakan proyek KPS perkeretaapian yang pertama dan salah satu proyek utama dalam MP3EI untuk Koridor Kalimantan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai PJPK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT PII untuk pendampingan penyiapan proyek dalam skema KPS pada bulan November 2011.

CENTRAL KALIMANTAN COAL RAILWAY PROJECT

The Central Kalimantan Coal Railway project refers to the development of a dedicated coal transportation railway track of around 288 kilometers between Puruk Cahu - Bangkuang in Central Kalimantan with a capacity of 30 - 49 million tons of coal per year. The project will be the first PPP project in the railway transportation sector and is also one of the primary infrastructure projects in the MPE3I for the Kalimantan Corridor. The Provincial Government of Central Kalimantan as PJPK has signed a Cooperation Agreement with IIGF in November 2011 for project preparation consultation in the PPP scheme.

Proyek Kereta Api Batu Bara Kalimantan Tengah merupakan proyek yang sangat kompleks dilihat dari sisi lingkungan, pasar, struktur maupun tarif. Nilai investasi yang dibutuhkan diperkirakan sekitar USD 2,6 miliar, dan ditawarkan dalam skema *Built-Own-Operate-Transfer* dengan masa konsesi 50 tahun. Mengingat besarnya nilai proyek, PT PII kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai kemungkinan keikutsertaan Pemerintah sebagai *co-guarantor* dalam proyek tersebut.

Pada bulan Oktober 2012, PT PII telah menerima Dokumen Usulan Penjaminan (GAP) dari Pemprov Kalsel sebagai awal proses evaluasi penjaminan. Berdasarkan evaluasi PT PII atas kelayakan proyek, kapasitas APBD Pemprov Kalteng maupun analisa risiko atas GAP yang diajukan Pemprov Kalteng, kelanjutan penjaminan proyek akan bergantung pada terpenuhinya beberapa pra-kondisi oleh PJPK. Pada tahun 2013, PT PII masih melanjutkan proses-proses dalam *Project Guarantee & Consultation* (PGC) untuk Proyek Kereta Api Batu Bara Kalimantan Tengah tersebut.

The Central Kalimantan Coal Railway project is highly complex project in terms of environment, market, structure and tariff considerations. The project will need an investment of around USD 2.6 billion, and is offered in a Built-Own-Operate-Transfer scheme with a concession period of 50 years. In view of the high investment value, IIGF has coordinated with the Ministry of Finance regarding the possibility of Government participation as co-guarantor in the project.

In October 2012, IIGF has received the Guarantee Application Package (GAP) from the Central Kalimantan Provincial Government as the initial step in the guarantee evaluation process. Based on the evaluation by IIGF over project viability, capacity of regional government budget and risk analysis of the submitted GAP, the viability of project guarantee will depend on the fulfillment of certain pre-requisites by the PJPK. Throughout 2013, IIGF continued with the various Project Guarantee & Consultation (PGC) processes for the Central Kalimantan Coal Railway project.

Tinjauan Keuangan

Financial Review



TINJAUAN LINGKUNGAN USAHA

Perseroan memperoleh pendapatan usaha terutama dari aktivitas penjaminan serta dari aktivitas pengelolaan dana. Pendapatan dari penjaminan terdiri atas pendapatan premi (*guarantee fee* dan *processing fee*) serta pendapatan provisi dan komisi terkait dengan proses penjaminan (*arranging fee*, *ceded commissions*, dan provisi dan komisi lain-lain). Sementara itu, pendapatan dari pengelolaan dana diperoleh dari penempatan aset keuangan Perseroan pada berbagai instrumen investasi keuangan seperti penempatan dana pada deposito berjangka di bank, penempatan dana pada portofolio obligasi baik untuk tujuan diperdagangkan maupun untuk dimiliki hingga jatuh tempo, serta penempatan dana pada produk reksa dana.

Beban usaha Perseroan dalam pada itu terutama terdiri dari beban penjaminan, beban administrasi dan umum, serta beban pengembangan terkait dengan komunikasi dan sosialisasi bidang usaha Perseroan.

BUSINESS REVIEW

The Company generates operating revenues from activities in project underwriting and fund management. Revenues from project underwriting consist of premium revenues (guarantee fees and processing fees) as well as guarantee-related fees and commissions (arranging fees, ceded commissions, and other fees and commissions). Revenues from fund management are derived from placement of the Company's financial assets on variety of financial investment instruments such as time deposit placements in banks and portfolio investment in bonds, consisting of available for sale bonds and held to maturity bonds, as well as investments in mutual funds products.

The Company's expenses meanwhile consist of underwriting expenses, general and administrative expenses, and development expenses related to the communication and socialization of the Company's business.

KINERJA KEUANGAN 2013

Berikut ini adalah pembahasan dan analisa mengenai hasil-hasil operasional dan posisi keuangan Perseroan pada tahun 2013, yang disajikan berdasarkan Laporan Keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 yang telah diaudit.

Hasil-Hasil Operasional

Hasil-Hasil Operasional Results of Operations	(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiahs)	
	2013	2012
Pendapatan Operasi Operating Revenue	392,961,435	312,240,468
Beban Operasi Operating Expenses	88,261,147	50,666,380
Laba Sebelum Pajak Profit Before Income Tax	304,700,288	261,574,088
Laba Bersih Net Income	249,759,988	213,378,069
Jumlah Pendapatan Komprehensif Total Comprehensive Income	232,322,909	214,778,786

Pendapatan

Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 393,0 miliar pada tahun 2013, tumbuh 25,8% dari pendapatan yang dibukukan pada tahun 2012 sebesar Rp 312,2 miliar, dan seluruhnya merupakan pendapatan pengelolaan dana.

Pertumbuhan pendapatan pengelolaan dana tersebut mengalami peningkatan akibat tingginya tingkat suku bunga dan efektivitas penempatan investasi pada deposito berjangka dan surat berharga berpendapatan tetap, yang tercatat sebesar Rp 5.064,0 miliar pada akhir tahun 2013, naik 3,8% dari Rp 4.884,1 miliar setahun sebelumnya.

Pendapatan bunga dari penempatan pada deposito berjangka berkontribusi Rp 307,9 miliar, atau 78,3%, pada total pendapatan pengelolaan dana, disusul oleh pendapatan bunga dari investasi pada surat berharga berpendapatan tetap sebesar Rp 81,5 miliar (21,3%), sedangkan selebihnya adalah laba dari penjualan obligasi pada portofolio investasi tersedia untuk dijual.

2013 FINANCIAL PERFORMANCE

The following is an analysis and discussions on the Company's results of operations and financial position for the year 2013, presented on the basis of the audited Financial Statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) for the years ended 31 December 2013 and 2012.

Results of Operations

Revenues

The Company posted revenues of Rp 393.0 billion in 2013, increased by 25.8% over revenues of Rp 312.2 billion in 2012, and consists entirely of income from investments.

The growth of Income from investments is increase due to high interest and an effective placement of the Company's investment in time deposits and fixed income securities of Rp 5,064.0 billion at year-end 2013, increased by 3.8% from Rp 4,884.1 billion from the previous year.

Interest income from placement in time deposits contributed Rp 307.9 billion, or 78.3%, of total income from investments, followed by interest income from fixed coupon bonds of Rp 81.5 billion (21.3%) and the rest derived from sale of bonds in the available for sale portfolio.

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan terdiri atas beban penjaminan, beban administrasi dan umum, serta beban pengembangan usaha. Beban usaha tercatat meningkat sebesar Rp 37,6 miliar, atau 74,2%, dari Rp 50,7 miliar pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp 88,3 miliar di 2013. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan signifikan pada beban penjaminan sebesar Rp 27,1 miliar dan kenaikan beban administrasi dan umum sebesar Rp 9,4 miliar.

Beban penjaminan tumbuh 197,6% menjadi sebesar Rp 40,8 miliar, yang mewakili 46,2% dari total beban usaha Perseroan di tahun 2013. Kenaikan pada beban penjaminan terutama mencerminkan timbulnya beban penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 13,4 miliar serta biaya konsultan sebesar Rp 8,1 miliar, pada tahun 2013, dimana Perseroan membukukan pengakuan biaya atas beban tangguhan, yaitu biaya-biaya *project advisory* yang telah dikeluarkan dan akan diakui saat tercapai Perjanjian Penjaminan ataupun *financial close* pada proyek-proyek yang ditangani.

Beban administrasi dan umum tumbuh 28,8% menjadi sebesar Rp 42,0 miliar, atau 47,6% dari total beban usaha tahun 2013. Komponen terbesar pada beban administrasi dan umum adalah beban pegawai sebesar Rp 25,0 miliar, yang mewakili 59,5% dari total beban umum dan administrasi, dan mencatat kenaikan 22,0% seiring dengan adanya penambahan jumlah pegawai pada tahun 2013. Komponen-komponen lain yang mencatat kenaikan signifikan adalah beban perjalanan dinas dan beban pelatihan pegawai. Beban perjalanan dinas meningkat 139,7% menjadi sebesar Rp 3,4 miliar, sementara beban pelatihan pegawai naik 177,9% menjadi sebesar Rp 2,0 miliar, pada tahun 2013.

Beban pengembangan sementara itu meningkat 22,6% menjadi sebesar Rp 3,2 miliar di tahun 2013. Kenaikan tersebut terutama mencerminkan dibukukannya biaya pembentukan IIGF Institute sebesar Rp 0,9 miliar, serta kenaikan pada biaya iklan dan promosi dari Rp 0,6 miliar di tahun 2012 menjadi sebesar Rp 1,1 miliar di tahun 2013.

Operating Expenses

The Company's operating expenses comprises underwriting expenses, general and administrative expenses, and development expenses. Operating expenses recorded an increase of Rp 37.6 billion or 74.2%, from Rp 50.7 billion in 2012 to Rp 88.3 billion in 2013. The increase resulted mainly from significant increase in the underwriting expenses of Rp 27.1 billion and an increase in general and administrative expenses of Rp 9.4 billion.

Underwriting expenses grew by 197.6% to Rp 40.8 billion, representing 46.2% of total operating expenses in 2013. The increase in underwriting expenses mainly reflects the impairment cost of Rp 13.4 billion and consultancy fee of Rp 8.1 billion in 2013, in which the Company recognized expenses on deferred charges, namely projects advisory costs which has been expensed and will be recognized upon the signing of guarantee of the project or its financial close.

General and administrative expenses grew by 28.8% to Rp 42.0 billion, or 47.6% of the Company's total operating expenses in 2013. The largest component in general and administrative expenses is personnel expenses of Rp 25.0 billion, representing 59.5% of total general and administrative expenses, and increased by 22.0% in line with additional employees recruited in 2013. The other major components are business travels expenses and employee training expenses. Business travels expenses increased by 139.7% to Rp 3.4 billion, while employee training expenses increased by 177.9% to Rp 2.0 billion, in 2013.

Development expenses meanwhile grew by 22.6% to Rp 3.2 billion in 2013. The increase reflecting the recorded cost of the establishment of IIGF Institute of Rp 0.9 billion, and the increase in the cost of advertisement and promotion from Rp 0.6 billion in 2012 to Rp 1.1 billion in 2013.

Laba Bersih

Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 249,7 miliar pada tahun 2013, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 36,4 miliar, atau 17,0%, dari laba bersih tahun sebelumnya. Perolehan laba bersih tersebut mencerminkan *Return on Equity* (ROE) sebesar 4,96%.

Net Income

The Company posted Rp 249.7 billion in net income in 2013, which represented an increase of Rp 36.4 billion, or 17.0%, from net income in the preceding year. The net income reflected a Return on Equity of 4.96%.

Posisi Keuangan Financial Position	(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)	
	2013	2012
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	1,218,009,773	2,746,643,432
Investasi Investment	3,861,052,807	2,142,262,853
Jumlah Aset Total Assets	5,196,468,107	4,966,837,336
Kewajiban Liabilities	48,477,933	49,720,071
Ekuitas Equity	5,147,990,174	4,917,117,265

Jumlah Aset

Pada akhir tahun 2013, jumlah aset Perseroan tercatat sebesar Rp 5.196,5 miliar, meningkat sebesar 4,6% dari posisi setahun sebelumnya sebesar Rp 4.966,8 miliar. Portofolio investasi merupakan komponen terbesar dengan 74,3% dari total aset Perseroan, disusul oleh kas dan setara kas dengan porsi 23,4%.

Total Assets

As at year-end 2013, the Company's total assets amounted to Rp 5,196.5 billion, an increase of 4.6% over its position a year earlier at Rp 4,966.8 billion. Portfolio investment is the largest component with 74.3% of the Company's total assets, followed by cash and cash equivalents with a share of 23.4%.

Posisi kas dan setara kas pada akhir tahun 2013 tercatat sebesar Rp 1.218,0 miliar, atau hanya 55,6% dari posisi setahun sebelumnya. Penurunan pada kas dan setara kas ini sejalan dengan upaya Perseroan untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang memadai dengan memprioritaskan penempatan dana pada instrumen investasi yang memberikan imbal hasil lebih tinggi. Untuk mempertahankan likuiditas yang memadai, sekitar 98% dari akun kas dan setara kas Perseroan berupa penempatan pada deposito berjangka.

Cash and cash equivalent at year-end 2013 amounted to Rp 1,218.0 billion, or 55.6% from its position a year earlier. The decline in cash and cash equivalents is in line with the Company's efforts to maintain an adequate level of income by prioritizing placement of funds in investment instruments that give higher yields. To maintain adequate liquidity, around 98% of the Company's cash and cash equivalent is placed in time deposit placements.

Portofolio investasi Perseroan tumbuh 80,2% menjadi sebesar Rp 3.861,0 miliar di akhir tahun 2013. Penempatan dana pada deposito berjangka dengan tenor lebih dari 3-bulan mencatat kenaikan 95,2% menjadi sebesar Rp 2.570,0 miliar, yang mewakili 66,6% dari total portofolio investasi Perseroan di akhir tahun 2013. Investasi pada instrumen berpendapatan tetap (obligasi dan sukuk) meningkat 65,0% menjadi sebesar

The Company's portfolio investment grew by 80.2% to Rp 3,861.0 billion at year end 2013. Funds at time deposit placements with maturities of more than 3-month grew 95.2% to Rp 2,570.0 billion, representing 66.6% of the Company's total portfolio investment at the end of 2013. Investments in fixed income instruments (bonds and *sukuk*) increased by 65.0% to Rp 1,189.5 billion, while investment in the mutual fund portfolio

Rp 1.189,5 miliar, sementara investasi pada portofolio reksadana relatif tidak berubah dan tercatat sebesar Rp 101,5 miliar.

Kewajiban

Jumlah kewajiban Perseroan tercatat turun 2,5%, dari Rp 49,7 miliar pada akhir tahun 2012 menjadi sebesar Rp 48,5 miliar di akhir tahun 2013. Penurunan pada jumlah kewajiban terutama mencerminkan penurunan pada akun biaya yang masih harus dibayar, yang dikompensasi oleh kenaikan pada komponen hutang usaha, hutang pajak dan liabilitas imbalan kerja.

Biaya yang masih harus dibayar turun dari Rp 21,4 miliar menjadi sebesar Rp 9,8 miliar, terutama berasal dari penurunan pada komponen beban *advisory* dari Rp 13,3 miliar menjadi sebesar Rp 1,4 miliar.

Komponen utama lainnya pada kewajiban Perseroan adalah akun pendapatan tangguhan sebesar Rp 22,3 miliar, yaitu bagian dari *arranging fee* proyek PLTU Jawa Tengah yang akan diakui sebagai pendapatan pada saat *financial close*.

Ekuitas

Total ekuitas tercatat sebesar Rp 5.148,0 miliar di akhir tahun 2013, meningkat sebesar 4,7% dari Rp 4.917,1 miliar setahun sebelumnya. Peningkatan ekuitas tersebut berasal dari kenaikan pada saldo laba ditahan dari laba bersih tahun 2013.

remained relatively unchanged and amounted to Rp 101.5 billion.

Liabilities

The Company's total liabilities recorded a decline of 2.5%, from Rp 49.7 billion at year end 2012 to Rp 48.5 billion at year-end 2013. The decrease in total liabilities mostly reflected a decrease in in accrued expenses, set off by an increase in account payables, tax payables, and employee benefit liabilities.

Accrued expenses decreased from Rp 21.4 billion to Rp 9.8 billion, primarily from a decrease in the component of advisory expenses from Rp 13.3 billion to Rp 1.4 billion.

The other major component of the Company's liability accounts is the unearned income account of Rp 22.3 billion, representing part of the arranging fees for the Central Java Power Plant project, which will be recognized as income at the time of financial close of the project.

Equity

Total equity amounted to Rp 5,148.0 billion as at year-end 2013, increased by 4,7% compared to Rp 4,917.1 billion a year earlier. The increase in equity reflected the increase the increase in retained earnings from 2013 net income.

Rasio-Rasio Keuangan Financial Ratios	(dalam persentase) (in percentage)	
	2013	2012
Marjin Laba Operasi Operating Profit Margin	77.6%	83.8%
Marjin Laba Bersih Net Profit Margin	63.6%	68.3%
Return on Equity Return on Equity	4.96%	5.47%

PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Kemampuan Membayar Hutang

Sampai dengan akhir tahun 2013, Perseroan tidak memiliki hutang jangka panjang yang digunakan untuk membiayai asetnya. Lihat pembahasan mengenai struktur modal Perseroan di bawah ini.

OTHER DISCLOSURES

Debt Servicing Ability

Up until year-end 2013, the Company has not incurred any long-term debts to finance its assets. See the following discussion under Capital Structure.

Struktur Modal

Aset Perseroan saat ini sepenuhnya didanai dari ekuitas Perseroan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah. Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Aryanti Artisari, SH, MKn No. 145 tanggal 30 Agustus 2012, Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp 9 triliun (nilai penuh). Pemerintah kemudian melakukan penambahan PMN sebesar Rp 1.000 miliar pada Desember 2012. Pada 31 Desember 2013, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan tercatat sebesar Rp 4.500 miliar.

Ikatan yang Material Untuk Investasi Barang Modal

Pada tahun 2013, Perusahaan tidak mempunyai ikatan material terkait investasi barang modal.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa

Tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa atau jarang terjadi pada tahun 2013.

Peningkatan/Penurunan Material pada Penjualan/Pendapatan

Tidak ada pengungkapan tentang peningkatan atau penurunan yang material atas pendapatan usaha bersih Perseroan yang terjadi pada tahun 2013.

Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun 2013.

Kebijakan Dividen

Kebijakan pembagian dividen ditentukan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sampai dengan tahun 2013, belum ada kebijakan tertentu mengenai pembagian dividen.

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan apabila terdapat saldo laba positif, sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Pada tanggal 31 Desember 2013,

Capital Structure

The Company's assets are currently entirely funded from its equity capital, in the form of State Equity Participation (PMN) by the Government. Based on the shareholders' resolutions as documented in notarial deed No. 145 dated August 30, 2012, from notary Aryanti Artisari, SH, Mkn., the Government as shareholder approved the increase in the Company's authorized share capital to Rp 9 trillion (full amount). The Government made additional PMN of Rp 1,000 billion in December 2012. At December 31, 2013, issued and fully paid capital amounted to Rp 4,500 billion.

Material Commitments in Capital Expenditures

In 2013, the Company has no material commitments regarding capital expenditures.

Financial Information with Extraordinary Events

There were no financial information with extraordinary or rare events occurring in 2013.

Material Increase/Decline in Sales/Income

There is no disclosure of the material increase/decline in the Company's net income in 2013.

Subsequent Events

There are no events of material importance subsequent to the balance sheet date that need to be disclosed in the 2013 Financial Statements.

Dividend Policy

Dividend policy is determined by the shareholders in the General Meeting of Shareholders. Up to 2013, the Company does not have definite policies regarding the distribution of dividends.

Based on Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007, the Company shall appropriate a certain amount of its profit in each year for general reserve if there are available retained earnings, until the general reserve has reached at least 20% of the issued and paid-up capital. As of 31 December

Perseroan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 10,6 miliar, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 20,8 miliar.

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2013, tidak terdapat transaksi material oleh Perseroan yang mengandung benturan kepentingan.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Pada tahun 2013 tidak terdapat perubahan terhadap peraturan, regulasi atau undang-undang lain yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

Transaksi dengan Pihak yang Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham Perusahaan maupun dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan entitas sepengendali sebagai pihak yang berelasi. Transaksi dengan pihak berelasi terutama berbentuk penempatan dana oleh Perseroan dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati.

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak yang berelasi adalah masing-masing sebesar Rp 1.924,4 miliar dan Rp 2.408,8 miliar pada tahun 2013 dan 2012, yang mewakili berturut-turut 37,03% dan 48,50% dari jumlah aset Perseroan pada akhir tahun yang bersangkutan.

Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari penempatan dana pada pihak yang berelasi adalah sebesar Rp 153,7 miliar dan Rp 191,2 miliar masing-masing pada tahun 2013 dan 2012, yang mewakili berturut-turut 39,12% dan 61,26% dari total pendapatan Perseroan pada tahun-tahun tersebut.

Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau Restrukturisasi Hutang

Pada tahun 2013, tidak terdapat transaksi investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi ataupun restrukturisasi hutang yang material yang dilakukan oleh Perseroan.

2013, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 10.6 billion, as the reserve balance became Rp 20.8 billion.

Material Transactions with Conflict of Interest

Throughout 2013, the Company did not engage in any material transaction with conflict of interest.

Changes in Laws and Regulations

In 2013, there were no changes in any rulings, regulations or laws that have a significant impact on the Company.

Transactions with Related Parties

In the course of doing business, the Company engages in transactions with the Government of Indonesia as the Company's shareholders, and also with State-Owned Enterprises as entities under a common control and as such are considered related parties. The Company engages in fund placements in deposit accounts and bonds of related parties, whereas such transactions are done under the agreed terms and conditions.

Balances arising from related party transactions were Rp 1,924.4 billion and Rp 2,408.8 billion in 2013 and 2012 respectively, representing 37.03% and 48.50% of the Company's total asset of the related years.

While the income earned from the fund placement on related parties amounted to Rp 153.7 billion and Rp 191.2 billion, in 2013 and 2012, respectively, which represent 39.12% and 61.26% of total revenues for these years, respectively.

Investments, Expansion, Divestment, Acquisition or Debt Restructuring

In 2013, there were no material investments, expansion, divestment, acquisition or debt restructuring made by the Company.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Implementation



Penerapan Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Implementation



67

Sejak berdirinya empat tahun lalu, Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola aktivitas bisnis dan operasional mengacu pada standar praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Pelaksanaan praktik GCG tersebut diyakini menjadi elemen penting dalam membangun reputasi dan kredibilitas Perseroan sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Berikut ini adalah gambaran pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan oleh organ-organ utama dan pendukung Perseroan pada tahun 2013.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola Perseroan, yang memegang seluruh kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan dalam batas-batas yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Since its inception four years ago, the Company has maintained its commitment to manage its business and operational activities according to best practice standards of Good Corporate Governance (GCG). The practice of GCG is a crucial element in building its reputation and credibility, as the Infrastructure Guarantee Enterprise. Following are descriptions of the implementation of Corporate Governance by the company's primary and support organs in 2013.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Company's governance structure, which holds all the powers that are not delegated to the Board of Commissioners or the Board of Directors, as defined in the Limited Liability Company Law and/or the Company's Articles of Association.

Kewenangan tersebut termasuk antara lain wewenang untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta untuk menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

These include, among others, the authority to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors, and to approve the Company's annual report including to ratify the Financial Statements and the Board of Commissioners Supervisory Report.

Pada tahun 2013, Perseroan menyelenggarakan 4 (empat) kali RUPS, sebagai berikut:

In 2013, the Company held 4 (four) GMS, as follow:

1. RUPS Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode tahun 2013-2017 pada tanggal 30 Januari 2013 dengan agenda (i) Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Indonesia Tahun 2013-2017.
2. RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013 pada tanggal 30 Januari 2013, dengan agenda: (i) Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013; (ii) Persetujuan Kontrak Manajemen tahun 2013; (iii) Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2013.
3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 17 Juni 2013, dengan agenda: (i) Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2012; pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2012 pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2012, pemberian *acquitt et de charge* kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2012 dan persetujuan pencapaian kinerja manajemen sesuai Kontrak Manajemen tahun buku 2011; (ii) Menyetujui penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2013; (iii) Menyetujui penggunaan atas laba Perseroan serta pembayaran tantiem.
4. RUPS Luar Biasa melalui keputusan sirkuler RUPS pada tanggal 4 Desember 2013, dengan agenda: Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2013.
1. The GMS for Corporate Long Term Plan (RJPP) 2013-2017 held on January 30, 2013, with the agenda of (i) Discussion on Corporate Long Term Plan 2013-2017.
2. The GMS for the 2013 Work and Budget Plan held on January 30, 2013, with the agenda of: (i) Approval of the 2013 Work and Budget Plan; (ii) Approval of the 2013 Management Contract; (iii) Approval of the 2013 Work and Budget Plan for the Partnership and Community Development Program.
3. Annual General Meeting of Shareholders on June 17, 2013, with the agenda of (i) Ratification of the Annual Report for fiscal 2012; ratification of the Financial Statements for fiscal 2012; ratification of the Financial Statements of Partnership and Community Development Program for fiscal 2012; full release and discharge for all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management actions during fiscal 2012, and approval of the achievement of management performance in accordance with Management Contract for fiscal 2011; (ii) Approval of the remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for fiscal 2013, (iii) Approval of the allocation of the Company's net income and the payment of tantieme;
4. Extra Ordinary GMS through Circular Decision of GMS on December 4, 2013, with the agenda of Revised 2013 Work and Budget Plan.

DEWAN KOMISARIS

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas pengawasan secara umum dan/atau khusus sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, memberikan nasehat dan mengawasi pelaksanaan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, serta memberikan masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi, dan tidak terlibat dalam kegiatan operasional sehari-hari Perseroan.

Komposisi Dewan Komisaris

Pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 16 Agustus 2013, komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position
Freddy R. Saragih	Komisaris Utama President Commissioner
Ayu Sukorini	Komisaris Commissioner

Sesuai dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tahun 2013, komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah mengalami perubahan, sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position
Luky Alfirman	Komisaris Utama President Commissioner
Ayu Sukorini	Komisaris Commissioner

Keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan telah memadai untuk pelaksanaan tugas-tugasnya dipandang dari keberagaman sudut pandang, keahlian dan latar belakang yang dimiliki.

Profil singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris disajikan di bab Data Perusahaan, halaman 146-147 dalam Laporan Tahunan ini.

BOARD OF COMMISSIONERS

Duties and Responsibilities

The Board of Commissioners is responsible for general and/or specific supervisory duties as defined in the Company's Articles of Association, to provide advice and supervise the implementation of recommendations by the Board of Commissioners to the Board of Directors, and to provide input to the General Meeting of Shareholders. The Board of Commissioners acts in an oversight function to the Board of Directors and are not involved in the day-to-day operations of the Company.

Composition of the Board of Commissioners

From January 1, 2013 until August 16, 2013, the composition of the Board of Commissioners as follows:

Pursuant to the Circular Decision of Shareholders 2013, the composition of the Company's Board of Commissioners was changed to:

The membership of the Company's Board of Commissioners is fully adequate or the discharge of its duties in terms of the diversity of their point of views, skills and professional backgrounds.

Brief profiles of members of the Board of Commissioners are presented in the Corporate Data section, page 146-147 of this Annual Report.

Program Kerja 2013

Program kerja Dewan Komisaris untuk tahun 2013 ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2013, sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti keputusan RUPS bagi Perseroan.
2. Melakukan pengawasan atas penggunaan PMN sesuai peruntukan
3. Melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen Perseroan agar sesuai dengan tata kelola dan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan kapasitas kewenangan
4. Melakukan penelaahan atas penyusunan dan implementasi strategi Perseroan
5. Melakukan penelaahan dan identifikasi risiko Perseroan bersama manajemen
6. Melakukan penelaahan secara berkala kebijakan remunerasi untuk manajemen
7. Melakukan rapat koordinasi dengan manajemen dan Komite Audit minimal 4 (empat) kali dalam 1 tahun, atau jika dianggap perlu.

2013 Work Plan

The work plan of the Board of Commissioners for 2013 is set forth in the 2013 Work and Budget Plan (RKAP) of the Company, as follows:

1. Follow up GMS resolutions for the Company's interest.
2. Monitor the appropriate use of the PMN as designated.
3. Supervise the management activities of the Company to ensure its compliance with prevailing rules and regulation, and is in accordance with its capacity.
4. Review the Company's strategy formulation and implementation.
5. Review and identify the Company's risk together with the Management.
6. Periodically review the remuneration policy for the Management.
7. Conduct coordination meetings with the management and the Audit Committee no less than 4 (four) times in 1 year, or whenever deemed necessary.

Rapat Dewan Komisaris

Dalam rangka pelaksanaan program kerjanya tersebut, Dewan Komisaris mengadakan 15 kali rapat selama tahun 2013, dengan tingkat kehadiran dalam rapat sebagai berikut:

Meetings of the Board of Commissioners

Throughout 2013, the Board of Commissioners held 15 (fifteen) meetings, with attendance in each meeting, as follows:

Rapat Dewan Komisaris Meeting of BOC		
Nama Name	Jabatan Position	Rapat yang Dihadiri Attendance of Meetings
Freddy R. Saragih	Komisaris Utama * President Commissioner*	8 dari 15 8 of 15
Luky Alfirman	Komisaris Utama ** President Commissioner**	6 dari 15 6 of 15
Ayu Sukorini	Komisaris Commissioner	15 dari 15 15 of 15

* Menjabat sampai dengan 16 Agustus 2013 | Serves until August 16, 2013

** Menjabat sejak 19 Agustus 2013 | Serves since August 19, 2013

Rapat-rapat Dewan Komisaris juga dihadiri oleh anggota Direksi dan pejabat senior atau staf Perseroan lainnya sesuai kebutuhan dan agenda yang dibahas dalam masing-masing rapat.

These meetings were also attended by members of the Board of Directors and other senior staff or employee of the Company as needed according to the agenda of the respective meetings.

Pengembangan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan untuk peningkatan kapasitas dalam pengawasan Perseroan sebagai berikut:

Competence Improvement Program for the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners attended the following trainings to build their capacity in performing oversight duties:

Pengembangan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris Competence Enhancement for Commissioners		
Nama Name	Tanggal Date	Acara Event
Freddy R. Saragih	25-27 Januari 2013	Executive Workshop " Legal and Perspective Bonds"
Luky Alfirman	-	-
Ayu Sukorini	25-27 Januari 2013	Executive Workshop " Legal and Perspective Bonds"
	28-30 Oktober 2013	Executive Training Asia Corporate Governance

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Board Manual sedang dipersiapkan dan direncanakan akan dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebagai bagian dari penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) sesuai praktik yang berlaku.

Board of Commissioners Manual

As guideline for both Board of Commissioners and Directors, the Board Manual is being prepared and is expected to be completed in 2014 as part of the preparation of the corporate governance guidelines (*Code of Corporate Governance*) according to applicable practice.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris bertugas membantu kelancaran pelaksanaan aktivitas kerja anggota Dewan Komisaris sehari-hari, termasuk antara lain mengatur jadwal pertemuan, menangani korespondensi dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan, serta kegiatan kesekretariatan lainnya.

Secretary to the Board of Commissioners

The Secretary to the Board of Commissioners has the duty of assisting the smooth implementation of the daily work activities of members of the Board of Commissioners, including among others its appointment and meeting schedules, external as well as internal correspondences, and performing other secretarial activities.

Pada periode tahun 2013, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Nuning Sri Rejeki Wulandari, yang telah bertugas sejak tanggal 1 Juni 2011.

Throughout 2013, the position of Secretary to the Board is served by Nuning Sri Rejeki Wulandari, who has served in that position since 1 June 2011.

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Direksi adalah organ pengambil-keputusan utama dalam Perseroan. Anggota Direksi bekerja sama dengan jajaran manajemen utama dalam operasional sehari-hari untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan Perseroan. Anggota

The Board of Directors is the primary decision making body of the Company. Members of the Board of Directors work with key management personnels in day-to-day operational activities to achieve the Company's objectives. Members of the

Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dan wajib bertindak untuk kepentingan Perseroan.

Board of Directors, individually or collectively, are responsible for the management of the Company and are required to act in the best interest of the Company.

Komposisi Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2013, keanggotaan Direksi Perseroan adalah:

Composition of the Board of Directors

Up to year-end 2013, memberships of the Board of Directors of the Company consist of:

Nama Name	Jabatan Position
Sinthya Roesly	Direktur Utama President Director
Armand Hermawan	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Director of Finance & Risk Management
Yadi J. Ruchandi	Direktur Operasi Director of Operations

Profil singkat masing-masing anggota Direksi disajikan di bab Data Perusahaan, halaman 148-150 dalam Laporan Tahunan ini.

Brief profiles of members of the Board of Directors are presented in the Corporate Data section, page 148-150 of this Annual Report.

Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas Direksi dimaksudkan untuk memungkinkan Direksi secara kolektif berfungsi efektif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Division of Duties among Directors

Division of duties among the Directors enables the effective functioning of the Board of Directors as a collective body in the implementation of its assigned duties and responsibilities.

Direktur Utama

Bertanggung jawab untuk memimpin Direksi, mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi-fungsi Direksi, dan memberikan arahan kepada anggota Direksi lain mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam rapat-rapat Direksi.

President Director

Responsible for leadership of the Board of Directors, to coordinate the implementation of different functions of the Directors, and to provide direction to other Directors regarding issues that are discussed in Board of Directors' meetings.

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko

Bertanggung jawab atas pengelolaan dana, *pricing* dan pemrosesan klaim, treasury dan akuntansi, pengelolaan sumber daya manusia, serta aspek administrasi dan umum sebagai fungsi pendukung bagi aktivitas operasional sehari-hari Perseroan.

Director of Finance and Risk Management

Responsible for fund management, pricing and claim processing, treasury and accountancy, human resources management, as well as general and administrative aspect as a support function in the Company's day-to-day operational activities.

Direktur Operasi

Bertanggung jawab atas aktivitas bisnis Perseroan, termasuk aktivitas pengembangan usaha, konsultasi dan bimbingan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan pihak swasta serta melakukan *appraisal* proyek.

Director of Operations

Responsible for the Company's business activities, including business development, providing consultation and guidance to Contracting Agency (CA) and the market, and for project appraisal.

Rapat Direksi

Pada tahun 2013, Direksi mengadakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi sebagai berikut:

Meetings of the Board of Directors

Throughout 2013, the Board of Directors held 14 (fourteen) meetings, with attendance of the respective Directors in each meeting as follow:

Rapat Direksi Meeting of BOD		
Nama Name	Total Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Sinthya Roesly	14	100%
Armand Hermawan	14	100%
Yadi J. Ruchandi	14	100%

Pengembangan Kompetensi Anggota Direksi

Anggota Direksi mengikuti berbagai pelatihan, seminar maupun konferensi di tingkat nasional maupun internasional, dengan berbagai topik yang relevan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya.

Competence Improvement Program for the Board of Directors

Members of the Board of Directors attended various trainings, seminars and conferences at national and international levels, with various topics relevant to the performance of their duties.

Berikut adalah program-program *capacity building* yang diikuti anggota Direksi pada tahun 2013:

Following are the capacity building programs attended by the members of the Board of Directors in 2013:

Acara Event	Tanggal Date
Executive Workshop " Legal and Perspective Bonds"	25-27 Januari 2013 January 25-27, 2013
Regional Roundtable on Public Sector Management and Public-Private Partnerships for Development Results	22-24 April 2013 April 22-24, 2013
Becoming Strategic Partner Wharton University US	27 April-6 Mei 2013 April 27-May 6, 2013
TEMASEK FOUNDATION ASIA LEADERS CONNECT 2013	20-21 September 2013 September 20-21, 2013
Executive Training Asia Corporate Governance	28-30 Oktober 2013 28-30 October, 2013
PPP for Asean Cities	19-22 Oktober 2013 October 19-22, 2013
APEC CEO Forum	5 Oktober 2013 October 5, 2013
World Infrastructure Summit 2013	11-14 November 2013 November 11-14, 2013
Warning Signals & Lesson Learned in Corporate Credit	9-11 Desember 2013 December 9-11, 2013

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris menerima remunerasi berupa honorarium, tunjangan/fasilitas, serta bonus/tantiem atas pencapaian kinerja Perseroan, sedangkan anggota Direksi menerima remunerasi berupa gaji bulanan, tunjangan/fasilitas berupa tunjangan perumahan, tunjangan cuti dan tunjangan hari raya, serta bonus/tantiem atas pencapaian kinerja Perseroan.

Besarnya remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang akan dibayarkan pada tahun berjalan ditetapkan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun tersebut.

Informasi Mengenai Pemegang Saham

Perseroan adalah suatu Badan Usaha Milik negara (BUMN), yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan.

Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Tidak terdapat hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal, antara tiap anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, ataupun antara tiap anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Tidak terdapat hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal, antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Members of the Board of Commissioners receive remuneration in the form of honorarium and other benefits/facilities as well as tantieme on the Company's performance, while members of the Board of Directors receive monthly salaries, benefits/facilities comprising housing allowance, leave allowance and Annual Holiday Allowance as well as bonus/tantieme for Company performance.

The amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to be paid in the current year is determined by the shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders for the year under review.

Shareholders Information

The Company is a state-owned enterprises (SOEs), wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia, through the Ministry of Finance.

Affiliation Relations Between The members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority/Controlling Shareholders

There is no family relationships by marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically among the Board of Directors, or between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, or among the Board of Commissioners.

There is no family relationship by marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically, between the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners with the Majority /Controlling Shareholders.
Audit Committee

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ dari Dewan Komisaris yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Susunan keanggotaan Komite Audit untuk periode tahun 2013 adalah:

Nama Name	Jabatan Position
Ayu Sukorini	Ketua Chairperson
Iqbal Islami	Anggota Member
Budi T. Wibawa (effektif sejak bulan Juli 2013 effective in July 2013)	Anggota Member

Tugas Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Melakukan penelaahan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
3. Melakukan penelaahan atas Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen periodik.
4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
5. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is an organ of the Board of Commissioners, established by the Board of Commissioners in accordance with the Law No. 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises. The Audit Committee assists the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties. The Audit Committee shall be independent in carrying its duties, as well as in reporting, and is directly accountable to the Board of Commissioners.

The composition of the Audit Committee for 2013 were :

The duties of the Audit Committee are as follow:

1. Ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the duties of external auditors and internal auditors.
2. Review the Company's Corporate Long-Term Plan and Work and Budget Plan.
3. Review the Financial Statements and Management Report on periodic basis.
4. Provide recommendations on improvement of management control system and its implementation.
5. Perform other tasks given by the Board of Commissioners in order to implement the duties of the Board of Commissioners.

Komite Audit telah mempunyai Pedoman Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai acuan umum bagi Komite Audit dalam pelaksanaan tugasnya.

The Audit Committee has an Audit Committee Charter set by the Board of Commissioners which serves as a general guideline for the Audit Committee in conducting its duties.

Selama tahun 2013, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahun 2013. Beberapa hal yang telah dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut:

During 2013, the Audit Committee has carried out its duties in accordance with the 2013 work program, among others as follows:

1. Melakukan *review* dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen secara periodik (bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan) tahun 2013 dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.
2. Melakukan rapat internal Komite Audit bulanan untuk membahas laporan yang akan disampaikan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, antara lain tentang hasil evaluasi Komite Audit atas kinerja bulanan, triwulan, atau tahunan Perusahaan, dan permasalahan lain yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris.
3. Melakukan rapat tiga bulanan dengan Manajemen untuk membahas Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen triwulanan, semester, dan tahunan untuk tahun 2013.
4. Melakukan rapat tiga bulanan dengan Internal Auditor untuk membahas program kerja audit Internal Audit tahun 2013, pelaksanaan kegiatan auditnya, dan hasil auditnya. Komite Audit telah memberikan sejumlah saran perbaikan kepada Internal Auditor untuk peningkatan efektivitas fungsi internal audit.
5. Bersama-sama dengan Tim Pengadaan yang dibentuk oleh Direksi, berperan aktif dalam proses seleksi kantor akuntan publik (KAP) yang akan diusulkan kepada RUPS untuk ditunjuk melakukan audit keuangan atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2013. Proses seleksi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku.
1. Review and evaluate the Financial Statements and the Periodic Management Report (monthly, quarterly, semester, and year) in 2013, and submit the results to the Board of Commissioners.
2. Conduct internal monthly meetings to discuss report to be submitted by the Audit Committee to the Board of Commissioners in the Board of Commissioners meeting, among others, about the results from the evaluation on the Company's monthly, quarterly, and annual performance, and other matters that need to be addressed by the Board of Commissioners.
3. Organize quarterly meetings with the Management to discuss the Financial Statements and the quarterly, semester and annual Management Report for 2013.
4. Conduct quarterly meetings with Internal Audit to discuss the internal audit work program in 2013, the implementation of the audit assignments, and the audit findings. The Audit Committee has provided suggestions for improvements to Internal Audit in order to improve the effectiveness of internal audit function.
5. Together with the Procurement Team established by the Board of Directors, play active role in selecting public accountant firm (KAP) to be proposed to the General Meeting of Shareholders to perform the audit on the Company's Financial Statements of 2013. The selection process was carried out in accordance with company rules and regulations.

6. Memastikan efektivitas pelaksanaan audit keuangan yang dilakukan oleh KAP dengan melakukan rapat dan komunikasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC) yang telah ditunjuk untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahun 2013 mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan audit keuangan tahun 2013 telah direncanakan serta dilaksanakan dengan baik, dan KAP juga telah menunjukkan independensinya dalam pelaksanaan tugasnya.
7. Melakukan *review* dan evaluasi terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2013 dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris sebagai bahan bagi Dewan Komisaris untuk membahas usulan RKAP bersama-sama dengan Direksi sebelum diajukan kepada RUPS.
8. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris antara lain melakukan *review* atas pelaksanaan tugas dari fungsi pengelolaan dana dan fungsi pengadaan, serta *review* atas kerjasama antara PT PII dengan Pemprov Kalimantan Tengah dalam Proyek Rel Kereta Api Kalimantan Tengah.

AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal bertanggung jawab membantu Direktur Utama mewujudkan sistem pengendalian internal yang dapat menjamin pelaksanaan tugas Perseroan sesuai mandat yang diterima dan peraturan yang berlaku, dengan mengacu kepada prinsip efisiensi dan efektivitas serta prinsip-prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran. Sebagai dasar dari pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut, unit Audit Internal telah dilengkapi dengan Piagam Audit Internal dan Prosedur Audit Internal.

6. Ensure the effective implementation of financial audit conducted by the KAP by organizing meetings and communications with KAP Tanudiredja, Wibisana & Partners (PwC) who has been appointed to audit the Company's financial statements in 2013 from the planning phase to the reporting phase. Results from the evaluation shows that the financial audit activities in 2013 were well planned and executed, and the KAP also has demonstrated its independence in the performance of their duties.
7. Review and evaluate the proposal of Work and Budget Plan (RKAP) in 2013 and submit the results to the Board of Commissioners, to be used by the Board of Commissioners in discussion with the Board of Directors prior to submission to the GMS.
8. Perform other tasks given by the Board of Commissioners, among others, to review the implementation of the duties of the fund management function and procurement functions, as well as to review of the cooperation between IIGF and the Provincial Government of Central Kalimantan in the Central Kalimantan Railway Project.

INTERNAL AUDIT

The Internal Audit unit assists President Director in establishing internal control systems within the Company to ensure the fulfilment of corporate missions according to the mandate and prevailing regulations, with due regards to efficiency and effectiveness as well as the principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The Internal Audit unit has been equipped with an Internal Audit Manual and Internal Audit Procedures as the basis for the implementation of its duties and function.

Unit Audit Internal bersifat independen terhadap unit kerja dan unit fungsional lainnya di Perseroan, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, unit Audit Internal mendapatkan masukan dan petunjuk dari Komite Audit.

Program kerja unit Audit Internal ditetapkan setiap awal tahun dalam Rencana Pekerjaan Audit Tahunan yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Audit dan Direktur Utama.

Pada tahun 2013, unit Audit Internal telah melaksanakan penugasan audit sebagai berikut:

- Audit atas Proses Bisnis
- Audit atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Audit atas Pengelolaan Kas
- Audit atas Bagian Umum

Pemimpin unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Selama periode tahun 2013, pemimpin unit Audit Internal adalah I Gede Susila Aryana, CISA, yang diangkat berdasarkan SK Karyawan Tetap SK-012/DIR/HR/KT/08/2011 tertanggal 5 November 2011.

PENGENDALIAN INTERNAL

Perseroan telah membangun proses, struktur dan sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian yang memadai bahwa (i) operasional Perseroan telah dilakukan dengan efektif dan efisien; (ii) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi; dan (iii) sistem pelaporan keuangan dapat diandalkan.

Sistem pengendalian internal Perseroan dibangun dengan mengadopsi kerangka pengendalian internal yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway*

Internal Audit is independent of other work and functional units within the Company, and reports directly to the President Director. In discharging its duties and functions, Internal Audit get input and guidance from the Audit Committee.

The Internal Audit unit implements the audit work as set out at the beginning of each year in the Annual Audit Work Plan developed together with input from Audit Committee and the President Director.

In 2013, the Internal Audit unit engaged in audit work on a number of functions or activities within the Company, comprising:

- Audit on Business Process
- Audit on Human Resources Management
- Audit on Cash Management
- Audit on General Affairs

The Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director.

Up to 2013, Internal Audit is chaired by I Gede Susila Aryana, CISA, who was appointed based on Decision Letter SK-012/DIR/HR/KT/08/2011, dated 5 November 2011.

INTERNAL CONTROL

The Company has established the process, structure and internal control system that provide certainty that (i) the Company's operation has conducted effectively and efficiently; (ii) complied with the prevailing rules and regulation; and (iii) has a reliable system of financial reporting.

The Company's internal control systems were established by adopting the framework of internal control developed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission (COSO) dengan elemen-elemen utamanya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan.

Direksi bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan pengendalian internal di lingkungan Perseroan, dan bersama dengan unit Internal Audit memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Dari hasil pemantauan dan pengawasan tersebut, secara keseluruhan sistem pengendalian internal Perseroan telah berjalan dengan baik dan efektif.

AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013 telah diaudit oleh akuntan publik Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA, dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan.

KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan telah melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan Perseroan untuk 4 periode tahun buku (sejak 2010 sampai 2013), sementara akuntan publik Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA telah melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan Perseroan untuk 1 periode tahun buku (2013).

Selain jasa audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2013, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan maupun akuntan publik Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA, juga melakukan audit atas laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk periode tahun 2013.

Commission (COSO) with the main elements in control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities.

The Board of Directors is responsible for the establishment of internal control policies within the Company, and together with Internal Audit unit monitor and oversee the implementation of those policies. Based on the results of such monitoring and supervision activities, the Company's internal control system in overall has performed well and effectively.

INDEPENDENT AUDITOR

The Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2013, have been audited by public accountant Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA from the Public Accountant Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Partners.

The Public Accountant Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana & Partners has also performed the audit on the Company's Financial Statements for 4 (four) fiscal years (from 2010 to 2013), while Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA has performed the audit on the Company's Financial Statements for 1 (one) fiscal year (2013).

In addition to perform the audit on the Company's Financial Statements for fiscal year 2013, KAP Tanudiredja, Wibisana & Partners and the public accountant Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA, also performed the audit on Company's Partnership Program and Community Development for 2013.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertugas membantu Direksi memantau penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) di Perseroan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan program komunikasi perusahaan kepada pemangku kepentingan eksternal maupun internal, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan kegiatan kesekretariatan perusahaan.

Pada periode tahun 2013, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Pratomo Ismujatmika, yang diangkat berdasarkan SK Direksi no: 011/DRU/COS/HR/0613.

Aktivitas Sekretaris Perusahaan di 2013

Selama tahun 2013, Divisi Sekretaris Perusahaan melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Melakukan pelaksanaan persiapan dan tata laksana Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Melakukan penatalaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris berikut mempersiapkan notulensi rapat Direksi.
3. Melakukan keterbukaan informasi kepada pemegang saham dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui pelaporan dan komunikasi.
4. Melakukan pengelolaan atas aktivitas dan program komunikasi dan penyelenggaraan *event-event* Perseroan.
5. Koordinasi pelaporan dan keterbukaan informasi korporasi melalui Laporan Tahunan dan publikasi lainnya.
6. Mendukung pelaksanaan program peningkatan kapasitas pemangku kepentingan melalui *workshop*, pelatihan, dan *event* lainnya.
7. Melakukan pengelolaan program IIGF Institute sebagai bagian dari pelaksanaan program CSR Perseroan.

PERKARA HUKUM

Pada periode tahun 2013, tidak terdapat perkara hukum yang melibatkan Perseroan, ataupun anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun tersebut.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is responsible for assisting the Board of Directors in monitoring the implementation of Good Corporate Governance at the Company, in addition to the implementation of corporate communications programs to internal and external stakeholders, Corporate Social Responsibility programs, and corporate secretariat activities.

In 2013, the position of Corporate Secretary is served by Pratomo Ismujatmika, who was appointed based on Board of Directors Decision Letter: no: 011/DRU/COS/HR/0613.

Corporate Secretary Activities in 2013

During 2013, the activities of the Corporate Secretary are as follows:

1. Organize the preparation and execution of the General Meeting of Shareholders.
2. Organize the meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and prepare minutes of meetings.
3. Provide disclosure of information to shareholders in this case the Ministry of Finance through reporting and communication.
4. Manage the activities and communication programs and organize corporate events.
5. Coordinate reporting and corporate information disclosure through the Annual Report and other publications.
6. Support the implementation of the capacity building for stakeholders through workshops, trainings, and other events.
7. Manage the IIGF Institute program as part of the implementation of the Company's CSR programs.

LEGAL PROCEEDINGS

Throughout 2013, there was no legal proceeding involving either the Company or members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

AKSES TERHADAP INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Dalam rangka keterbukaan informasi, Perseroan menyediakan akses publik kepada informasi mengenai Perseroan di situs *web* Perseroan, www.iigf.co.id. Melalui situs *web* Perseroan, pemangku kepentingan dan masyarakat umum juga dapat mengakses berbagai publikasi mengenai Perseroan, termasuk Profil Perusahaan, Laporan Tahunan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

Dari waktu ke waktu, Perseroan juga mengeluarkan siaran pers terkait dengan perkembangan penting yang terjadi di Perseroan.

ACCESS TO INFORMATION ON THE COMPANY

In the interest of information disclosure, the Company provides a public access to information on the Company in its corporate web site, www.iigf.co.id. In this web site, stakeholders and the interested public can also access a variety of Company publications including Company Profile and Annual Reports, as well as other official company documents.

From time to time, the Company also issues press releases concerning current significant developments within the Company.

Tanggal Date	Acara Event
29 Agustus 2013 August 29, 2013	Peringkat PT PII sejajar dengan peringkat Pemerintah Republik Indonesia: Internasional Fitch Ratings IIGF Rating is equal with the sovereign rating of the Government of Republic Indonesia: International Fitch Ratings
18 Oktober 2013 October 18, 2013	Penandatanganan MOU antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan Universitas Lampung Signing of MOU between IIGF and University of Lampung
13 November 2013 November 13, 2013	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Siap Melakukan Penjaminan Untuk Meningkatkan Investasi Pembangunan Infrastruktur IIGF Ready to Provide Guarantee to Increase Investment for Infrastructure Development
26 November 2013 November 26, 2013	Dukungan Pemerintah Diperlukan dalam Keberlangsungan Proyek Infrastruktur di Indonesia IPFA Asia 2013: Jakarta Government Support Needed for the Sustainability of Infrastructure Project in Indonesia IPFA Asia 2013: Jakarta
30 November 2013 November 30, 2013	Bantuan Beasiswa PT PII untuk Siswa kurang Mampu di Batang IIGF Scholarship for Low Income Student in Batang
5 Desember 2013 December 5, 2013	Kerjasama PT PII dan Universitas Brawijaya untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Cooperation between IIGF and University of Brawijaya in Improving the Quality of Education
6 Desember 2013 December 6, 2013	PT PII Bantu Program Konservasi Sumber Air Bandar Lampung IIGF Assist Water Conservation Program at Bandar Lampung

PEDOMAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Dokumen Pedoman Kode Etik berisi sekumpulan standar etika perilaku dalam menjalankan bisnis di Perseroan, yang diharapkan dapat mempengaruhi dan membentuk interaksi internal maupun eksternal yang konsisten berdasarkan prinsip-prinsip berkesadaran etis, berpikir etis dan berperilaku etis.

COMPANY CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct document compiles a set of standard ethical behavior in doing business at the Company, expected to guide and shape all internal as well as external interactions in a consistent manner, based on the principles of ethical sensibility, ethical reasoning and ethical conduct.

Pedoman Kode Etik menjadi acuan berperilaku di seluruh tingkatan organisasi Perseroan (Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan) dalam hal berinteraksi, bersikap dan bertindak sesuai etika dan ketentuan yang ada, antara lain dalam hal:

- penyalahgunaan jabatan
- etika dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan
- kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja
- kesempatan kerja yang adil
- standar etika hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan
- integritas Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan
- hak atas kekayaan intelektual
- kebijakan pengungkapan informasi
- pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi
- informasi orang dalam
- keterlibatan dalam aktivitas politik
- perlindungan dan penggunaan aset secara efisien
- citra Perseroan
- larangan kepemilikan dan penggunaan alkohol dan/atau narkoba, psikotropika dan zat aditif

Pedoman Kode Etik telah disosialisasikan ke seluruh jajaran Perseroan, dan Direksi serta seluruh karyawan Perseroan telah menandatangani pernyataan Komitmen Kepatuhan untuk menerapkan Pedoman Kode Etik. Sebagai bagian dari pelaksanaan Pedoman Kode Etik, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga menandatangani dokumen Pernyataan Benturan Kepentingan yang diperbaharui setiap tahun. Untuk memperkuat pemahaman dan penerapan Pedoman Kode Etik, Perseroan dari waktu ke waktu juga menyelenggarakan sosialisasi kepada karyawan mengenai berbagai topik yang terkait dengan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

The Code of Conduct provides a guideline for all level of organization of the Company (Board of Commissioners, Board of Directors and employees) in terms of interactions, attitude and actions, in line with ethical standards and prevailing rules, among others:

- abuse of power
- ethics in interacting with stakeholders
- concern for environment and work health and safety
- equal opportunity employment
- ethics in the interactions among Commissioners, Directors and employees
- integrity of Commissioners, Directors and employees
- intellectual rights
- policies on information disclosure
- giving and receipt of gifts and donations
- insider information
- involvement in political activities
- maintenance and efficient utilization of assets
- corporate reputation
- prohibition from possession and use of alcoholic beverages and/or narcotic, psychotropic and addictive substances.

The Code of Conduct has been disseminated to all levels of the Company, and the Board of Directors and all employees have signed a statement of Commitment of Compliance to Code of Conduct. As part of the implementation of the guidelines of the Code of Conduct, the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company also signed a Statement of Conflict of Interest document which is updated annually. To strengthen the understanding and implementation of the Code of Conduct, from time to time the Company conducts dissemination program to employees on various topics related to business ethics and good corporate governance (GCG).



Budaya Perusahaan

Standar etika perilaku dalam menjalankan bisnis juga tercermin dalam budaya perusahaan yang dikembangkan oleh Perseroan, dengan lima nilai utama yang dikenal sebagai InTIME, yaitu *Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust*, dan *Excellence*. Nilai-nilai utama tersebut merupakan pendekatan yang komprehensif untuk menjalankan bisnis yang beretika dan mencapai keunggulan kinerja. Penjabaran nilai-nilai utama InTIME disajikan di halaman 9 dalam Laporan Tahunan ini.

Corporate Culture

The standard of ethical behavior in conducting business is reflected in the Company's Corporate Culture, with five core values known as InTIME, namely Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust, and Excellence. Such core values are a comprehensive approach in conducting ethical business and reaching excellent performance. The core values of InTIME was described in page 9 in this Annual Report.

Pengelolaan Risiko

Risk Management



Pengelolaan Risiko Risk Management



IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam menjalankan peran yang diembannya, PT PII menghadapi risiko yang dapat berpengaruh negatif terhadap kelancaran usaha, pendapatan usaha maupun kondisi keuangannya. PT PII merupakan suatu entitas risiko (*risk entity*), yang bertanggung jawab untuk menanggung risiko dimana pihak lain (PJPK) tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya dalam suatu pelaksanaan proyek infrastruktur.

Berikut adalah uraian mengenai risiko-risiko utama yang dihadapi PT PII dan upaya mitigasi yang dapat dilakukan.

Risiko Legalitas dan Regulasi

Sebagai suatu entitas milik negara, PT PII memiliki eksposur terhadap perubahan status legalitas dan regulasi yang menjadi dasar kegiatan operasional perusahaan. Perubahan tersebut bisa berbentuk pengurangan, perluasan, tidak berlakunya kewajiban, wewenang dan tanggung jawab PT PII dari apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagai suatu risiko yang pemicu dan faktor risikonya berada di luar kendali PT PII,

RISK IDENTIFICATION

In the execution of its role, IIGF deals with various risks that can negatively affect the continuity of its business, the business income or its financial condition. In particular, IIGF is a risk entity responsible for managing risks, in case another party (in this case, the Contracting Agency/CA) fails to perform its contractual obligations when implementing an infrastructure project.

The following are descriptions of the main risks faced by IIGF and the efforts made to mitigate those risks.

Legality and Regulation Risks

As a state-owned entity, IIGF has exposures to changes in legality status and regulations applied as the basis of operational activities of the Company. These changes can be in the form of the reduction, expansion, invalidation of the obligations, authorities and responsibilities of IIGF from what were previously set. As a risk that both the triggers and the risk factors are beyond the IIGF's control, the possible mitigation efforts

upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah membangun pemahaman yang lebih baik terhadap peran yang dapat dilakukan PT PII dalam percepatan pembangunan infrastruktur kepada para pemangku kepentingan.

Saat ini, dasar pembentukan dan operasionalisasi PT PII diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35/2010, Peraturan Presiden No 13/2010, Peraturan Presiden No 78/2010 dan Peraturan Menteri Keuangan No 260/2010. Mengacu kepada kerangka regulasi tersebut, PT PII merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang bertanggung jawab dalam penyediaan Penjaminan Infrastruktur kepada proyek yang dikerjasamakan antara Pemerintah dan Badan Usaha.

Risiko Keuangan Perusahaan

Risiko keuangan terutama timbul sebagai akibat ketidakmampuan PT PII mencapai sasaran pendapatan hasil usaha, kerugian dari penempatan dana investasi, serta ketidakmampuan PT PII memperoleh pendanaan baru dari pihak kreditor maupun pemegang saham. Mitigasi atas risiko tersebut diupayakan dengan (i) mengamankan serta memastikan sumber-sumber pendapatan PT PII, (ii) memilih investasi portfolio secara berhati-hati dengan faktor risiko yang minimal, (iii) menjalin hubungan baik dengan berbagai lembaga keuangan termasuk lembaga multilateral, baik sebagai pihak kreditor maupun sebagai mitra dalam meningkatkan kapasitas penjaminan.

Risiko Operasional terkait Penjaminan

Risiko operasional terkait penjaminan merupakan risiko yang terkait tugas PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). Risiko ini meliputi terjadinya klaim atas penjaminan yang diberikan dan tidak efektifnya mekanisme regres yang menjadi dasar ganti rugi pembayaran klaim kepada PT PII, serta dipicu oleh cakupan dan tingkat risiko yang melekat pada setiap proyek yang dijamin oleh PT PII. Risiko proyek tersebut antara lain terkait dengan perubahan lanskap politik, pergantian pemerintahan, perubahan

may include building better understanding to the stakeholders on the role IIGF in accelerating the infrastructure development.

Currently, the basis for the establishment and operation of IIGF is regulated in Governmental Regulation No. 35/2010, Presidential Regulation No. 13/2010, Presidential Regulation No. 78/2010 and Regulation of the Minister of Finance No. 260/2010. Referring to these regulation frameworks, IIGF is a state-owned enterprise (SOE) appointed as a Business Entity for Infrastructure Guarantee (BUPI) responsible for providing Infrastructure Guarantee to projects made in partnership between the Government and Project Company.

Corporate Financial Risk

Financial risk mainly arise from the inability of IIGF to achieve its revenue target, losses incurred from the placement of investment funds, and the inability of IIGF to obtain new funding, whether from creditors or from shareholders. Mitigation of these risks is attempted by: (i) securing and ensuring IIGF's sources of revenue, (ii) careful selection of investment portfolio, with minimum risk factors, (iii) maintaining good relations with various financial institutions including multilateral institutions, both as creditor as well as partner in enhancing the guarantee capacity.

Operational Risk Related to Underwriting

Operational risk related to underwriting is the risk relates to IIGF duties as the Business Entity for Infrastructure Guarantee (BUPI). The risk includes the occurrence of guarantee claims and the ineffectiveness of the recourse mechanism as the basis of repayment of claims to IIGF, which is triggered by the scope and level of inherent risk of each project guaranteed by IIGF. These project risks may be related to changes in the political landscape, changes in the government, changes in rules and regulations or default of the contractual

peraturan dan perundang-undangan, wanprestasi kewajiban kontraktual PJPK, dalam hal mana sebagian atau keseluruhan faktor-faktor risiko tersebut dapat berdampak negatif terhadap kelayakan ekonomis proyek infrastruktur yang bersangkutan.

Dalam pengelolaan risiko ini (termasuk upaya mitigasinya), PT PII melakukan, antara lain, analisis terhadap probabilitas dan eksposur dari setiap peristiwa risiko yang tercakup dalam perjanjian penjaminan, mengevaluasi rencana mitigasi risiko yang diusulkan PJPK, memastikan alokasi risiko proyek yang optimal serta memberlakukan imbal jasa yang memadai untuk setiap penjaminan yang diberikan. Risiko penjaminan ini pada dasarnya merupakan bagian dari risiko proyek KPS yang dikelompokkan dalam suatu kategori risiko ("Kategori Risiko KPS"), sebagaimana diuraikan pada Box 1 berikut ini.

Risiko Operasional Umum

Risiko operasional terutama berkaitan dengan ketidakmampuan PT PII beroperasi secara efisien sehingga mengakibatkan kerugian operasional. Berbagai faktor risiko operasional antara lain adalah sumber daya manusia, struktur organisasi dan sistem operasional yang kurang andal; peralatan kerja yang tidak memadai; pengawasan intern yang lemah; tindakan yang melanggar hukum oleh personil PT PII. Upaya mitigasi dilakukan antara lain melalui perekrutan dan pelatihan personil secara profesional; penetapan organisasi, manual dan metode operasi sesuai *best practice*; penggunaan alat dan perlengkapan kantor yang memadai; serta pengembangan *checks and balances* yang memadai di setiap jenjang operasi.

obligations of CA of which the risk factors may have negative impact on the economic viability of the relevant infrastructure project, whether a whole or partially.

In managing these risks (including the mitigation efforts), IIGF performs, among other actions, analysis of the probability and exposure of each risk event covered in the Guarantee Agreement, evaluating the risk mitigation plan proposed by the CA, ensuring optimum risk allocation of the project, and applying appropriate fees to each guarantee provided. This guarantee provisioning risks are basically a subset of the PPP project risk, classified in a risk category ("PPP Risk Category"), as described in the following Box 1.

Operational Risks in General

Operational risk is generally related to the inability of IIGF to operate efficiently, which causes operational losses. Various factors of operational risk include: human resources; an unreliable organizational structure and operational system; inadequate working equipment; weak internal monitoring or violations of the law perpetrated by IIGF personnel. Mitigation efforts that can be implemented include, among others: professional recruitment and training of personnel; best practices in determining organization, manuals and methods of operation; utilization of adequate office tools and equipment; and development of adequate checks and balances at every level of its operation.

KATEGORI RISIKO KPS

Kategori Risiko KPS dikembangkan sebagai suatu daftar kelompok risiko yang generik, yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi peristiwa-peristiwa risiko spesifik kepada setiap proyek KPS.

PPP RISK CATEGORY

The PPP Risk Category is developed as a generic list of risk groupings, which is expected to be helpful in identifying possible risk events in each specific PPP project.

BOX 1

Peristiwa-peristiwa risiko yang teridentifikasi tersebut dapat digunakan lebih jauh untuk tahapan penilaian risiko dan pengembangan matriks/strategi alokasi risiko.

Kategori risiko ini tidak bermaksud untuk menjadi suatu daftar risiko yang menyeluruh dan berlaku pada setiap proyek KPS. Perbedaan situasi dan kondisi spesifik dalam suatu proyek KPS perlu juga dipertimbangkan.

1. Risiko Lokasi adalah kelompok risiko dimana lahan proyek tidak tersedia atau tidak dapat digunakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan dalam biaya yang diperkirakan, atau bahwa lokasi dapat menimbulkan suatu beban atau kewajiban bagi pihak tertentu. Dengan demikian, risiko-risiko yang termasuk kategori ini adalah:
 - a) Risiko pembebasan lahan;
 - b) Risiko ketidaksesuaian lokasi lahan;
 - c) Risiko lingkungan.
2. Risiko Desain, Konstruksi dan Uji Operasi adalah risiko desain, konstruksi atau uji operasi suatu fasilitas proyek atau elemen dari prosesnya, dilakukan dengan cara yang menyebabkan dampak negatif terhadap biaya dan pelayanan proyek. Dengan demikian, risiko yang termasuk dalam kategori ini adalah:
 - a) Risiko perencanaan;
 - b) Risiko desain;
 - c) Risiko penyelesaian;
 - d) Risiko kenaikan biaya;
 - e) Risiko uji operasi.
3. Risiko Sponsor adalah risiko dimana Badan Usaha dan/atau sub-kontraktornya tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada PJPK.
4. Risiko Finansial adalah risiko-risiko terkait aspek kelayakan finansial proyek. Risiko-risiko tersebut dapat berupa:
 - a) Risiko ketidakpastian pembiayaan;
 - b) Risiko parameter finansial;
 - c) Risiko struktur finansial;
 - d) Risiko asuransi.
5. Risiko Operasional adalah risiko dimana proses penyediaan layanan infrastruktur sesuai kontrak - atau suatu elemen dari proses tersebut (termasuk input yang digunakan atau sebagai bagian dari proses itu) - akan terpengaruh

The identified risk events can be used further in the risk assessment stage and for the development of a risk allocation matrix/strategy.

The checklist of risk categories is not meant to be exhaustive and applicable for each and every PPP project. The particular circumstances in each specific PPP project should also be considered.

1. Site Risk is the risk that the project land will be unavailable or unable to be used at the required time, in the manner or at the cost anticipated, or that the site will generate unanticipated liabilities for certain parties. Thus, risks included into this category are:
 - a) Land acquisition risk;
 - b) Landsite unsuitability risk;
 - c) Environmental risk.
2. Design, Construction and Commissioning Risk is the risk that the design, construction or commissioning of the facility or certain elements of each of these processes, are carried out in a way which results in adverse cost and/or project delivery consequences. Thus, risks included into this category are:
 - a) Planning risk;
 - b) Design risk;
 - c) Completion risk;
 - d) Cost overrun risk;
 - e) Commissioning risk.
3. Sponsor Risk is the risk where the Project Company and/or its sub-contractors are unable to fulfill their contractual obligations to the CA.
4. Financial Risk is the risks related to financial viability aspects of the project. This may refers to any of the following:
 - a) Financial uncertainty risk;
 - b) Financial parameter risk; and
 - c) Financial structure risk.
 - d) Insurance risk.
5. Operating Risk is the risk that the process for delivering the contracted services – or an element of that process (including the inputs used within or as part of that process) – will be affected in a way which prevents

- | | |
|--|---|
| <p>dengan cara yang menghalangi Badan Usaha dalam menyediakan layanan kontrak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan/atau sesuai proyeksi biaya. Dengan demikian, risiko termasuk dalam kategori ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Risiko pemeliharaan; b) Risiko cacat tersembunyi (<i>latent defect</i>); c) Risiko teknologi; d) Risiko utilitas; e) Risiko sumber daya atau input; f) Risiko hubungan industri. <p>6. Risiko Pendapatan adalah risiko bahwa pendapatan proyek tidak dapat memenuhi proyeksi tingkat kelayakan finansial, karena perubahan yang tak terduga baik permintaan proyek atau tarif yang disepakati atau kombinasi keduanya. Karenanya, risiko termasuk dalam kategori ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Risiko permintaan; dan b) Risiko tarif. <p>7. Risiko Konektivitas Jaringan adalah risiko terjadinya dampak negatif akibat perubahan dari kondisi jaringan saat ini atau rencana masa depan. Risiko yang termasuk dalam kategori ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Risiko konektivitas dengan jaringan eksisting; b) Risiko pengembangan jaringan; c) Risiko fasilitas pesaing. <p>8. Risiko Interface adalah risiko dimana metode atau standar penyediaan layanan akan menghalangi atau mengganggu penyediaan layanan yang dilakukan sektor publik atau sebaliknya. Risiko ini termasuk ketika kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak sesuai/tidak cocok dengan yang dilakukan oleh Badan Usaha, atau sebaliknya.</p> <p>9. Risiko Politik adalah risiko yang dipicu tindakan/tiadanya tindakan PJPK yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang merugikan secara material dan mempengaruhi pengembalian ekuitas dan pinjaman di pihak Badan Usaha. Risiko yang termasuk kategori ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Risiko mata uang yang tidak dapat dikonversi atau ditransfer; b) Risiko pengambilalihan; c) Risiko perubahan regulasi dan perundangan; | <p>the Project Company from delivering the contracted services according to the agreed specifications and/or within the projected costs. Thus, risks included into this category are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Service availability risk; b) Maintenance risk; c) Latent defect risk; d) Technology risk; e) Utilities risk; f) Resource or input risk; g) Industrial relations risk. <p>6. Revenue Risk is the risk that the project revenue is unable to meet the projected level of financial viability, due to the unexpected changes to either the project demand or the agreed tariff or combination of both. Thus, risks included into this category are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Demand risk; or b) Tariff risk. <p>7. Network Connectivity Risk is the risk of negative impact due to changes in existing network(s) or those planned for the future. Thus, risks included into this category are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Connectivity with the existing network risk; b) Network development risk; c) Competing facility risk. <p>8. Interface Risk is the risk that the method or standard of delivery of the contracted services will prevent or in some way frustrate the delivery of services by the public sector or vice versa. The risk includes when the quality of work done by the Government does not conform or not suitable with those done by the Project Company, or vice versa.</p> <p>9. Political Risk is the risk of unforeseeable action/inaction by the CA that materially and adversely affects the expected Return on Equity and debt service of the Project Company. Thus, risks included into this category are:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Currency inconvertibility and non-transfer risk; b) Expropriation risk; c) Change in Law (legislative and government policy) risk; |
|--|---|

- d) Risiko *sub-sovereign* atau parastatal;
- e) Risiko perijinan;
- f) Risiko perubahan tarif pajak.

10. Risiko Kahar adalah risiko terjadinya kejadian kahar (*force majeure*) yang sepenuhnya di luar kendali kedua belah pihak (misalnya bencana alam atau akibat manusia) dan akan mengakibatkan penundaan atau default oleh Badan Usaha dalam pelaksanaan kewajiban kontraknya.

11. Risiko Kepemilikan Aset adalah risiko terjadinya peristiwa seperti kejadian kehilangan (misalnya hilangnya kontrak, *force majeure*), perubahan teknologi, dan lainnya, yang menyebabkan nilai ekonomi aset menurun, baik selama atau pada akhir masa kontrak.

Prinsip Alokasi Risiko

Penentuan kewajiban PJPK dalam Perjanjian Kerja Sama proyek KPS perlu memenuhi prinsip alokasi risiko. Alokasi risiko yang optimal penting demi memaksimalkan *value for money*.

Prinsip yang lazim diterapkan untuk alokasi risiko adalah bahwa risiko sebaiknya dialokasikan kepada pihak yang relatif lebih mampu mengelolanya atau dikarenakan memiliki biaya terendah untuk menyerap risiko tersebut. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, diharapkan dapat menghasilkan premi risiko dan biaya proyek yang lebih rendah sehingga berdampak positif bagi pemangku kepentingan proyek.

Cakupan Risiko Penjaminan Infrastruktur

Secara umum, berikut adalah daftar sebagian dari risiko-risiko (merupakan kewajiban finansial PJPK dalam Perjanjian KPS) yang dapat dijamin oleh PT PII:

- d) Sub-sovereign or Parastatal risk;
- e) Regulatory consent risk;
- f) Tax rate change risk.

10. Force Majeure Risk is the risk that a specified event entirely outside the control of either party (e.g. act of god, man-made catastrophic event) will occur and will result in a delay or default by the Project Company in the performance of its contractual obligations.

11. Asset ownership risk is the risk that events such as loss events (e.g. contract loss, force majeure), technological change, and others, resulting in the decline of the economic value of the asset, either during or at the end of the contract period.

Principles of Risk Allocation

Determination of the CA's obligations in a PPP Agreement needs to conform with the risk allocation principles. An optimal risk allocation is vital in maximizing the value for money.

The common principle often implemented in risk allocation is that a risk should be allocated to the party that is relatively more capable in managing the risk (or having the least cost of absorbing such risk). If this principle is implemented properly, it is expected that the risk premium and the project cost would be lower in order to have positive impact to project stakeholders.

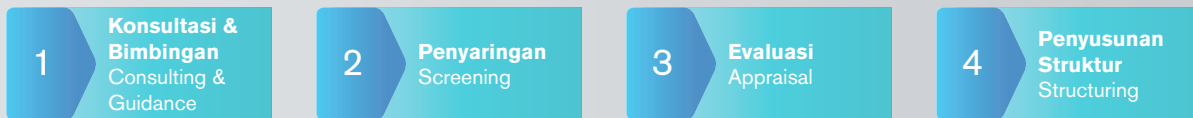
Risk Coverage of Infrastructure Guarantee

In general, the following non-exhaustive list are some of the risks (from the CA's financial obligation in the PPP Agreement) that can be covered by IIGF:

No	Risiko Risk	Deskripsi Description
1	Lisensi, Izin dan Persetujuan Licenses, permits, and approvals	Cakupan terhadap risiko akibat keterlambatan atau kegagalan dalam memberikan lisensi, izin atau persetujuan (keterlambatan yang berdampak negatif terhadap biaya konstruksi, biaya pendanaan dan dimulai perolehan pendapatan). Coverage for delay or failure to grant licenses, permits, and approvals (delays that would have adverse effects on construction costs, financing charges, and the commencement of revenue).
2	Keterlambatan/Kegagalan Financial Close Financial close delay/failure	Cakupan terhadap risiko keterlambatan atau kegagalan <i>financial close</i> yang diakibatkan tindakan/tidak bertindaknya PJPK (selain isu lahan dan isu perijinan). Coverage for any delay/failure of financial closure due to any other action/inaction on the part of the CA (beyond land and licenses/permits/approvals)

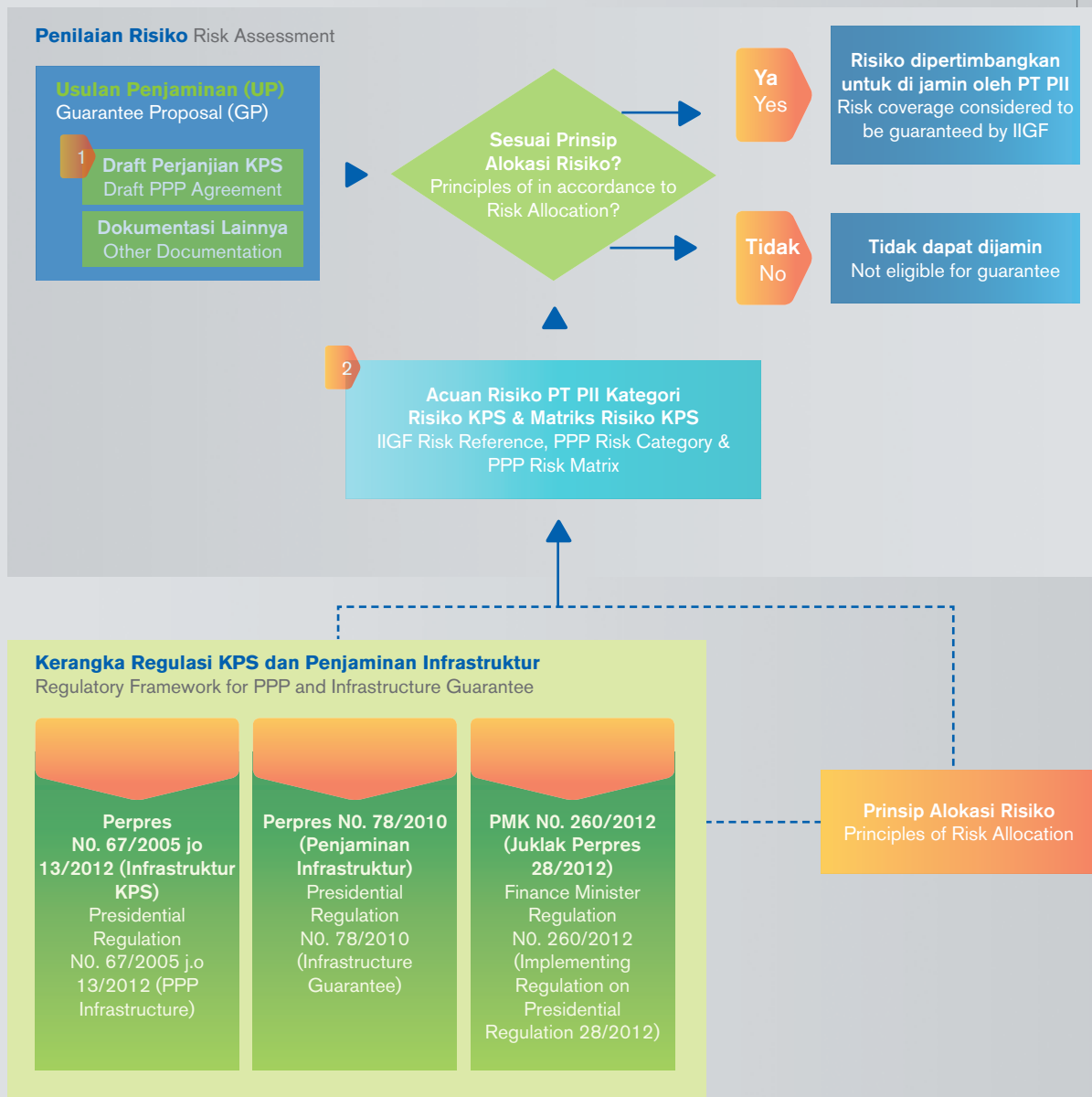
No	Risiko Risk	Deskripsi Description
3	Perubahan Regulasi dan Perundangan Change in law/regulations	Cakupan terhadap kerugian sebagai dampak dari perubahan regulasi/perundangan yang berdampak negatif terhadap proyek, seperti peraturan pajak, struktur tarif, atau peraturan yang mempengaruhi spesifikasi teknis proyek dan menyebabkan perubahan biaya. Berlaku hanya jika kontrak secara eksplisit terhadap dan terikat dengan regulasi/perundangan yang berlaku (melindungi terhadap perubahan regulasi/ perundangan), dimana lazim bagi PJPK untuk menanggung risiko perubahan regulasi/ perundangan yang bersifat diskriminatif. Coverage for impact of change in law/regulation in event that change in law adversely affects project, such as tax law, law on tariff structure, or law that affects project's technical specifications and results in changes in costs. Applies only if contract is explicit (not silent) in its basis on and ties with existing law (i.e., protects from changes in law), where it is common for CA to bear the risk of discriminatory change of law.
4	Wanprestasi Breach of contract	Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindaknya PJPK yang melanggar kontrak, atau merubah kontrak secara sepihak. Coverage for CA's action/inaction in violation of contract, or CA's changing clauses of contract unilaterally
5	Integrasi dengan Jaringan Integration with network	Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindaknya PJPK (atau otoritas yang berwenang) yang mempengaruhi operasional/ pendapatan proyek karena kegagalan (atau tidak memadainya) integrasi dengan jaringan eksisting atau yang direncanakan. Coverage for actions/inaction that affect project operations/revenue by failure (or inadequate) integration with existing or future networks
6	Risiko Fasilitas Pesaing Competing facility risk	Cakupan terhadap risiko adanya fasilitas/infrastruktur sejenis yang dibangun dan akan bersaing dengan penyediaan layanan yang diperjanjikan. Coverage for the risk that other similar facility/infrastructure is built which eventually competes with the delivery of the contracted services
7	Risiko Pendapatan Revenue risk	Cakupan terhadap pemenuhan/penerapan kewajiban PJPK terhadap pendapatan proyek. Cakupan berlaku hanya jika PJPK secara kontraktual menyetujui pembayaran atas layanan infrastruktur/proyek (anuitas/dukungan fiskal terhadap kesenjangan kelayakan/pendapatan minimum). Coverage to fulfill/enforce CA's obligations on revenue. Coverage applies only to CA's contractually agreed payments (annuity/viability gap/minimum revenue)
8	Risiko Permintaan Demand risk	Cakupan terhadap perubahan, yang ditanggung BU akibat tindakan CA, yang mempengaruhi permintaan layanan proyek. Coverage for change, borne of CA's actions, that have an influence on demand for the project's services
9	Risiko Harga Pricing risk	Cakupan terhadap pemenuhan tingkat pendapatan yang tidak tercapai akibat perubahan tarif secara sepihak. Coverage to fulfill level of revenue that was not reached due to unilateral change of tariff.
10	Risiko Ekspropriasi Expropriation Risk	Cakupan terhadap tindakan pengambilalihan proyek oleh CA atau otoritas lainnya yang menyebabkan berakhirnya kontrak proyek. Coverage for takeover by CA or other public agencies causing end of project contract.
11	Risiko Tidak Dapat dilakukannya Konversi dan Transfer Mata Uang Currency inconvertibility & non-transfer risk	Cakupan terhadap risiko pendapatan/profit dari proyek tidak dapat dikonversi ke mata uang asing dan/atau tidak dapat direpatriasi ke negara asal investor. Coverage for risk that the revenue/profit from the project could not be converted to the foreign currency and /or repatriated to the investor's home country.
12	Risiko Parastatal atau Sub-nasional Sub-sovereign or Parastatal risk	Cakupan terhadap risiko suatu entitas sub-nasional atau parastatal yang bertindak sebagai CA pada suatu proyek yang gagal memenuhi pembayaran kontraktual atau kewajiban materil lainnya (karena keputusan sepihak) Coverage for risk that the subsovereign or parastatal entity which act as the CA in the project has fail to perform its contractual payment or other material obligations (i.e. due to unilateral decision).
13	Risiko Kahar yang Mempengaruhi PJPK Force majeure risk affecting CA	Cakupan terhadap risiko bahwa suatu kejadian di luar kendali kedua belah pihak (bencana alam atau akibat tindakan manusia) yang akan terjadi dan dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan CA untuk memenuhi kinerja kewajiban kontraktual. Coverage for risk that a specified event entirely outside the control of either party (e.g. act of god, man-made catastrophic event) will occur and will result in a delay or default by CA in the performance of its contractual obligations.
14	Risiko Interface Interface risk	Cakupan terhadap risiko bahwa metode atau standar layanan sektor publik akan menghambat layanan kontraktual atau sebaliknya. Risiko ini termasuk jika kualitas pekerjaan oleh pemerintah tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan Badan Usaha. Coverage for risk that the method or standard of delivery of the contracted services will prevent or in some way frustrate the delivery of the public sector delivered services or vice versa. The risk includes when the quality of works done by government not conform/suitable with those done by the PC, vice versa.

BOX 2



Aktivitas Appraisal Lainnya

Other Activities in Appraisal



PENILAIAN RISIKO

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko oleh PT PII, penilaian risiko dilakukan terhadap keseluruhan risiko PT PII yang telah teridentifikasi sebelumnya.

Pada dasarnya, penjaminan infrastruktur oleh PT PII menjamin kewajiban finansial PJPK dalam suatu perjanjian KPS, dimana kewajiban ini timbul akibat risiko yang disebabkan oleh peristiwa penyebab (*triggering events*) berikut:

- Tindakan atau tiadanya tindakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK dalam hal-hal yang menurut hukum atau peraturan perundangan - PJPK atau Pemerintah selain PJPK memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut;
- Kebijakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK;
- Keputusan sepihak dari PJPK atau Pemerintah selain PJPK;
- Ketidakmampuan PJPK dalam melaksanakan suatu kewajiban yang ditentukan kepadanya oleh Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Kerjasama (*breach of contract*).

Penilaian Risiko untuk Penjaminan Infrastruktur

Keputusan PT PII dalam penyediaan penjaminan risiko infrastruktur dalam suatu proyek KPS dibuat setelah mengevaluasi, antara lain, kesesuaian draft perjanjian KPS dengan prinsip alokasi risiko (lihat Box 2), seperti digambarkan dalam diagram berikut.

PEMANTAUAN RISIKO

Sesuai struktur organisasi PT PII, *Risk and Compliance* (RAC) adalah divisi yang salah satu tugasnya memonitor pelaksanaan ERM Perseroan. Sebagai pemilik kerangka pengelolaan risiko di PT PII, terhadap risiko penjaminan proyek, RAC akan memberikan masukan dari sudut pandang yang independen terhadap dampak dari risiko proyek dan potensi klaim penjaminan terhadap PT PII sebagai perusahaan. Secara khusus, RAC

RISK ASSESSMENT

As part of risk management by IIGF, risk assessment is performed against all of the previously identified IIGF risks.

Basically, Infrastructure Guarantee by IIGF guarantees the financial obligations of CA in a certain PPP agreement, wherein these the obligation occurs due to the risks caused by the following triggering events:

- Action or inaction of CA or government other than CA concerning issues that, according to laws or regulations, the CA or government other than CA have the power or authority to exercise those actions;
- Policies of CA or government other than CA;
- Unilateral decision from CA or government other than CA; and
- Inability of CA in executing an obligation set upon it by the Project Company based on the Cooperation Agreement (breach of contract).

Risk Assessment for Infrastructure Guarantee

The decision by IIGF to provide guarantee for risks in a PPP project is made after analyzing, among others the conformity of the draft PPP Agreement with the risk allocation principles (see Box 2), as depicted in the following diagram.

RISK MONITORING

According to the organizational structure of IIGF, Risk and Compliance (RAC) is the division that performs, among others, monitoring the execution of the Company's Enterprise Risk Management (ERM). As owner of the IIGF risk management framework, on the project portfolio risk, the RAC will provide an independent review on risks related to the project and claim assessment. Specifically, RAC will carry out independent reviews on the

akan melakukan tinjauan independen terhadap kepatuhan proses penilaian dan memberikan komentar independen dari perspektif risiko institusi (baik batas-batas tertentu dilampaui, atau jika ada masalah institusi yang tidak ditangani, dan sebagainya) yang berasal dari tahap evaluasi proyek (*appraisal*) dan tahap penstrukturan penjaminan (*structuring*).

Mekanisme pemantauan penjaminan proyek harus dijalankan untuk mengidentifikasi seluruh eksposur risiko, jika ada sebelum mereka berubah menjadi klaim. Dalam hal ini, PT PII melalui divisi *Project Monitoring and Claim* (PMC) akan memantau profil eksposur penjaminan secara periodik melalui pemantauan terhadap upaya PJPK dalam melakukan mitigasi risiko dalam implementasi proyek. Mekanisme pemantauan akan membantu PT PII untuk mengambil tindakan perbaikan dan membatasi terjadinya klaim.

Terhadap risiko operasional, PT PII sebagai sebuah institusi perlu memantau eksposur peristiwa risiko, antara lain:

- risiko personil utama
- kecurangan internal (*internal fraud*):
- kecurangan eksternal (*external fraud*)
- praktik kerja
- kerusakan aset fisik
- gangguan usaha
- pengelolaan eksekusi, penyelesaian dan proses
- keselamatan kerja

Terhadap risiko keuangan perusahaan yang terkait dengan ketidakpastian pasar, PT PII melalui divisi *Treasury and Investment* (TRI) menerapkan kebijakan investasi yang bijaksana untuk pengelolaan dana dan untuk mencapai hasil optimal. Investasi dana yang belum dicadangkan untuk penjaminan proyek akan mengikuti norma-norma yang diatur dalam kebijakan internal perusahaan. Norma-norma tersebut dirumuskan untuk memberikan fleksibilitas yang cukup untuk mengoptimalkan pengembalian investasi tanpa mengambil risiko yang berlebihan.

compliance of the assessment process, and will provide independent comments from the perspective of institutional risk (whether if certain limits were exceeded, or if there are institutional problems that are not managed, etc.) arising from the project evaluation stage (*appraisal*), and guarantee structuring stage.

The monitoring mechanism of project guarantee must be executed to identify all of the risk exposures, if any, before they turned into claims. In this case, IIGF through the Project Monitoring and Claim (PMC) division will periodically monitor the performance of risk exposure to projects. The monitoring mechanism will help PT PII to take corrective actions and to limit the occurrence of claims.

Regarding operational risks, IIGF as an institution must monitor risk exposures, such as:

- Key personnel risk
- Internal fraud
- External fraud
- Labor practice
- Damage to physical assets
- Business disruptions
- Management of execution, delivery and process
- Work safety

On the corporate financial risks related to market uncertainty, IIGF through its Treasury and Investment division (TRI) applies a prudent investment policy for the management of funds as well as to achieve optimal returns. The investment of funds not allocated to project guarantee (idle funds) will follow the norms laid down in this policy. These norms have been formulated to provide sufficient flexibility with which to optimize returns from the invested funds without taking excessive risks.

FUNGSI KEPATUHAN PROSEDUR

Standar operasional prosedur yang berbasis risiko dibangun untuk mengelola risiko dalam operasional PT PII. Kajian atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal dilakukan untuk mengawasi dan mengelola isu kepatuhan dalam organisasi, serta memastikan bahwa Perseroan dan karyawannya mematuhi kebijakan dan prosedur internal yang ada. Kajian ini dilakukan secara independen untuk memastikan isu kepatuhan dalam organisasi dievaluasi, diinvestigasi dan dilaporkan secara tepat. Berbeda dengan fungsi internal audit yang ditempatkan setelah transaksi, kajian atas kepatuhan (*compliance review*) dirancang sebagai salah satu alat pengelolaan risiko sebelum transaksi. Unit Kepatuhan memberikan peringatan awal kepada manajemen dalam pengawasan isu kepatuhan.

PROCESS COMPLIANCE FUNCTION

Risk-based standard operational procedures are developed to manage risk in IIGF operations. Reviews on compliance to internal policies and procedures are performed to monitor and manage compliance issues within the organization, and to ensure that the organization and its employees are complying with internal policies and procedures. Reviews are performed independently to ensure compliance issues within the organization are being appropriately evaluated, investigated and reported. In contrast to the internal audit function that is placed after the transaction, the review on compliance is designed as a tool of risk management prior to the transaction. The Compliance unit provides early warning to management in monitoring compliance issues.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



97

PT PII aktif melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai bentuk kepeduliannya untuk berkontribusi secara langsung dalam memperbaiki kondisi kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan yang terdekat.

IIGF actively carries out CSR activities as a form of its concern and direct contribution to the efforts in improving the social welfare of nearby communities.

PT PII memfokuskan aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) terutama pada program-program dukungan pendidikan dan pelestarian lingkungan, maupun kegiatan donasi sosial untuk membantu kalangan masyarakat yang membutuhkan. Komunitas yang menjadi sasaran program-program ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek-proyek yang sedang ditangani oleh PT PII dan di wilayah Kantor Pusat PT PII.

IIGF's CSR activity is focused on educational support programs and the preservation of the environment, as well as in social charity initiatives to help communities in need. The CSR programs are targeting the community living in the vicinity of the projects handled by IIGF and IIGF office

Sumber dana untuk program-program CSR tersebut adalah dana Program Bina Lingkungan yang diambil dari penyisihan laba setelah pajak. Sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PII juga memiliki kewajiban untuk menjalankan misi sosial melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pada tahun 2013, alokasi dana PKBL adalah Rp 1.450 juta, yaitu sekitar 1% dari laba bersih Perusahaan tahun 2012.

Funding for CSR programs is taken from the Community Development Program fund, which is derived from allocation of income after tax. As a State-Owned Enterprises (SOEs), IIGF bears an obligation to carry out the social mission through the implementation of the Partnership Program and Community Development (PKBL). In 2013, the allocation of funds for PKBL amounted to Rp 1,450 million, or around 1% of the Company's net income in 2012.

Dukungan Terhadap Pendidikan

Sejak tahun 2011, PT PII telah melaksanakan serangkaian kegiatan dukungan pendidikan bagi murid dan guru Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kabupaten Batang adalah lokasi dimana akan dibangun PLTU Jawa Tengah, proyek KPS pertama yang memperoleh fasilitas penjaminan dari PT PII. Pada tahun 2013, aktivitas CSR PT PII di wilayah ini terus berlanjut, melalui program beasiswa dan bantuan sarana pendidikan.

PT PII bekerjasama dengan PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) dan PT PLN (Persero) memberikan bantuan beasiswa sebesar Rp 303.700.000 bagi siswa-siswi berprestasi yang kurang mampu di Batang. Beasiswa tersebut diserahkan pada tanggal 30 Oktober 2013 kepada 893 siswa-siswi dari Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng dan Desa Ujungnegoro. Penyaluran dana beasiswa dilakukan melalui koperasi simpan-pinjam yang ada di masing-masing desa tersebut.

BPI adalah konsorsium tiga perusahaan yang akan membangun PLTU Jawa Tengah berkapasitas 2.000 MW di Kabupaten Batang.

Dalam kerjasama yang lain dengan BPI di bidang CSR, PT PII pada tahun 2013 juga telah memberikan bantuan pendidikan berupa 17 unit perangkat komputer (PC) kepada lima madrasah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di kelima madrasah tersebut yang berlokasi di dua desa yang termasuk wilayah yang terdampak oleh pembangunan PLTU Jawa Tengah.

Dukungan Pelestarian Lingkungan

PT PII menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam program Konservasi Sumber Air dan Pelestarian Lingkungan Bandar Lampung, yang diresmikan oleh Walikota Bandar Lampung pada tanggal 6 Desember 2013. Dalam program ini, PT PII membantu pembuatan sekitar 30.000 lubang resapan biopori di beberapa wilayah di Kotamadya Bandar Lampung,

Educational Support

Since 2011, IIGF has conducted a series of educational support activities for elementary school students and teachers in Batang Regency, Central Java. Batang is the location where the Central Java Power Plant, the first PPP project guaranteed by IIGF, will be built. In 2013, IIGF CSR activities in these areas continues, through scholarships and educational support facilities.

IIGF in cooperation with PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) and PT PLN (Persero) provided a scholarship of Rp 303,700,000 for deserving students from low income families in Batang. The scholarships were distributed on October 30, 2013 to 893 students from Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng and Desa Ujungnegoro. The distribution of scholarship is carried out through the local savings and lending cooperatives in each of the villages.

BPI is a consortium of three companies that will build the power plant with a capacity of 2,000 MW in Batang.

In 2013, in another collaboration program with BPI in the field of CSR, IIGF has also donated 17 units of computers (PCs) as an education assistance to five Islamic schools in Batang, Central Java. The donation is intended to help improve the quality of education in those five schools, located in two villages that will be impacted by the construction of the Central Java Power Plant.

Environmental Conservation Support

IIGF collaborated with the local government of Bandar Lampung, Lampung in the Water Resources and Environmental Conservation program, which was inaugurated by the Mayor of Bandar Lampung on December 6, 2013. In this program, IIGF support the building of around 30,000 Biopore Infiltration Holes in several areas in the Municipality of Bandar Lampung,

penanaman pohon bambu di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Kuripan sepanjang 2 kilometer, serta memberikan bantuan bagi pendidikan lingkungan di beberapa sekolah di Bandar Lampung.

PT PII juga bekerjasama dengan INKALINDO Lampung (Ikatan Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia) memberikan sosialisasi Lubang Resapan Biopori dan konservasi alam yang dilaksanakan di SMAN 7 Bandar Lampung dan SMPN 2 Bandar Lampung. Dengan kegiatan ini, diharapkan para siswa dapat memahami pentingnya menjaga konservasi alam sejak dini.

PT PII berharap dapat mendukung pelestarian daerah resapan air dan dengan demikian mengurangi risiko banjir maupun kekeringan di wilayah tersebut dalam jangka panjang. Saat ini, PT PII sedang menyelesaikan proses-proses untuk memberikan penjaminan bagi pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung.

the planting of bamboo trees in the 2 kilometers long Watershed (DAS) of Way Kuripan River, as well as the provision of support for environmental education in a number of schools in Bandar Lampung.

IIGF also collaborated with INKALINDO Lampung (Indonesia Institute of Environmental Assessment) in the dissemination of Biopori Infiltration Hole and environment conservation in SMAN 7 Bandar Lampung and SMPN 2 Bandar Lampung. The activity is intended to build awareness in environmental protection issues among the students.

IIGF looks forward to supporting the preservation of water catchment areas and thus reduces the risk of floods and droughts in the long term. Currently, IIGF is working on the guarantee provision processes to the Bandar Lampung Clean Water Project.



Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2013 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Statement of the Board of Commissioners and Directors Regarding Responsibility over the 2013 Annual Report of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun 2013 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, April 2014

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund for the year 2013 have been presented in their entirety and that we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is duly made in all integrity.

Dewan Komisaris Board of Commissioners



Luky Alfirman
Komisaris Utama
President Commissioner



Ayu Sukorini
Komisaris
Commissioner

Direksi Board of Directors



Sinthya Roesly
Direktur Utama
President Director



Armand Hermawan
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management



Yadi J. Ruchandi
Direktur Operasi
Director of Operations



Laporan Keuangan

Financial Statements

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (PERSERO)**

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2013 DAN 2012/
*31 DECEMBER 2013 AND 2012***



**PERNYATAAN DIREKSI
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (PERSERO)**

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), kami menyatakan bahwa:

- (a) laporan keuangan Perusahaan menyajikan secara wajar posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, hasil usaha, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; dan
- (b) laporan keuangan Perusahaan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (PERSERO)**

In accordance with resolution of the Board of Directors of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), in the opinion of the Board of Directors:

- (a) *the financial statements of the Company are drawn up so as to present fairly the financial position as at 31 December 2013 and 2012, and the results of its operations, and its cash flows for the years then ended; and*
- (b) *the financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

Jakarta
7 Maret/March 2014

Sinthya Roesly
Presiden Direktur/*President Director*

Armand Hermawan
Direktur Keuangan/*Finance Director*



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) which comprise the statement of financial position as at 31 December 2013, and the statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2013, kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) as at 31 December 2013, the financial performance, and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Jakarta
7 Maret/March 2014

Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA

Surat Izin Praktek Akuntan Publik/Licence of Public Accountant No. AP.0229

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 1 - Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2013</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2012</u>	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	1,218,009,773	5	2,746,643,432	Cash and cash equivalents
Investasi	3,861,052,807	6	2,142,262,853	Investments
Piutang usaha	22,230,067	7	15,448,222	Account receivables
Piutang lainnya	329,183		268,645	Other receivables
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	3,299,033		1,637,312	Prepaid expenses and advances
Aset tetap	2,869,408	8	3,164,505	Fixed assets
Aset tak berwujud	1,892,034	9	189,461	Intangible assets
Beban tangguhan	37,345,612	10	41,460,284	Deferred expenses
Beban <i>front-end</i>	763,384		-	Front-end fee
Pajak dibayar dimuka	12,124,927	12a	505,858	Prepaid income tax
Aset pajak tangguhan	35,353,763	12d	14,353,366	Deferred tax asset
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	<u>1,198,116</u>		<u>903,398</u>	Refundable deposits
JUMLAH ASET	<u>5,196,468,107</u>		<u>4,966,837,336</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang usaha	8,798,169	11	2,596,065	Account payables
Utang pajak	3,034,429	12b	1,786,608	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	9,820,266	13	21,407,127	Accrued expenses, provisions and other payables
Pendapatan tangguhan	22,312,500	14	22,312,500	Unearned income
Liabilitas imbalan kerja	<u>4,512,569</u>	15	<u>1,617,771</u>	Employee benefit obligation
JUMLAH LIABILITAS	<u>48,477,933</u>		<u>49,720,071</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - modal dasar, 9.000.000 lembar (2012: 9.000.000 lembar), ditempatkan disetor penuh 4.500.000 lembar (2012: 4.500.000 lembar), dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (jumlah penuh) per lembar saham	4,500,000,000	16	4,500,000,000	Share capital - authorised, 9,000,000 shares (2012: 9,000,000 shares), issued and fully paid 4,500,000 shares (2012: 4,500,000 shares), with par value of Rp 1,000,000 (full amount) per share
Laba/(rugi) belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual	(15,519,983)		1,917,096	Unrealised gain/(loss) from available-for-sale financial assets
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	20,800,000	17	10,150,000	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	<u>642,710,157</u>		<u>405,050,169</u>	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	<u>5,147,990,174</u>		<u>4,917,117,265</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>5,196,468,107</u>		<u>4,966,837,336</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 2 - Schedule

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless
otherwise stated)

	<u>2013</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2012</u>	
Pendapatan				Revenues
Pendapatan penjaminan				Revenue from guarantee
- Pendapatan provisi dan komisi	-		-	Fees and commission -
- Pendapatan premi	-		-	Premium income -
Pendapatan pengelolaan dana	392,961,435		312,240,468	Income from investments
	<u>392,961,435</u>	18	<u>312,240,468</u>	
Beban usaha				Operating expenses
Penjaminan	(40,777,153)	19	(13,700,207)	Guarantee
Administrasi dan umum	(42,018,908)	19	(32,622,495)	General and administrative
Pengembangan usaha	(3,231,919)	19	(2,635,416)	Business development
Penyusutan	(1,881,241)	8	(2,108,212)	Depreciation
Amortisasi	(81,892)	9	(65,974)	Amortisation
Penghasilan keuangan, kotor	806,947		909,896	Finance income, gross
Kerugian kurs, bersih	(516,520)		(72,424)	Foreign exchange loss, net
Lain-lain	(560,461)		(371,548)	Others
	<u>(88,261,147)</u>		<u>(50,666,380)</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	304,700,288		261,574,088	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	(54,940,300)	12c	(48,196,019)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	249,759,988		213,378,069	Profit for the year
Laba/(rugi) komprehensif lain tahun berjalan	(17,437,079)		1,400,717	Other comprehensive income/(expense) for the year
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	<u>232,322,909</u>		<u>214,778,786</u>	Total comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 3 - Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN – TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2013 AND 2012**
(Expressed in thousand of Rupiah, unless
otherwise stated)

			Labar(rugi) belum direalisasi atas kepernilikan aset keuangan tersedia untuk dijual/ <i>Unrealised Gain/(loss) from available- for-sale financial assets</i>	<i>Saldo laba/Retained earnings</i>		Jumlah/ Total	
	Catatan/ Notes	Modal saham/ <i>Share capital</i>		Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Tidak ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>		
Saldo 1 Januari 2012		3.500.000,000	516,379	2.300,000	200.972,100	3.703.788,479	Balance at 1 January 2012
Penambahan modal saham	16	1.000.000,000	-	-	-	1.000.000,000	<i>Increase of share capital</i>
Pencadangan saldo laba	17	-	-	7.850,000	(7.850,000)	-	<i>Appropriation of retained earnings</i>
Program kemitraan dan bina lingkungan yang dialokasikan dari laba tahun 2011	17	-	-	-	(1.450,000)	(1.450,000)	<i>Appropriate social responsibility programme allocated from profit for the year 2011</i>
Laba komprehensif tahun berjalan		-	1.400,717	-	213.378,069	214.778,786	<i>Comprehensive income for the year</i>
Saldo 31 Desember 2012		4.500.000,000	1.917,096	10.150,000	405.050,169	4.917.117,265	Balance at 31 December 2012
Pencadangan saldo laba	17	-	-	10.650,000	(10.650,000)	-	<i>Appropriation of retained earnings</i>
Program kemitraan dan bina lingkungan yang dialokasikan dari laba tahun 2012	17	-	-	-	(1.450,000)	(1.450,000)	<i>Corporate social responsibility programme allocated from profit for the year 2012</i>
Laba komprehensif tahun berjalan		-	(17.437,079)	-	249.759,988	232.322,909	<i>Comprehensive income for the year</i>
Saldo 31 Desember 2013		4.500.000,000	(15.519,983)	20.800,000	642.710,157	5.147.990,174	Balance at 31 December 2013

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

*The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 4 - Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN – TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Laba sebelum pajak penghasilan	304,700,288	261,574,088	Profit before income tax
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas:			Add items not affecting cash flows:
- Beban penyusutan	1,881,241	2,108,212	Depreciation -
- Beban amortisasi	81,892	65,974	Amortization -
- Beban penyisihan imbalan kerja	<u>2,894,798</u>	<u>952,505</u>	Provision for employee - benefits obligation
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	<u>309,558,219</u>	<u>264,700,779</u>	Operating cash flows before changes in working capital
Perubahan modal kerja:			Changes in working capital:
- Piutang usaha	(6,781,845)	(5,610,398)	Account receivables -
- Piutang lainnya	(60,538)	(209,515)	Other receivables -
- Biaya dibayar di muka dan uang muka	(2,629,977)	(575,940)	Prepaid expenses and advances
- Beban tangguhan	3,351,288	(30,966,070)	Deferred expenses -
- Utang usaha	6,202,104	1,216,756	Account payables -
- Utang pajak	1,247,821	(163,808)	Taxes payable -
- Biaya masih harus dibayar dan utang lain-lain	(12,726,616)	12,200,143	Accrued expenses and other payables
- Pembayaran pajak final	(75,301,666)	(60,488,635)	Payment for final income tax -
- Pembayaran pajak dibayar di muka	<u>(10,650,813)</u>	<u>(449,651)</u>	Payment for prepaid tax -
	<u>(97,350,242)</u>	<u>(85,047,118)</u>	
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>212,207,977</u>	<u>179,653,661</u>	Net cash flow provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Penempatan investasi	(1,736,866,064)	(1,062,103,276)	Placement for investments
Pembelian aset tetap dan aset tak berwujud	(3,370,609)	(2,183,278)	Acquisition of fixed assets and intangible assets
Penempatan uang jaminan yang dapat dikembalikan	<u>(294,718)</u>	<u>(333,811)</u>	Refundable deposit
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(1,740,531,391)</u>	<u>(1,064,620,365)</u>	Net cash flow used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan modal saham	-	1,000,000,000	Share capital received
Pembayaran program kemitraan dan bina lingkungan	<u>(310,245)</u>	<u>(778,173)</u>	Payment for corporate social responsibility programme
Arus kas bersih (digunakan)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>(310,245)</u>	<u>999,221,827</u>	Net cash flow (used for)/ provided from financing activities
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	<u>(1,528,633,659)</u>	<u>114,255,123</u>	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	<u>2,746,643,432</u>	<u>2,632,388,309</u>	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas akhir tahun	<u>1,218,009,773</u>	<u>2,746,643,432</u>	Cash and cash equivalents at end of year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/1 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak dalam hal memberikan penjaminan pada proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta ("KPS") di bidang infrastruktur.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. No.59 tanggal 11 April 2013 yang memuat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-18027.AH.01.02 Tahun 2013 pada tanggal 8 April 2013.

Perusahaan adalah Badan Usaha Penjamin Infrastruktur (BUPI) yang beroperasi sebagai suatu entitas "single window" dalam melakukan proses, penilaian (*appraisal*) dan penyusunan struktur (*structuring*) untuk semua penjaminan yang diberikan Pemerintah Indonesia pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Perusahaan dapat menerapkan berbagai jenis dan struktur penjaminan – yang disokong (*backstop*) oleh, bila diperlukan, neraca Perusahaan, Pemerintah Republik Indonesia, lembaga keuangan multilateral, atau kombinasinya – untuk mewujudkan fleksibilitas operasional yang lebih baik dalam penyediaan penjaminan infrastruktur.

Tujuan utama dari Perusahaan adalah untuk:

- a) Memastikan proyek infrastruktur yang didukung memiliki struktur yang baik sehingga dapat meningkatkan kelayakan kredit dan proyek infrastruktur;
- b) Memfasilitasi pengembangan proyek Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (yaitu Kementerian/ Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah) dengan menyediakan instrumen finansial untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur dan jasa konsultasi terkait;

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed of Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM No. 29 dated 30 December 2009. The Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010, dated 27 January 2010.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the Company is engaged to provide the guarantees for the Public Private Partnership ("PPP") projects in the infrastructure sector.

The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment was in accordance with Notarial Deed of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. No.59 dated 11 April 2013 concerning change of Articles of Association. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republik of Indonesia through his decree No. AHU-18027.AH.01.02 Year 2013 dated 8 April 2013.

The Company operates as a "single window" entity for the processing, appraisal and structuring of all guarantees provided by the Government of Indonesia for infrastructure projects proposed by the Government's Contracting Agencies ("CA"). The Company employs various types and structures of guarantees – back-stopped, as necessary, by the Company balance sheet, the Government of Indonesia ("GOI") balance sheet, a multilateral financing agency or a combination thereof – for greater operational flexibility in providing guarantees for infrastructure projects.

The primary objectives of the Company are:

- a) Ensuring the proper structuring of infrastructure projects in order to improve creditworthiness and quality of the respective infrastructure projects;
- b) Facilitating the deal flow for Contracting Agencies (i.e. Ministries, SOEs, Regional Governments) through the provision of financial instruments to improve creditworthiness of infrastructure projects, and the related project consultancy services;

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/2 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

- c) Mengembangkan tata kelola yang baik dari implementasi penyediaan instrumen finansial untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur;
- d) Memagari kewajiban kontinjensi Pemerintah sehubungan dengan pemberian jaminan Pemerintah.

Perusahaan berdomisili di Indonesia, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 14, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010.

Berdasarkan akta notaris Arry Supratno, S.H. No. 19 tanggal 4 September 2013, Perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat Luky Alfirman sebagai Komisaris Utama Perusahaan menggantikan Freddy Rikson Saragih.

Pada tanggal 31 Desember 2013 and 2012, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2013
Komisaris Utama	Luky Alfirman
Komisaris	Ayu Sukorini
Direktur Utama	Sinthya Roesly
Direktur	Armand Hermawan Yadi Jaya Ruchandi

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan memiliki 43 pegawai tetap (2012: 35 pegawai tetap) (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Perusahaan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 7 Maret 2014.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

1. GENERAL (continued)

- c) Developing good governance practices in the provision of financial instruments in order to improve project viability;
- d) To ring-fence the Government's contingent liabilities related to the provision of guarantees by the Government.

The Company is domiciled in Indonesia, its office is located at Sampoerna Strategic Square, North Tower, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta. The Company started its commercial operations in 2010.

Based on notarial deed No. 19 of Arry Supratno, S.H. dated 4 September 2013, the Company through General Meeting of Shareholders appointed Luky Alfirman as President Commissioner replacing Freddy Rikson Saragih.

As at 31 December 2013 and 2012, the members of the Company's Board of Commissioners and Directors were as follows:

	2012
Freddy Rikson Saragih	President Commissioner
Ayu Sukorini	Commissioner
Sinthya Roesly	President Director
Armand Hermawan Yadi Jaya Ruchandi	Directors

As at 31 December 2013, the Company has 43 permanent employees (2012: 35 permanent employees) (unaudited).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

These financial statements were authorised to be issued by the Directors on 7 March 2014.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the Company's financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/3 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah yang terdekat. Seluruh angka dalam mata uang selain Rupiah dinyatakan dalam jumlah penuh.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the financial
statements**

The financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis. The financial statements are prepared under the historical cost convention, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The cash flows statement is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with remaining maturities of three months or less.

Figures in the financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated. Amounts in currencies other than Rupiah are stated in full amount.

The accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 December 2013, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/4 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 4.

Penerapan standar dan interpretasi baru atau penyesuaian, yang relevan dengan operasi Perusahaan dan memberikan dampak pada laporan keuangan Perusahaan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 60 - Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Pada tanggal 19 Oktober 2012, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) mengeluarkan penyesuaian atas PSAK 60 dan akan efektif pada tanggal 1 Januari 2013. Penerapan dini atas penyesuaian PSAK 60 diijinkan. Perusahaan telah memutuskan melakukan penerapan dini atas PSAK 60 di tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012, sehingga tidak terdapat dampak untuk tahun laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2013.

Revisi atas PSAK 38, "Kombinasi Bisnis pada Entitas Sepengendali", PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Penyajian", dan pencabutan atas PSAK 51, "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi" yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2013 tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan periode berjalan atau tahun sebelumnya.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)**

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

Implementation of the new or revised standards, which are relevant to the Company's operations and have impacts on the Company's financial statements, are as follows:

- SFAS 60 - Financial Instruments: Disclosures

On 19 October 2012, Financial Accounting Standard Board of Indonesian Accountant Institute (DSAK-IAI) issued enhancement to the SFAS 60 which became effective on 1 January 2013. Early implementation of the enhancements was permitted. The Group has decided to early adopt SFAS 60 in the financial year ended 31 December 2012, and therefore it has no impact to the financial statements for the year ended 31 December 2013.

The revisions to SFAS 38, "Business Combinations on Entities under Common Control", SFAS 60 "Financial Instrument: Disclosure", and withdrawal of SFAS 51, "Quasi Reorganisation" with an effective date of 1 January 2013 did not result in changes to the Company's accounting policies and had no effect on the amounts reported for current period or prior financial years.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/5 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Penjabaran mata uang asing

a. Mata uang fungsional dan penyajian

Hal-hal yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

b. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

d. Aset keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori sebagai berikut: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, atau yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan ini pada saat awal pengakuannya.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Foreign currency translation

a. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (the "functional currency").

The financial statements are presented in "Rupiah" (Rp), which is the functional currency of the Company.

b. Transactions and balances

Transactions denominated in foreign currency are converted into Rupiah using the closing exchange rate prevailing at the date of the transactions. At the reporting date, foreign currency monetary assets and liabilities are translated using the closing exchange rate prevailing at that date. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Bank Indonesia. Foreign exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the statement of comprehensive income.

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents includes cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and other short-term highly liquid investments with remaining maturities of three months or less.

d. Financial assets

The Company classifies its financial assets in the following categories: at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for sale. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/6 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

- (i) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan.

- (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, investasi dalam deposito berjangka dan *security deposit*.

- (iii) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditentukan pada kategori ini atau tidak diklasifikasikan pada kategori yang lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada nilai wajar dan keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan perubahan ekuitas hingga dihentikan pengakuannya. Investasi pada obligasi tertentu dan reksadana diklasifikasikan dalam kategori ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets (continued)

- (i) *Financial assets at fair value through profit or loss*

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading, which is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term. The Company has no financial assets that are classified as held for trading.

- (ii) *Loans and receivables*

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The Company's loans and receivables comprise cash and cash equivalents, investment in time deposits and security deposits.

- (iii) *Available-for-Sale ("AFS") financial assets*

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated in this category or not classified in any other categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealised gains or losses recognised in stockholders' equity until the financial assets are derecognised. The Company's investment in certain bonds and mutual funds are classified in this category.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/7 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

- (iv) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Investasi pada obligasi tertentu di klasifikasikan dalam kategori ini.

e. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

<u>Tahun/Years</u>	
Prasarana kantor	3
Peralatan komputer	3
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	3

Nilai sisa aset dan masa manfaat aset tetap ditelaah, dan disesuaikan bila perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi komprehensif selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets (continued)

- (iv) Held-to-Maturity ("HTM") investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that management has the positive intention and ability to hold them to maturity. These financial assets are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method. The Company's investment in certain bonds is classified in this category.

e. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method over the following estimated useful lives:

The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to statement of comprehensive income during the financial period in which they are incurred.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/8 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Jika aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan aset tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

f. Aset tak berwujud

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan diakui sebagai aset tak berwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Aset tak berwujud diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi amortisasinya. Amortisasi aset tak berwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Fixed assets (continued)

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the statement of comprehensive income.

f. Intangible assets

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognised as intangible assets.

Directly attributable costs are capitalised as part of the software product.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of 4 years.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/9 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas. Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode *balance sheet liability*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat ketika surat ketetapan pajak diterima atau, jika mengajukan keberatan/banding, ketika hasil keberatan/banding diputuskan.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Taxation

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the statement of comprehensive income, except to the extent it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity. The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the reporting date.

Deferred income tax is provided in full using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax assets is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretations. Where appropriate, it established provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/10 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Liabilitas imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pensiun

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan kewajiban imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas pasti pada tanggal pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program pensiun yang ada dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah jangka panjang pada tanggal pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial yang jumlahnya lebih besar dari 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti, dibebankan atau dikreditkan ke laporan laba rugi selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan tersebut.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mensyaratkan karyawan tersebut untuk bekerja selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini, biaya jasa lalu akan diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode tersebut.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Employee benefits obligation

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognised when they are accrued to the employees.

Pension benefits

The Company is required to provide a minimum pension benefit as stipulated in Law No.13/2003, which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past services cost. The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of reporting date of Government Bonds that are denominated in the Rupiah currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions when exceeding 10% of defined benefit or 10% of fair value of the programme's asset are charged or credited to income over the average remaining service lives of the relevant employees.

Past-service costs are recognised immediately in the statements of income, unless the changes to the pension plan are conditional on the employees' vesting period. In this case, the past-service costs are amortised on a straight-line basis over the vesting period.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/11 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun (lanjutan)

Biaya jasa kini dibebankan pada saat terjadinya.

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran program pensiun baik karena diwajibkan, berdasarkan kontrak atau sukarela. Namun karena Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 mengharuskan Perusahaan membayar jumlah tertentu kepada para karyawan yang telah memasuki usia pensiun yang ditentukan berdasarkan masa kerja, Perusahaan rentan terhadap kemungkinan untuk membayar kekurangan apabila iuran kumulatif kurang dari jumlah tertentu. Sebagai akibatnya untuk tujuan pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diberlakukan seolah-olah sebagai program imbalan pasti.

Imbalan jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan manfaat imbalan cuti panjang. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan kepada karyawan yang bekerja hingga mencapai masa waktu tertentu berdasarkan Peraturan Perusahaan. Estimasi biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode akuntansi yang pada dasarnya sama dengan metode yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja lainnya.

i. Utang usaha dan lain-lain

Utang usaha dan lain-lain merupakan liabilitas keuangan. Utang usaha dan lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

j. Penyisihan

Provisi diakui saat Perusahaan memiliki kewajiban (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya, dan jumlah liabilitas tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Employee benefits obligation (continued)

Pension benefits (continued)

Current service costs are expensed in the prevailing period.

For defined contribution plans, the Company pays contributions to pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Labour Law No. 13 of 2003 requires an entity to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on, the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount in particular when the cumulative contributions are less than that amount. Consequently for financial reporting purposes, defined contribution plans are effectively treated as if they were defined benefit plans.

Other long-term benefits

The Company provides long service leave. The entitlement to this benefit is usually based on the completion of a certain service period by the employee in accordance with the Company's regulations. The estimated costs of these benefits are recognised over the period of employment, using an accounting method similar to that for other post-employment benefits.

i. Account and other payables

Account and other payables are financial liabilities. Account and other payable is recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

j. Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions are not recognised for future operating losses.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/12 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pendapatan dan beban

Pendapatan dari penjaminan terdiri dari pendapatan premi, dan pendapatan provisi dan komisi.

Pendapatan premi terdiri dari *guarantee fee* dan *processing fee*. Pendapatan dari *guarantee fee* diakui berdasarkan jangka waktu dari periode penjaminan tergantung dari pengaturan dalam kontrak. Pendapatan dari *processing fee* diakui pada saat pendapatan diperoleh.

(i) *Guarantee fee* merupakan pendapatan yang diterima atas jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan jaminan *exposure* oleh Perusahaan.

(ii) *Processing fee* merupakan pendapatan yang diterima atas adanya aktivitas pemrosesan yang dilakukan jika klaim disampaikan kepada pihak penjamin.

Pendapatan provisi dan komisi terdiri dari *arranging fee*, *ceded commission*, dan pendapatan provisi dan komisi lainnya. *Arranging fee* terdiri dari bagian yang dapat dikembalikan dan bagian yang tidak dapat dikembalikan. Pendapatan dari bagian yang tidak dapat dikembalikan dari *arranging fee* diakui pada saat kontrak penjaminan ditandatangani, sementara pendapatan dari bagian yang dapat dikembalikan dari *arranging fee* diakui pada saat proyek dimulai (*financial close*), terlepas dari kelangsungan penjaminan proyek itu sendiri di masa yang akan datang. *Ceded commission* adalah pendapatan dari peningkatan struktur penjaminan yang dilakukan dengan pihak penjamin lain. Pendapatan dari *ceded commission* dan pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat diperoleh.

Pendapatan dari pendapatan bunga deposito dan investasi pendapatan tetap diakui dengan menggunakan metode bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Revenue and expenses

Revenue from guarantee consists of premium income, and fees and commissions.

Premium income consists of guarantee fee and processing fee. Revenue from guarantee fee is recognised based on the duration of guarantee period depending on the arrangement in the contract. Revenue from processing fee is recognised when earned.

(i) *Guarantee fee is earned for guarantee provided to the beneficiaries on the basis of guarantee exposure of the Company.*

(ii) *Processing fee is earned for services process if there is a claim submitted to the guarantor.*

Fees and commissions consist of arranging fee, ceded commission, and other fees and commissions. Arranging fee consists of a refundable and non-refundable fee portion. Revenue from a non-refundable portion of arranging fee is recognised upon signing of the guarantee contract, while revenue from a refundable portion of arranging fee is recognised upon the commencement of the project (financial close), regardless the continuance of the guarantee projects itself in the future. Ceded commission is revenue earned from the enhancement of guarantee structure with other guarantor/insurance parties. Revenue from ceded commission and other fees and commissions is recognised as incurred.

Revenue from interest income of time deposits and investment in fixed income are recognised using the effective interest method.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/13 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Biaya – biaya yang berhubungan langsung dengan proses penjaminan, ditangguhkan terlebih dahulu. Biaya tersebut akan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif Perusahaan, ketika Perusahaan mengakui pendapatan penjaminan.

l. Transaksi dengan pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (revisi 2010), tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

m. Biaya pinjaman

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atas seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Faktor risiko keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Revenue and expenses (continued)

Costs that are directly related to the guarantee process will be deferred. The costs will be expensed to the Company's statement of comprehensive income, when Company recognised revenue from guarantee.

l. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (revised 2010), "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

m. Borrowing fees

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment and amortised over the period of the facility to which it relates.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Financial risk factors

The main risks arising from the Company's financial instruments are market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Management reviews and agrees policies for managing each of these risks. The Company applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial markets on the Company's financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/14 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(1) Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena transaksi utama Perusahaan dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material. Oleh karena itu perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal pelaporan tidak akan berdampak signifikan terhadap laba rugi setelah pajak Perusahaan untuk tahun berjalan.

(ii) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas atau nilai wajar di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Aset Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah investasi. Investasi Perusahaan terutama terdiri dari deposito dan investasi dengan pendapatan tetap. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi pendapatan bunga Perusahaan, oleh karena deposito Perusahaan memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun (jangka pendek), sementara pengelolaan dana investasi lainnya merupakan investasi dengan pendapatan tetap (*fixed income*).

Lebih lanjut, perubahan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi komprehensif Perusahaan karena investasi Perusahaan dikategorikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(1) Market risk

(i) Foreign currency exchange rate risk

The Company has no significant foreign exchange risks since the Company's transactions are performed using the Company's functional currency. As at 31 December 2013 and 2012, the Company has no material financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies. Therefore, changes in foreign exchange against the Company's functional currency will not significantly impact to the Company's current year profit after tax.

(ii) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Company's financial assets which are exposed to interest rate risk are investments. The Company's investments are mostly consist of time deposit and fixed income investment. The changes due to higher or lower interest rate in market will not significantly impact the Company's time deposit, which will mature within one year (short term). While most of other investments are fixed rate investment.

Moreover, the changes in interest rate will not impact the Company's profit and loss due to the financial assets are classified as available-for-sale investments and held-to-maturity investments.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/15 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(2) Risiko kredit

Perusahaan tidak mempunyai risiko kredit yang signifikan karena dalam tahun berjalan piutang Perusahaan dominan berasal dari pendapatan bunga dari penempatan deposito.

Deposito dan kas di bank ditempatkan pada bank-bank domestik yang memiliki reputasi yang tinggi dengan rating AAA Rp 2.007.879.298; AA Rp 220.000.000 dan A Rp 1.560.000.000 pada tanggal 31 Desember 2013 (31 Desember 2012: AAA Rp 786.991.782; AA Rp 2.174.526.103 dan A Rp 1.101.500.000).

Untuk investasi yang ditempatkan pada efek hutang dengan pendapatan tetap, Perusahaan menempatkan investasinya pada surat berharga hutang dengan peringkat paling rendah AA untuk korporasi dan peringkat paling rendah A untuk Badan Usaha Milik Negara.

Eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 3.861.052.807 untuk investasi, Rp 22.230.067 untuk piutang usaha, Rp 1.198.116 untuk uang jaminan yang dapat dikembalikan, dan Rp 1.217.879.298 untuk kas dan setara kas (31 Desember 2012: Rp 2.141.909.047 untuk investasi, Rp 15.448.222 untuk piutang bunga, dan Rp 2.746.517.885 untuk kas dan setara kas).

Semua aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai sehingga Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(2) Credit risk

The Company has no significant credit risk because in the current year the Company's receivables predominantly arise from interest income from placement of time deposits.

Time deposits classified as cash and cash equivalent and investments are placed with highly reputable domestic banks which are rated AAA Rp 2,007,879,298; AA Rp 220,000,000 and A Rp 1,560,000,000 as at 31 Desember 2013 (31 Desember 2012: AAA Rp 786,991,782; AA Rp 2,174,526,103 and A Rp 1,101,500,000).

For placement of investment in fixed income debt securities, the Company places its investments on debt securities with minimum rating of AA for corporate and minimum rating of A for State-Owned Enterprise.

The maximum credit risk on the Company's financial assets as at 31 December 2013 are Rp 3,861,052,807 for investments, Rp 22,230,068 for other receivables, Rp 1,198,116 for refundable deposits and Rp 1,217,879,298 for cash and cash equivalents (31 Desember 2012: Rp 2,141,909,047 for investments, Rp 15,448,222 for interest receivables, and Rp 2,746,517,885 for cash and cash equivalents).

All of the Company's financial assets as at 31 Desember 2013 and 2012 are neither past due nor impaired. Therefore, the Company has provided no allowances for impairment losses.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/16 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(3) Risiko likuiditas

Perusahaan tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan. Risiko likuiditas timbul ketika Perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen pengelolaan risiko likuiditas termasuk di dalamnya menjaga kecukupan kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memantau arus kas perkiraan dan aktual dan menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, liabilitas keuangan Perusahaan terutama terdiri dari utang usaha yang jumlahnya tidak material terhadap aset likuid Perusahaan. Perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas dan investasi.

b. Manajemen risiko modal

Tujuan Perusahaan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

Perusahaan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perusahaan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(3) Liquidity risk

The Company has no significant liquidity risk. Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

As at 31 December 2013 and 2012, the Company's financial liability is mainly account payables which are immaterial to the total Company's liquid assets. The Company is highly liquid as it has financial instruments in form of cash and cash equivalents and investments.

b. Capital risk management

The Company's objective when managing capital is to safeguard its ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

The Company periodically reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may use internal funding to reduce debt.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/17 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Estimasi nilai wajar

c. Fair value estimation

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan kewajiban keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya dikarenakan jatuh temponya dalam jangka pendek atau dikarenakan instrumen keuangan tersebut dikenakan tingkat suku bunga pasar.

Management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortised cost in the financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or their carry market rates of interest.

Tabel di bawah ini menganalisis instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan metode penilaian. Perbedaan dijelaskan sebagai berikut:

The table below analyses financial instruments carried at fair value, by level of valuation method. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2);
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2);*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).*

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas Perusahaan yang diukur sebesar nilai wajar pada 31 Desember 2013 dan 2012.

The following table presents the Company's asset and liabilities that are measured at fair value at 31 December 2013 and 2012.

2013					
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset keuangan tersedia untuk dijual					Available-for-sale financial assets
- Investasi pada instrumen utang	445,698,555	-	-	445,698,555	Debt Investments -
Reksadana	101,505,662	-	-	101,505,662	Mutual funds
Jumlah Aset	<u>547,204,217</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>547,204,217</u>	Total Assets
2012					
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset keuangan tersedia untuk dijual					Available-for-sale financial assets
- Investasi pada instrumen utang	257,219,302	-	-	257,219,302	Debt Investments -
Reksadana	104,686,245	-	-	104,686,245	Mutual funds
Jumlah Aset	<u>361,905,547</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>361,905,547</u>	Total Assets

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/18 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING**

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Liabilitas imbalan kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar karyawan dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Actual results may differ from these estimates. The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

Employee benefits obligation

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

The Company determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

For the rate of future salary increases, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/19 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**Beban tangguhan dan penyisihan
penurunan nilai**

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi keseluruhan bukti obyektif bahwa proyek-proyek yang dibentuk dan memiliki beban tangguhan masih dapat direalisasikan sebagai pendapatan penjaminan pada setiap akhir periode pelaporan. Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam menentukan apakah proyek-proyek yang sedang berlangsung dapat mencapai penandatanganan perjanjian, yang terutama berdasarkan kondisi terkini yang ada pada akhir tiap periode pelaporan.

Penyisihan penurunan nilai atas beban tangguhan dibentuk ketika terdapat keraguan atas realisasi proyek atau pemulihan dari beban tangguhan. Kondisi spesifik proyek, strategi penyelesaian dan estimasi arus kas dipertimbangkan dalam pembentukan penyisihan penurunan nilai berdasarkan estimasi terbaik manajemen.

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

**Deferred charges and provision for
impairment losses**

The Company continually evaluates objective evidences of projects that had deferred charges could be recognised as revenues as at the end of each reporting period. The Company uses its judgement to assess whether the project will achieve financial close, that are mainly based on latest conditions existing at the end of each reporting period.

Provision for impairment losses on deferred charges is provided when there is uncertainty on project realization or recoverability of deferred charges. Specific condition on project, settlement strategy and estimated cash flow are considered in assessing the provision for impairment losses based on management's best estimates.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Kas	130,475	125,547	Cash on hand
Bank	14,879,298	4,742,885	Cash in banks
Deposito	<u>1,203,000,000</u>	<u>2,741,775,000</u>	Time deposit
	<u>1,218,009,773</u>	<u>2,746,643,432</u>	

Deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang saat perolehan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 7,50% - 8,50% per tahun di 2013 (2012: 5,75% - 8,50%).

Informasi terkait pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 20.

Time deposits with remaining maturities of three months or less earned interest rates ranging between 7.50% - 8.50% per annum in 2013 (2012: 5.75% - 8.50%).

Information in respect of related party is disclosed in Note 20.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/20 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

6. INVESTASI

6. INVESTMENTS

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Deposito	2,570,000,000	1,316,500,000	<i>Time deposits</i>
Investasi dengan pendapatan tetap			<i>Fixed Income</i>
- Investasi tersedia untuk dijual	445,698,555	257,219,302	<i>Available-for-sale investments -</i>
- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo	591,622,785	463,857,306	<i>Held-to-maturity investments -</i>
- Investasi diukur pada biaya perolehan	152,225,805	-	<i>Investments at cost -</i>
Reksadana	<u>101,505,662</u>	<u>104,686,245</u>	<i>Mutual funds</i>
	<u>3,861,052,807</u>	<u>2,142,262,853</u>	

Informasi terkait pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 20.

Information in respect of related party is disclosed in Note 20.

a) Deposito

a) Time deposits

Deposito dengan periode jatuh tempo lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 7,75% - 11,00% per tahun di 2013 (2012: 7,00% - 9,00%).

Time deposits with remaining maturities more than 3 months and up to 6 months period and earned interest rates ranging between 7.75% - 11.00% per annum in 2013 (2012: 7.00% - 9.00%).

b) Investasi dengan pendapatan tetap

b) Fixed income

- Investasi tersedia untuk dijual

- Available-for-sale investments

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Obligasi Pemerintah	218,794,440	-	<i>Government Bonds</i>
Obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	140,521,025	118,842,402	<i>State-Owned Enterprise bonds</i>
Obligasi korporasi	46,790,000	75,000,000	<i>Corporate bonds</i>
Obligasi bank dan subordinasi	<u>39,593,090</u>	<u>63,376,900</u>	<i>Bank and subordinated bonds</i>
	<u>445,698,555</u>	<u>257,219,302</u>	

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

- Held-to-maturity investments

Investasi pada obligasi dengan periode jatuh tempo 3 - 20 tahun dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 6,15% - 12,55% per tahun.

Investments in bonds with 3 - 20 years maturities and earned interest rates ranging between 6.15% - 12.55% per annum.

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Obligasi Pemerintah	-	40,966,573	<i>Government Bonds</i>
Obligasi BUMN	241,026,421	168,350,869	<i>State-Owned Enterprise bonds</i>
Obligasi bank dan subordinasi	<u>350,596,364</u>	<u>254,539,864</u>	<i>Bank and subordinated bonds</i>
	<u>591,622,785</u>	<u>463,857,306</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/21 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

6. INVESTASI (lanjutan)

b) Investasi dengan pendapatan tetap (lanjutan)

- Investasi diukur pada biaya perolehan

Investasi diukur pada biaya perolehan merupakan investasi pada obligasi sukuk yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".

	<u>2013</u>
Obligasi Pemerintah	40,912,293
Obligasi BUMN	<u>111,313,512</u>
	<u>152,225,805</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa semua investasi dapat dipulihkan, dan tidak ada cadangan kerugian yang diperlukan atas penurunan nilai investasi pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

6. INVESTMENTS (continued)

b) Fixed income (continued)

- Investments at cost

Investments at cost represents investments in Sukuk bonds which is recorded in accordance with SFAS 110 "Accounting for Sukuk".

	<u>2012</u>	
	-	Government Bonds
	-	State-Owned Enterprise bonds
	-	

Management believes that all investments are recoverable, and no provision for impairment of investments is necessary as at 31 December 2013 and 2012.

7. PIUTANG USAHA

Piutang usaha terutama terdiri dari piutang atas pendapatan bunga deposito dan obligasi yang belum diterima.

Informasi terkait pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 20.

7. ACCOUNT RECEIVABLES

Account receivables mainly represent interest receivables from time deposits and bonds.

Information in respect of related party is disclosed in Note 20.

8. ASET TETAP

8. FIXED ASSETS

	2013					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Prasarana kantor	5,315,040	711,287	-	-	6,026,327	Leasehold improvement
Peralatan komputer	1,254,862	705,715	(12,650)	-	1,947,927	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	355,776	169,142	-	-	524,918	Office equipments, furnitures and fixtures
	6,925,678	1,586,144	(12,650)	-	8,499,172	
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated depreciation:
Prasarana kantor	(2,753,895)	(1,365,217)	-	-	(4,119,112)	Leasehold improvement
Peralatan komputer	(804,575)	(397,394)	12,650	-	(1,189,319)	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(202,703)	(118,630)	-	-	(321,333)	Office equipments, furnitures and fixtures
	(3,761,173)	(1,881,241)	12,650	-	(5,629,764)	
Nilai buku	3,164,505				2,869,408	Net book value

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/22 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSETS (continued)

2012						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Prasarana kantor	3,521,571	1,793,469	-	-	5,315,040	Leasehold improvement
Peralatan komputer	243,053	266,254	-	745,555	1,254,862	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	1,245,842	98,542	-	(988,608)	355,776	Office equipments, furnitures and fixtures
	<u>5,010,466</u>	<u>2,158,265</u>	<u>-</u>	<u>(243,053)</u>	<u>6,925,678</u>	
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated depreciation:
Prasarana kantor	(1,107,523)	(1,646,372)	-	-	(2,753,895)	Leasehold improvement
Peralatan komputer	(12,630)	(358,440)	-	(433,505)	(804,575)	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(545,439)	(103,400)	-	446,136	(202,703)	Office equipments, furnitures and fixtures
	<u>(1,665,592)</u>	<u>(2,108,212)</u>	<u>-</u>	<u>12,631</u>	<u>(3,761,173)</u>	
Nilai buku	<u>3,344,874</u>				<u>3,164,505</u>	Net book value

9. ASET TAK BERWUJUD

9. INTANGIBLE ASSETS

2013						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Aset dalam penyelesaian	-	1,699,290	-	-	1,699,290	Construction in progress
Piranti lunak	268,066	85,175	-	-	353,241	Software
	<u>268,066</u>	<u>1,784,465</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,052,531</u>	
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortisation:
Piranti lunak	(78,605)	(81,892)	-	-	(160,497)	Software
	<u>(78,605)</u>	<u>(81,892)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(160,497)</u>	
Nilai buku	<u>189,461</u>				<u>1,892,034</u>	Net book value

2012						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Piranti lunak	-	25,013	-	243,053	268,066	Software
	<u>-</u>	<u>25,013</u>	<u>-</u>	<u>243,053</u>	<u>268,066</u>	
Akumulasi amortisasi:						Accumulated amortisation:
Piranti lunak	-	(65,974)	-	(12,631)	(78,605)	Software
	<u>-</u>	<u>(65,974)</u>	<u>-</u>	<u>(12,631)</u>	<u>(78,605)</u>	
Nilai buku	<u>-</u>				<u>189,461</u>	Net book value

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/23 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

10. BEBAN TANGGUHAN

10. DEFERRED EXPENSES

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Beban tangguhan	50,731,994	41,460,284	<i>Deferred expenses</i>
Penyisihan penurunan nilai	<u>(13,386,382)</u>	<u>-</u>	<i>Provision for impairment losses</i>
	<u>37,345,612</u>	<u>41,460,284</u>	

Beban tangguhan terutama merupakan biaya *advisory* yang terkait langsung dengan kegiatan pemrosesan dan pengaturan penjaminan jangka panjang dan akan dibebankan pada saat pendapatan dari penjaminan tersebut diakui.

Deferred expenses mainly represent advisory costs which directly attributable to the processing and arranging activities in providing long-term guarantees and will be expensed upon the recognition of such fees.

Pada tahun 2013, Perusahaan telah melakukan pengakuan biaya atas beban tangguhan sebesar Rp 8.133.373 (2012: nihil) atas suatu proyek yang tidak lagi menyertakan fasilitas penjaminan (lihat Catatan 19). Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

In 2013, the Company had recognised expenses of Rp 8,133,373 (2012: nil) related to deferred expenses for a particular project, which no longer provide a guarantee facility (refer to Note 19). Management believes that the provision for impairment losses on deferred expenses is adequate.

Manajemen berkeyakinan bahwa proyek-proyek yang sedang berlangsung, yang terkait dengan beban tangguhan, akan dapat mencapai penandatanganan perjanjian penjaminan. Oleh karena itu beban tangguhan terus diakui di laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

Management believes that outstanding projects, related to deferred expenses, could achieve the signing of guarantee of the project. Therefore, the deferred expenses continue to be recognised in the Company's statement of financial position as at 31 December 2013 and 2012.

11. UTANG USAHA

11. ACCOUNT PAYABLES

Utang usaha terutama merupakan pembayaran yang belum dilakukan untuk jasa konsultasi terkait dengan provisi penjaminan.

Account payables mainly represent payables for advisory related to the guarantee provision.

12. PERPAJAKAN

12. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid income tax

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Pajak penghasilan badan			<i>Corporate income tax:</i>
- 2013	11,619,069	-	<i>2013 -</i>
- 2012	<u>505,858</u>	<u>505,858</u>	<i>2012 -</i>
	<u>12,124,927</u>	<u>505,858</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/24 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Pajak penghasilan badan	968,256	56,206	Corporate income tax
Pajak lain-lain:			Other taxes:
- Pasal 21	1,816,004	1,422,032	Article 21 -
- Pasal 23 dan 4(2)	48,742	165,797	Article 23 and 4(2) -
- Pajak Pertambahan Nilai	<u>201,427</u>	<u>142,573</u>	Value Added Tax -
	<u>3,034,429</u>	<u>1,786,608</u>	

c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan

c. Income tax expense/(benefit)

Beban/(manfaat) pajak Perusahaan terdiri dari sebagai berikut:

Tax expenses/(benefit) of the Company consist of the following:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Pajak penghasilan final	75,301,666	60,488,635	Final income tax
Pajak kini	-	-	Current tax
Manfaat pajak tangguhan	<u>(20,361,366)</u>	<u>(12,292,616)</u>	Deferred tax benefit
	<u>54,940,300</u>	<u>48,196,019</u>	

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the tax expense and the amounts computed by applying the prevailing tax rates to profit before income tax is as follows:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>304,700,288</u>	<u>261,574,088</u>	Profit before income tax
Beban pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	76,175,072	65,393,522	Tax calculated at applicable tax rate
Pengaruh atas:			Effects of:
- Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	(98,442,095)	(78,287,591)	Revenues subjected to - final income tax
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan	<u>1,905,657</u>	<u>601,453</u>	Non-deductible expenses -
	<u>(20,361,366)</u>	<u>(12,292,616)</u>	
Pajak penghasilan final	<u>75,301,666</u>	<u>60,488,635</u>	Final income tax
Beban pajak penghasilan	<u>54,940,300</u>	<u>48,196,019</u>	Income tax expenses

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/25 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. Beban/(manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)			c. Income tax expense/(benefit) (continued)
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:			<i>A reconciliation between profit before income tax and the Company's taxable income is as follows:</i>
	2013	2012	
Laba sebelum pajak penghasilan	304,700,288	261,574,088	<i>Profit before income tax</i>
Beda waktu	15,721,473	4,921,834	<i>Timing differences</i>
Beda tetap	7,622,632	2,405,850	<i>Permanent differences</i>
Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	<u>(393,768,382)</u>	<u>(313,150,364)</u>	<i>Revenues subjected to final income tax</i>
Kerugian pajak berjalan	(65,723,989)	(44,248,592)	<i>Current tax loss</i>
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	<u>(50,540,723)</u>	<u>(6,292,131)</u>	<i>Tax loss carry forward</i>
Akumulasi kerugian pajak	<u>(116,264,712)</u>	<u>(50,540,723)</u>	<i>Accumulated tax losses</i>
Akumulasi kerugian pajak sebesar Rp 116.264.712 terdiri dari rugi pajak tahun 2013, 2012, dan 2010 masing-masing sebesar Rp 65.723.989, Rp 44.248.592, dan Rp 6.292.131.			<i>Accumulated tax losses amounting to Rp 116,264,712 consist of tax loss for fiscal year 2013, 2012, and 2010 amounting to Rp 65,723,989, Rp 44,248,592, and Rp 6,292,131, respectively.</i>

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax asset

	2013				
	1 Januari/ January 2013	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ Credited to statements of income	31 Desember/ December 2013	
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	12,635,181	-	16,430,997	29,066,178	<i>Tax loss carry forward</i>
Penyisihan gaji dan bonus	1,664,064	-	(143,011)	1,521,053	<i>Provision for salaries and bonus</i>
Beban penyisihan imbalan kerja	404,443	-	723,699	1,128,142	<i>Provision for employee benefits obligation</i>
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	288,710	-	3,084	291,794	<i>Differences between accounting and tax fixed assets net book value</i>
Penyisihan penurunan nilai	-	-	3,346,596	3,346,596	<i>Provision for impairment losses</i>
Perubahan bersih aset keuangan tersedia untuk dijual	<u>(639,032)</u>	<u>639,032</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Change in fair value of available-for-sale financial asset</i>
	<u>14,353,366</u>	<u>639,032</u>	<u>20,361,365</u>	<u>35,353,763</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/26 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax asset (continued)

	2012				
	1 Januari/ <i>January 2012</i>	Dikreditkan ke ekuitas/ <i>Credited to equity</i>	Dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif/ <i>Credited to statements of comprehensive income</i>	31 Desember/ <i>December 2012</i>	
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	1,573,033	-	11,062,148	12,635,181	<i>Tax loss carry forward</i>
Penyisihan gaji dan bonus	914,453	-	749,611	1,664,064	<i>Provision for salaries and bonus</i>
Beban penyisihan imbalan kerja	166,307	-	238,136	404,443	<i>Provision for employee benefits obligation</i>
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	45,989	-	242,721	288,710	<i>Differences between accounting and tax fixed assets net book value</i>
Perubahan bersih aset keuangan tersedia untuk dijual	-	(639,032)	-	(639,032)	<i>Change in fair value of available-for-sale financial asset</i>
	<u>2,699,782</u>	<u>(639,032)</u>	<u>12,292,616</u>	<u>14,353,366</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan mempunyai akumulasi kerugian pajak yang tidak digunakan senilai Rp 116.264.712 (2012: Rp 50.540.723) dan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Berdasarkan rencana bisnis yang telah disetujui, Manajemen berkeyakinan bahwa kemungkinan besar bahwa aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi pajak dan perbedaan temporer dapat dikompensasi dengan penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

As at 31 December 2013, the Company has unused accumulated tax losses from 2010 fiscal year amounting to Rp 116.2 billion (2012: Rp 50.1 billion) (full amount) and recognised as deferred tax assets. On the basis of the approved business plans, the Company's management believes it is probable that the deferred tax arising from tax loss carry forward and temporary differences can be offset against future taxable profits.

e. Pemeriksaan pajak

e. Tax audit

Pada tanggal 23 Oktober 2013, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak terkait lebih bayar pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2012. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, pemeriksaan pajak masih dalam proses.

On 23 October 2013, the Company received tax audit letter related to overpayment of corporate income tax for fiscal year 2012. Up to the date of these financial statements, the tax audit is still in process.

f. Administrasi pajak di Indonesia

f. Tax administration in Indonesia

Menurut Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Sebelum 2008, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau sampai akhir tahun 2013, mana yang lebih dahulu.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. Prior to 2008, the Director General of Tax ("DGT") could assess or amend taxes within ten years of the tax becoming due, or until the end of 2013, whichever is earlier.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/27 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Administrasi pajak di Indonesia (lanjutan)

Undang-undang juga mengatur untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, DJP dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

12. TAXATION (continued)

f. Tax administration in Indonesia (continued)

There are new rules applicable to fiscal year 2008 and subsequent years stipulating that the DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

13. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR, PENYISIHAN DAN UTANG LAIN-LAIN

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Bonus dan gaji	6,084,211	6,656,255
Program kemitraan dan bina lingkungan	2,270,347	1,130,592
Beban advisory	1,406,374	13,294,025
Lainnya	<u>59,334</u>	<u>326,255</u>
	<u>9,820,266</u>	<u>21,407,127</u>

*Bonus and salary
Corporate social responsibility
programme
Advisory fees
Others*

13. ACCRUED EXPENSES, PROVISIONS AND OTHER PAYABLES

14. PENDAPATAN TANGGUHAN

Pendapatan tangguhan merupakan bagian dari *arranging fee* yang dapat dikembalikan dan akan diakui pada saat proyek dimulai (*financial close*).

14. UNEARNED INCOME

Unearned income represents a portion from a refundable arranging fee and will be recognised upon the commencement of the project (financial close).

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Nilai saat ini dari liabilitas imbalan kerja	3,898,060	2,403,080
Keuntungan/(kerugian) aktuarial yang belum diakui	<u>614,509</u>	<u>(785,309)</u>
	<u>4,512,569</u>	<u>1,617,771</u>

*Present value of defined obligation
Unrecognised actuarial gain/(loss)*

Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Biaya jasa kini	2,676,388	880,857
Beban bunga	147,356	60,776
Biaya jasa lalu	32,347	-
Beban amortisasi kerugian aktuarial yang belum diakui	<u>38,707</u>	<u>10,872</u>
	<u>2,894,798</u>	<u>952,505</u>

Net expense recognised in statement of comprehensive income is as follows:

*Current service cost
Interest cost
Past service cost
Amortisation of unrecognised actuarial loss*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/28 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

15. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dihitung oleh PT Towers Watson Purbajaga, aktuaris independen pada laporannya masing-masing tertanggal 26 Pebruari 2014 dan 26 Pebruari 2013 menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2013</u>
Tingkat diskonto	9.00%
Tingkat kenaikan gaji	7%
Tingkat mortalita	TMI '11
Usia pensiun normal	55

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>
Saldo awal tahun	1,617,771
Provisi pada tahun berjalan	<u>2,894,798</u>
	<u>4,512,569</u>

Penyesuaian pengalaman pada liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>
Nilai saat ini dari liabilitas imbalan kerja	3,898,060
Nilai wajar aset program	<u>-</u>
	<u>3,898,060</u>
Penyesuaian pengalaman pada Liabilitas imbalan kerja	<u>(1,361,111)</u>
Penyesuaian pengalaman pada aset program	<u>-</u>

15. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

The employee benefits obligation as of 31 December 2013 and 2012 is computed by PT Towers Watson Purbajaga, an independent actuary whose reports dated 26 February 2014 and 26 February 2013, respectively, using the "Projected Unit Credit" method used the following assumptions:

	<u>2012</u>	
	6.15%	Discount rate
	8%	Salary increment rate
	TMI '11	Mortality rate
	55	Retirement age

The movement in the employee benefits obligation is as follows:

	<u>2012</u>	
	665,266	Balance at the beginning of the year
	<u>952,505</u>	Provision in the current year
	<u>1,617,771</u>	

The experience adjustment on employee benefits obligation is as follows:

	<u>2012</u>	
	2,403,080	Present value of defined obligation
	<u>-</u>	Fair value of plan assets
	<u>2,403,080</u>	
Penyesuaian pengalaman pada Liabilitas imbalan kerja	<u>557,126</u>	Experience adjustment on employee benefits obligation
Penyesuaian pengalaman pada aset program	<u>-</u>	Experience adjustment on plan assets

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/29 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

16. SHARE CAPITAL

The composition of Company's shareholder as at 31 December 2013 and 2012 is as follows:

	2013 dan/and 2012			
	Jumlah saham/ Number of shares	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai/ Value	
Pemerintah				Government of the
Republik Indonesia	<u>4,500,000</u>	<u>100</u>	<u>4,500,000,000</u>	Republic of Indonesia

Pada tanggal 17 Desember 2012, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan, telah disetorkan tambahan modal saham sebesar Rp 1 triliun (nilai penuh).

On 17 December 2012, in accordance with Government Regulation No. 68 Year 2012 regarding addition of share capital of the Government of Indonesia into share capital of the Company, share capital has increased by amounting to Rp 1 trillion (full amount).

Berdasarkan Hasil Keputusan Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris Aryanti Artisari, SH, MKn No. 145 tanggal 30 Agustus 2012, Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp 9 triliun (nilai penuh).

Based on the Circular Meeting of Stockholders as covered by notarial deed No. 145 of Aryanti Artisari, SH, MKn on 30 August 2012, the Government of Indonesia as the Company's shareholder approved additional authorised share capital into Rp 9 trillion (full amount).

**17. SALDO LABA YANG DITENTUKAN
PENGUNAANNYA DAN ALOKASI UNTUK
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN**

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

**17. APPROPRIATED RETAINED EARNING AND
ALLOCATION FOR CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY PROGRAMME**

Based on Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007, the Company shall appropriate a certain amount of its profit in each year for general reserve if there are available retained earnings, until the general reserve has reached at least 20% of the issued and paid-up capital.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 10.650.000 sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 20.800.000 Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 1 Agustus 2013.

As of 31 December 2013, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 10,650,000 as the reserve balance became Rp 20,800,000 This general reserve was approved in the Circular Decision General meeting of Shareholders dated 1 August 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 7.850.000 sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 10.150.000. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Juli 2012.

As of 31 December 2012, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 7,850,000 as the reserve balance became Rp 10,150,000. This general reserve was approved in the Circular Decision General Meeting of Shareholders dated 20 July 2012.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/30 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**17. SALDO LABA YANG DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA DAN ALOKASI UNTUK
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN (lanjutan)**

Manajemen bermaksud untuk meningkatkan cadangan tersebut di masa datang.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan mengalokasikan laba setelah pajak tahun 2012 sebesar Rp 1.450.000 untuk program kemitraan dan bina lingkungan. Alokasi tersebut ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 1 Agustus 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan mengalokasikan laba setelah pajak tahun 2011 sebesar Rp 1.450.000 untuk program kemitraan dan bina lingkungan. Alokasi tersebut ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Juli 2012.

**17. APPROPRIATED RETAINED EARNING AND
ALLOCATION FOR CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY PROGRAMME (continued)**

Management plans to increase the general reserve in the future

As of 31 December 2013, the Company has allocated profit after tax year 2012 amounting to Rp 1,450,000 for corporate social responsibility programme. This allocation was approved in the Circular Decision General Meeting of Shareholders dated 1 August 2013.

As of 31 December 2012, the Company has allocated profit after tax year 2011 amounting to Rp 1,450,000 for corporate social responsibility programme. This allocation was approved in the Circular Decision General Meeting of Shareholders dated 20 July 2012.

18. PENDAPATAN

18. REVENUES

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Pendapatan penjaminan	-	-	<i>Revenue from guarantee</i>
Pendapatan pengelolaan dana:			<i>Income from investments:</i>
- Deposito	307,924,140	239,551,041	<i>Time deposit -</i>
- Investasi dengan pendapatan tetap:			<i>Fixed income:-</i>
- Pendapatan bunga	81,499,795	54,929,669	<i>Interest income -</i>
- Laba atas penjualan obligasi	<u>3,537,500</u>	<u>17,759,758</u>	<i>Gain on sale of bonds -</i>
	<u>392,961,435</u>	<u>312,240,468</u>	

Sampai pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, belum terdapat penjaminan yang dilakukan oleh Perusahaan sehingga belum terdapat pendapatan pinjaman yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

As of 31 December 2013 and 2012, there is project that have been guaranteed by the Company and therefore no revenue from guarantee is recognised in the statement of comprehensive income.

Informasi terkait pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 20.

Information in respect of related party is disclosed in Note 20.

19. BEBAN USAHA

19. OPERATING EXPENSES

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Penjaminan:			Guarantee:
- Pegawai	16,956,405	12,008,840	<i>Employee cost -</i>
- Penyisihan biaya yang ditanggihkan (lihat catatan 10)	13,386,382	-	<i>Provision for impairment - losses (refer to note 10)</i>
- Konsultan	8,133,373	-	<i>Consultancy -</i>
- Perjalanan dinas	2,052,919	1,600,850	<i>Travelling -</i>
- Rapat dan konferensi	<u>248,074</u>	<u>90,517</u>	<i>Meeting and conference -</i>
	<u>40,777,153</u>	<u>13,700,207</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/31 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

19. BEBAN USAHA (lanjutan)

19. OPERATING EXPENSES (continued)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Administrasi dan umum:			General and administrative:
- Pegawai	25,021,493	20,508,740	Employee cost -
- Sewa	4,389,878	3,555,162	Rent -
- Jasa profesional	4,324,096	4,092,908	Professional fees -
- Perjalanan dinas	3,446,213	1,437,538	Travelling -
- Pelatihan	2,045,959	736,068	Training -
- Perlengkapan kantor	990,154	780,214	Office equipment -
- Outsourcing	577,912	495,798	Outsourcing -
- Rapat dan konferensi	429,771	542,511	Meeting and conference -
- Komunikasi	243,591	149,191	Communication -
- Transportasi	225,736	180,284	Transportation -
- Lainnya	324,105	144,081	Others -
	<u>42,018,908</u>	<u>32,622,495</u>	
Pengembangan usaha:			Business development:
- Iklan dan promosi	1,136,328	641,259	Advertising and promotion -
- IIGF Institute	955,496	-	IIGF Institute -
- Loka-karya	929,952	1,587,971	Workshop -
- Representasi	210,143	406,186	Representation -
	<u>3,231,919</u>	<u>2,635,416</u>	

20. INFORMASI PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN

20. SIGNIFICANT RELATED PARTY INFORMATION

Sifat pihak berelasi

Nature of relationship

- Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan.
- Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.
- Bank dan Badan Usaha Milik Negara merupakan entitas sepengendali dimana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito dan obligasi.

- The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of the Company.
- The directors are persons who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the Company's activities.
- Banks and State-Owned Enterprise are entities under common controls where the Company places its investments in time deposits and bonds.

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with related parties, including the following:

- Perusahaan menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati. Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- The Company invested their funds in time deposit and bonds from related parties which were made according to agreed terms and conditions. The details of investments income from related parties is as follows:

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/32 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

20. INFORMASI PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)	20. SIGNIFICANT RELATED PARTY INFORMATION (continued)
--	--

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi	Balances arising from related party transactions
---	---

	2013	2012	
Kas dan setara kas	587,878,439	1,540,827,884	Cash and cash equivalents
Investasi	1,324,285,771	860,199,095	Investments
Piutang usaha	12,253,762	7,786,266	Account receivables
	<u>1,924,417,972</u>	<u>2,408,813,245</u>	

Persentase terhadap jumlah aset	<u>37.03%</u>	<u>48.50%</u>	Percentage of total assets
---------------------------------	---------------	---------------	----------------------------

Pendapatan

			Revenues
- Bank Nagari	37,488,866	35,608,075	Bank Nagari -
- Bank Tabungan Negara Syariah	31,111,679	15,851,141	Bank Tabungan Negara Syariah -
- PT BPD Sumatera Utara	14,144,469	17,333,678	PT BPD Sumatera Utara -
- Pemerintah Republik Indonesia	21,890,544	26,962,229	Government of Indonesia -
- PT Sarana Multigriya Finansial	6,143,485	2,354,520	PT Sarana Multigriya Finansial -
- Bank Mandiri	5,417,158	1,797,937	Bank Mandiri -
- Bank Jabar Banten	4,897,860	33,257,524	Bank Jabar Banten -
- Bank Tabungan Negara	4,667,455	6,065,426	Bank Tabungan Negara -
- PT Jasamarga	4,479,532	2,416,955	PT Jasamarga -
- PT Adhi Karya Tbk	4,344,555	858,657	PT Adhi Karya Tbk -
- Bank Rakyat Indonesia	3,999,298	9,053,400	Bank Rakyat Indonesia -
- PT Pembangkit Listrik Negara	3,656,670	2,992,180	PT Pembangkit Listrik Negara -
- PT PP Tbk	3,266,620	-	PT PP Tbk -
- PT Telekomunikasi Indonesia	2,288,264	1,777,305	PT Telekomunikasi Indonesia -
- PT Aneka Tambang	1,508,158	9,183,173	PT Aneka Tambang -
- PT Hutama Karya	1,400,456	-	PT Hutama Karya -
- Danareksa	1,109,799	211,891	Danareksa -
- PT Garuda Indonesia	984,560	-	PT Garuda Indonesia -
- PT Pegadaian	915,295	-	PT Pegadaian -
- Bank Syariah Mandiri	-	18,206,462	Bank Syariah Mandiri -
- PT BPD Jawa Timur	-	7,168,601	PT BPD Jawa Timur -
- PT Indosat	-	167,795	PT Indosat -
	<u>153,714,723</u>	<u>191,266,949</u>	

Persentase terhadap jumlah pendapatan	<u>39.12%</u>	<u>61.26%</u>	Percentage of total revenue
---------------------------------------	---------------	---------------	-----------------------------

b. Perusahaan memberikan remunerasi dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan Direksi. Jumlah gaji dan tunjangan, bonus/tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 11.189.172 dan Rp 9.253.586 atau 12,68% dan 18,26% dari jumlah beban usaha setiap tahunnya. Seluruh remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi merupakan imbalan kerja jangka pendek.

b. The Company provides remuneration and facilities to support the operational duties of their Board of Commissioners and Directors. The total of salary and allowance, bonus/tantiem for Board of Commissioners and Directors for the years ended 31 December 2013 and 2012, amounted to Rp 11,189,172 and Rp 9,253,586 or 12.68% and 18.26% respectively from total operating expenses for each year. All remuneration provided to the Board of Commissioners and Directors are short term employee benefit.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/33 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2013 AND 2012

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian sewa kantor dengan PT Sampoerna Land (dahulu PT Buana Sakti)

Pada tanggal 20 April 2010 Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Buana Sakti. Periode sewa adalah untuk tiga (3) tahun dimulai dari 12 April 2010 dan berakhir pada 11 April 2013.

Pada tanggal 7 Februari 2013, Perusahaan melakukan perpanjangan perjanjian sewa dengan PT Buana Sakti dimana periode sewa perpanjangan adalah untuk tiga (3) tahun yang dimulai 12 April 2013 dan berakhir pada 11 April 2016.

Perjanjian sewa ini meliputi area yang digunakan untuk ruangan kantor. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sewa, jasa pemeliharaan dan biaya lainnya terkait sewa ke PT Buana Sakti. Pembayaran untuk seluruh jumlah sewa dan jasa pemeliharaan dilakukan dimuka untuk periode satu tahun kedepan. Sebagai tambahan, Perusahaan juga membayar dimuka atas deposit sekuriti dan saluran telepon yang ditahan oleh PT Buana Sakti tanpa kewajiban untuk membayar bunga kepada Perusahaan. Seluruh deposit tersebut akan dikembalikan pada waktu berakhirnya perjanjian sewa ini, jika Perusahaan tidak berniat untuk melanjutkan sewa.

Perjanjian penjaminan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia

Pada tanggal 6 Oktober 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") dan PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") yang menegaskan bahwa Pemerintah dan Perusahaan, sebagai Penjamin, menyetujui untuk menjamin, beberapa hal yang tercantum di dalam perjanjian penjaminan sesuai dengan pasal 1837 dari Hukum Perdata Indonesia, sesuai porsi masing-masing atas kewajiban keuangan tertentu dari PLN, sebagai Manajer proyek dari *Central Java Coal Fired Steam Power Plant*, kepada Bhimasena, sebagai entitas bisnis yang diberikan hak untuk mengimplementasikan proyek tersebut.

21. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Rent office agreement with PT Sampoerna Land (formerly PT Buana Sakti)

On 20 April 2010, the Company entered into a lease agreement with PT Buana Sakti. The lease period is for three (3) years starting from 12 April 2010 and expires on 11 April 2013.

On 7 February 2013, the Company entered to amendment of extended lease agreement with PT Buana Sakti whereas the extended lease period is for another three (3) years starting from 12 April 2013 and expired on 11 April 2016.

This lease agreement covers an area that is used for office space. Based on this agreement, the Company has an obligation to pay rent, service charges and other charges to PT Buana Sakti. Payment for the full amount of rent and service charges was made for one year period in advance. In addition, the Company also paid in advance for security and the telephone line deposit, which is held by the PT Buana Sakti without liability to the Company for interest. All deposits will be refunded on the expiration of this lease, if the Company does not intend to continue the lease.

Guarantee agreement between the Government of the Republic of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia

*On 6 October 2011, the Company entered into a guarantee agreement between the Government of the Republic of Indonesia (the "Government") and PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") where the Company and the Government, as the Guarantors, have agreed to provide a guarantee, on a several basis which is stated in the guarantee agreement in accordance with Article 1837 of the Indonesian Civil Code, in accordance with their respective portions of the financial obligation of PLN, the Cooperation project Manager of the *Central Java Coal Fired Steam Power Plant* (the "Project"), to Bhimasena as the business entity which had been awarded the right to implement the Project.*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/34 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

21. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian penjaminan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima *fee* tertentu (*arranging fee, front-end fee, processing fee dan guarantee fee*) dari Bhimasena sejak ditandatanganinya perjanjian sampai 20 tahun kedepan masa penjaminan ketika kondisi-kondisi tertentu telah dipenuhi.

Penjaminan infrastruktur yang telah diberikan untuk proyek *Central Java Coal Fired Steam Power Plant* direncanakan baru akan efektif paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2013, yaitu pada saat batas tanggal perolehan pembiayaan proyek. Namun, sampai dengan batas tanggal perolehan pembiayaan, proyek ini masih mengalami kendala dalam penyelesaian proses pembebasan lahan.

Peraturan Presiden No. 66 tahun 2013 bertanggal 2 Oktober 2013 diundangkan dan dapat memberikan perpanjangan waktu perolehan pembiayaan proyek menjadi paling lambat 6 Oktober 2014. Untuk itu, pada saat ini belum terdapat kewajiban kontinjensi yang muncul atas penjaminan yang diberikan.

Perjanjian penerusan pinjaman dengan Pemerintah Republik Indonesia atas dana pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development*

Pada tanggal 27 Mei 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian penerusan pinjaman dengan Pemerintah atas dana pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development*. Perjanjian penerusan adalah pinjaman yang diperoleh Pemerintah dari bank luar negeri yaitu Bank Dunia, yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Sampai pada penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih belum menggunakan fasilitas penerusan pinjaman.

21. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee agreement between the Government of the Republic of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to received certain fees (arranging fee, front-end fee, processing fee and guarantee fee) from Bhimasena at the signing date for the next 20 years of the guarantee period when certain conditions are met.

Infrastructure guarantee given to the project of the Central Java Coal Fired Steam Power Plant is planned to be effective at the latest on 6 October 2013, upon the date of financial close. However, until the date of financial close, this project is still in completing of the land acquisition process.

The Presidential Regulation No. 66 year 2013 dated 2 October 2013 was enacted and provide an extension the date of financial close to be not later than 6 October 2014. Therefore, there is no contingent liabilities arising from the guarantee.

Two-step loan agreement with the Government of the Republic of Indonesia from the International Bank for Reconstruction and Development

On 27 May 2013, the Company entered into a two-step loan agreement with the Government in regards to the fund provided by the International Bank for Reconstruction and Development. Two-step loan is a loan obtained by the Government from international bank which is World Bank, which are then re-loaned to the Company. As of the issuance of the financial statements, the Company has not used the facility under two-step loan.

22. LIABILITAS KONTINJENSI DAN KOMITMEN

Perusahaan tidak memiliki liabilitas kontinjensi dan komitmen yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

22. CONTINGENT LIABILITIES AND CAPITAL COMMITMENTS

The Company has no significant contingent liabilities and capital commitment as at 31 December 2013 and 2012.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/35 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2013 AND 2012**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. TRANSAKSI NON-KAS

Informasi tambahan terkait laporan arus kas yang merupakan transaksi non-kas adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Pencadangan saldo laba	10,650,000	7,850,000	<i>Appropriation retained earnings</i>
Perubahan nilai pasar atas aset keuangan tersedia untuk dijual	(17,437,079)	2,039,749	<i>Changes in fair value of financial assets available for sale</i>
Program kemitraan dan bina lingkungan	(1,139,755)	(671,827)	<i>Corporate social responsibility</i>

23. NON-CASH TRANSACTIONS

Supplemental cash flow information related to non-cash transactions is as follows:

24. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar baru, revisi, dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

- ISAK 27, "Pengalihan Aset dari Pelanggan";
- ISAK 28, "Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas";
- PSAK 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian";*)
- PSAK 66, "Pengaturan Bersama";*)
- PSAK 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain";*)
- PSAK 68, "Pengukuran Nilai Wajar";*)
- PSAK 1 (revisi 2013) "Penyajian Laporan Keuangan";*)
- PSAK 4 (revisi 2013) "Laporan Keuangan Tersendiri";*)
- PSAK 15 (revisi 2013) "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";*)
- PSAK 24 (revisi 2013) "Imbalan Kerja".*)

*) Penerapan dini revisi dan standar baru diatas sebelum 1 Januari 2015 tidak diijinkan.

ISAK 27 dan 28 berlaku untuk tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2014, sedangkan revisi dan standar baru lainnya akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015.

24. NEW ACCOUNTING STANDARDS

New standards, amendments, and interpretations issued, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2014 are as follows:

- *IFAS 27, "Transfer assets from customer";*
- *IFAS 28, "Extinguishing financial liabilities with equity instrument";*
- *SFAS 65, "Consolidated financial statements";*)*
- *SFAS 66, "Joint arrangements";*)*
- *SFAS 67, "Disclosure of interests in other entities";*)*
- *SFAS 68 "Fair value measurement";*)*
- *SFAS 1 (revised 2013) "Presentation of financial statements";*)*
- *SFAS 4 (revised 2013) "Separate financial statements";*)*
- *SFAS 15 (revised 2013) "Investment in associates and joint ventures";*)*
- *SFAS 24 (revised 2013) "Employee benefits".*)*

*) *Early adoption of these new and revised standards prior to 1 January 2015 is not permitted.*

IFAS 27 and 28 will become effective for annual period beginning 1 January 2014 while the other new and revised standards will become effective for the annual period beginning 1 January 2015.

Data Perusahaan Corporate Data

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Luky Alfirman
Komisaris Utama
President Commissioner



Luky Alfirman, 44 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sejak 19 Agustus 2013. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau mulai bekerja pada Kementerian Keuangan sejak tahun 1995, dengan penugasan pertama pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kemudian bergabung dengan Badan Kebijakan Fiskal.

Beliau memiliki gelar doktor (PhD) dan Master (MA) dalam bidang ekonomi dari University of Colorado, Boulder, Amerika Serikat, dan gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Sejak tahun 2004 sampai sekarang, beliau juga aktif mengajar di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi.

Beliau juga telah mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan dalam bidang Perpajakan, Manajemen Risiko, Good Governance dan Leadership, yang diselenggarakan berbagai institusi, seperti University of Chicago Booth School of Business, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, IMF, dan ADBI. Selain itu beliau telah diundang sebagai pembicara di berbagai forum atau seminar internasional, di antaranya IMF, ADFIMI, Economist, IFN, dan Indonesia investor forum.

Luky Alfirman, 44 years old, serves as the President Commissioner of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund since 19 August 2013. Currently he is Head of the Macro Economic Policy Center at the Fiscal Policy agency, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. He joined the Ministry of Finance in 1995, and was first assigned to the Directorate General of Tax, before moving later on to the Fiscal Policy agency.

He holds a PhD and an MA degree in Economics from University of Colorado, Boulder, US, and a Bachelor degree in Industrial Engineering from Institut Teknologi Bandung (ITB). Since 2004 up to the present, he is also a lecturer at the Faculty of Economics, Universitas Indonesia.

He has actively participated in a variety of advanced courses in areas of Taxation, Risk Management, Good Governance, and Leadership, held by institutions such as University of Chicago Booth School of Business, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, IMF, and ADBI. In addition, he is often a speaker at various international forum and seminars, including those organized by the IMF, ADFIMI, Economist, IFN, and Indonesia Investor Forum.

Ayu Sukorini

Komisaris
Commissioner



Ayu Sukorini, 47 tahun, selain menjabat sebagai Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) saat ini juga, Ayu Sukorini adalah Direktur Pinjaman dan Hibah di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Beliau telah bertugas selama hampir 22 tahun di Kementerian Keuangan dan ditugaskan di berbagai posisi di area Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Pengelolaan Obligasi serta Pengelolaan Utang terutama pada bidang Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan. Beliau terlibat secara langsung dalam eksekusi penerbitan Obligasi Negara sejak tahun 2003 sampai 2007 baik di pasar domestik dan internasional.

Beliau memiliki gelar Master of Arts (MA) dalam bidang ekonomi dari Universitas Colorado, Denver, Amerika Serikat, dan gelar sarjana dalam bidang ekonomi dari Universitas Satya Wacana, Salatiga. Beliau juga telah mengikuti berbagai pendidikan profesional lanjutan yang diselenggarakan beberapa institusi di Singapura, Washington DC, Sydney dan Tokyo dalam area Kebijakan Fiskal, Manajemen Risiko dan Pasar Keuangan. Beliau juga berpartisipasi aktif sebagai penyaji dalam berbagai forum pertemuan pengelola utang di London, Washington, Tokyo dan kawasan regional.

In addition to serving as Commissioner of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, Ayu Sukorini, 47 years old, is also concurrently the Director of Loans and Grants Portfolio of the Debt Management Office, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

For almost 22 years, Ms. Sukorini has been assigned to many important duties in the Ministry of Finance, including in the areas of Fiscal Policy, Government Bond Policy Management and Debt Management, mainly for policy planning and development. She was also actively involved in the execution of the government's bond issuance in the domestic and international markets from 2003 to 2007.

Ms. Sukorini has a Master of Arts degree in Economics from the University of Colorado at Denver, and a degree in Economics from Satya Wacana University, Salatiga, Central Java. She has participated in many advanced professional education courses in Fiscal Policy, Risk Management and Interest Rate Market at institutes in Singapore, Washington DC, Sydney and Tokyo. She is also active as a speaker in many international meetings on Debt Management including in London, Washington DC, Tokyo and in South East Asia region.

Profil Direksi

Board of Directors Profile

Sinthya Roesly
Direktur Utama
President Director



Sinthya Roesly, 45 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sejak Desember 2009. Sebelumnya, beliau bekerja di PT PLN (Persero) selama lebih dari 16 tahun dengan berbagai penugasan mulai dari keuangan korporat, pendanaan, perencanaan korporat dan strategi, komersial, operasi sistem tenaga listrik dan transmisi, serta konstruksi proyek. Selama di PLN, beliau terlibat secara penuh dalam mendapatkan pembiayaan untuk proyek-proyek PLN baik dari lembaga multilateral dan bilateral, termasuk program percepatan pembangkit 10.000 MW, serta pembiayaan dari perbankan domestik dan internasional. Beliau juga terlibat secara aktif dalam pengembangan electricity trading mechanism untuk sistem Jawa-Bali, penyiapan sistem operasi untuk IPP generasi pertama di Indonesia pada akhir tahun 1990, selain keterlibatannya dalam berbagai proses restrukturisasi korporasi dan sektor ketenagalistrikan di Indonesia pada akhir 1990an sampai awal 2000an. Sinthya Roesly pernah menjadi Ketua Kelompok Kerja untuk Energy Market Reform - World Energy Council, Indonesia National Committee dari tahun 2005 – 2006. Sinthya Roesly memiliki gelar Master of Management dari IPMI Business School dan MBA dari Monash University, Australia; gelar MEngSc dalam Power Systems dari University of New South Wales, Australia; dan gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Indonesia.

Sinthya Roesly, 45 years old, serves as the President Director of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund since December 2009. Prior to her current position, Ms. Roesly worked with PT PLN (Persero), the state-owned electricity corporation for more than 16 years. Her various positions ranged from corporate finance, funding, corporate planning and strategy, commerce, transmission and power system operations, as well as project construction. In PLN, Ms. Roesly was involved in securing the financing from multilateral and bilateral agencies for PLN projects, as well as for the 10,000 MW Fast Track Program, and bank loans involving domestic and international banks. She was also actively involved in the development of the electricity trading mechanism in the Java-Bali system, setting up system for operations of the first generation of IPP in Indonesia in the late 1990s, in addition to overseeing corporate and power sector restructuring in Indonesia in the late 1990s and early 2000s. Ms. Roesly was formerly the Head of the Energy Market Reform Working Group, Indonesia National Committee - World Energy Council, 2005-2006. She holds a Master of Management degree from IPMI Business School and an MBA from Monash University, Australia; an MEngSc in Power Systems from the University of New South Wales, Australia, and a Bachelor's degree in Electrical Engineering from the University of Indonesia.

Yadi J. Ruchandi

Direktur Operasi
Director of Operations

Yadi J. Ruchandi, 43 tahun, menjabat sebagai Direktur Operasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sejak Desember 2009. Sebelumnya, beliau adalah Wakil Presiden Eksekutif dari sebuah integrated logistics and aviation group dan Direktur Keuangan dari sebuah Perusahaan Penerbangan Swasta. Beliau memiliki pengalaman yang luas di bidang keuangan dan investasi perbankan, serta bekerja di berbagai perusahaan dan organisasi terkemuka termasuk Bank American-Express dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Bank Indonesia. Beliau telah memiliki berbagai pengalaman mulai dari Merger and Acquisition, negosiasi dan restrukturisasi hutang korporat, *business turnaround* dan pengembangan proyek. Yadi J. Ruchandi adalah seorang Chartered Financial Analyst (CFA) dan memiliki gelar dalam bidang teknik mesin dan MBA dari Thunderbird-American Graduate School of International Management, USA.

Yadi J. Ruchandi, 43 years old, serves as the Director of Operations of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund since December 2009. Prior to his current position, he was executive vice president of an integrated logistics and aviation group and CFO of a private airline. He brings broad experience in the financial sector and investment banking from working in high-profile companies and organizations, including American-Express Bank as well as the Indonesian Bank Restructuring Agency. He has considerable deal experiences ranging from merger and acquisition, debt and corporate restructuring and negotiation, business turnaround and project development. He is a CFA holder and has a Bachelor's degree in mechanical engineering from the University of Indonesia and an MBA from Thunderbird-American Graduate School of International Management, USA.

Profil Direksi

Board of Directors Profile

Armand Hermawan

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management



Armand Hermawan, 46 tahun, menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sejak Desember 2009. Sebelumnya, beliau menghabiskan kehidupan profesional di perusahaan telekomunikasi raksasa Indonesia, Indosat. Jabatan terakhir beliau di Indosat adalah Senior Vice President (SVP) dan Chief of Group Controlling Office. Selama di Indosat, beliau dipercaya untuk berperan penting dalam transaksi Merger and Acquisition dan aksi korporat lainnya seperti IPO dan penerbitan obligasi syariah. Pada saat beliau di divisi corporate strategy, Indosat mendapatkan *award* sebagai perusahaan dengan the best strategy dari Asia Money pada tahun 2005. Beliau adalah seorang Chartered Accountant (CA) dan Certified Management Accountant (CMA). Beliau memperoleh gelar Master of Commerce and Management (MCM) dari University of Lincoln, NZ dan PhD di bidang keuangan dari University of Newcastle, NSW, Australia.

Armand Hermawan, 46 years old, serves as the Director of Finance and Risk Management of the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund since December 2009. Previously, he spent his professional life in Indonesia's major telecommunications company PT Indosat, Tbk. His final position in Indosat was Senior Vice President (SVP) and Chief of Group Controlling Office. During his tenure in Indosat, he was entrusted to lead M&A transaction and other corporate actions including IPO and Islamic Bond Issuance. During his period in the corporate strategy division, Indosat was selected as the company with the best business strategy by Asia Money in 2005. He is a Chartered Accountant (CA) and a Certified Management Accountant (CMA). Mr. Hermawan obtained a Master of Commerce and Management (MCM) from the University of Lincoln, New Zealand, and a PhD Degree in Finance from University of Newcastle, NSW, Australia.

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile



Ayu Sukorini

Ketua
Chairperson

Profil dalam dilihat di halaman 147
(Profil Dewan Komisaris)

Her profile is presented in the Profile of Board of
Commissioners section on page 147



Iqbal Islami

Anggota
Member

Iqbal Islami adalah anggota Komite Audit PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sejak tahun 2012. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai anggota komite audit di dua BUMN dan satu perusahaan terbuka. Selain itu, saat ini beliau juga menjabat sebagai Widyaiswara di Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan setelah sebelumnya selama lebih dari 20 tahun bertugas sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Selama bertugas sebagai dosen di STAN, selain mengajar, beliau juga sering diminta untuk menjadi konsultan, dalam bidang keuangan dan akuntansi, oleh berbagai perusahaan baik BUMN, BUMD, ataupun swasta. Manajemen Strategik, Finance, dan Sistem Informasi Manajemen adalah bidang yang menjadi bidang keahliannya. Beliau adalah seorang akuntan terdaftar dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Case Western Reserve University, Ohio, AS.

Iqbal Islami serves as member of the Audit Committee of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) since 2012. He has previously served as member of the audit committee on two other SOEs and a listed company. Concurrently, he is a lecturer at the Training Center for the Development of Human Resources at the Ministry of Finance. Prior to this, he served for more than 20 years as a lecturer at the State Accountancy College (STAN). As a lecturer at STAN, he was often asked to provide his expertise as consultant in finance and accountancy for a number of State-Owned Enterprise, Regional-Owned Enterprise and companies from the private sector. His area of expertise includes Strategic Management, Finance and Management Information System. Iqbal Islami is a Registered Accountant and holds a Master of Business Administration degree from Case Western Reserve University, Ohio, US.

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile

Budi Taufik Wibawa

Anggota
Member

Budi Taufik Wibawa adalah anggota Komite Audit PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai anggota komite audit di salah satu BUMN. Saat ini beliau merupakan partner di kantor akuntan publik. Beliau sudah menjalani profesi sebagai akuntan publik kurang lebih 20 tahun dan berpengalaman melakukan audit maupun memberikan jasa lain di bidang keuangan di berbagai perusahaan, baik BUMN maupun swasta nasional. *Auditing, accounting*, dan perpajakan adalah bidang yang menjadi bidang keahliannya. Beliau adalah seorang akuntan terdaftar (Chartered Accountant) dan juga bersertifikat akuntan publik (Certified Public Accountant).

Budi Taufik Wibawa serves as Member of the Audit Committee of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Previously, he served as a member of the audit committee at a State Owned Enterprise. He is currently a partner in a Public Accountant Firm. As a public accountant, he has more than 20 years experience in the provision of financial audit and other related services to various State Owned Enterprises and national private sector corporations. His fields of expertise are auditing, accounting and taxation. He is a Chartered Accountant and a Certified Public Accountant.

Profil Sekretaris Komisaris

Secretary to the Board of Commissioners Profile

Nuning Sri Rejeki Wulandari

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners



Nuning Sri Rejeki Wulandari bergabung di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak pertengahan tahun 2011. Wanita kelahiran Bogor, 6 Juli 1963 ini memperoleh gelar Insinyurnya dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987. Kemudian beliau memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) setelah menyelesaikan studinya di University of Detroit, Michigan, USA, pada tahun 1994.

Saat ini, beliau menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia setelah sebelumnya lebih dari 17 tahun beliau bertugas di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan.

Beliau telah mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan di beberapa lembaga pendidikan di Paris, Hong Kong, Tokyo, dan Sydney dalam bidang manajemen kinerja, pasar modal, infrastruktur, dan manajemen aset.

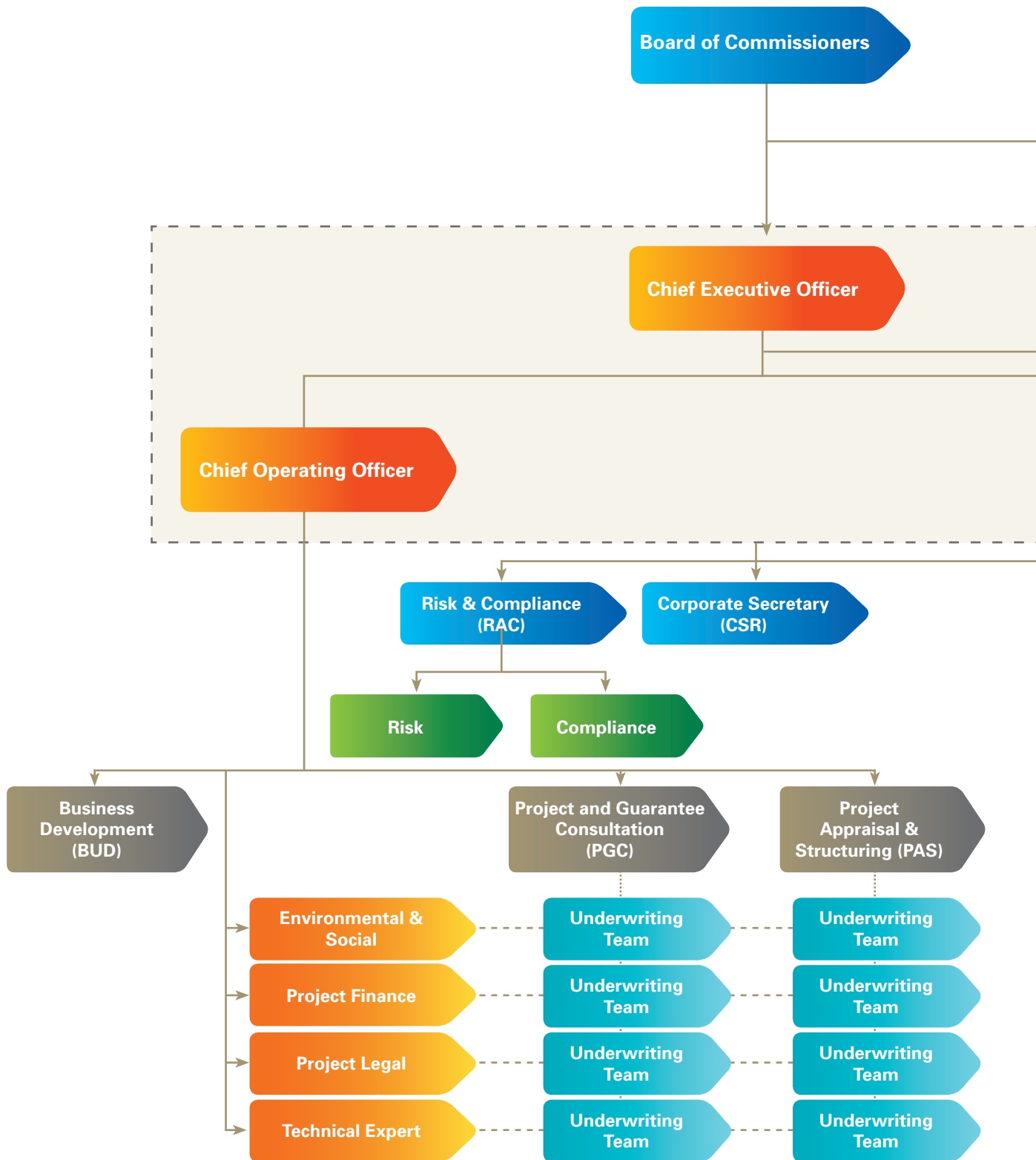
Nuning Sri Rejeki Wulandari joined PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) as Secretary of the Board in mid 2011. Born in Bogor, on Juli 6, 1963, she obtained a Bachelor degree from the Faculty of Agriculture, Bogor Institute of Agriculture, in 1987. Next, she obtained a Master of Business Administration (MBA) degree after finishing her study at University of Detroit, Michigan, US, in 1994.

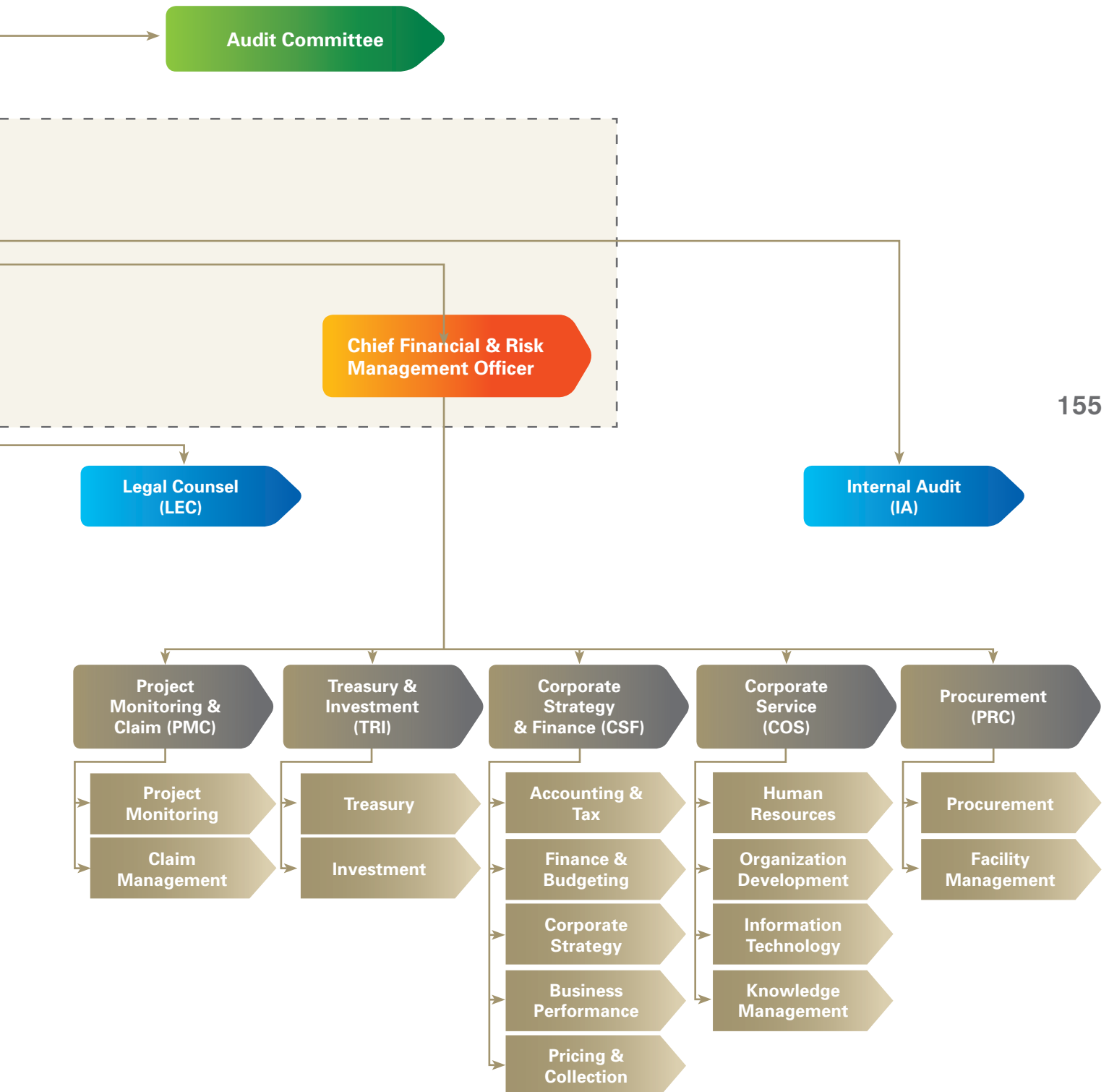
Currently, she also serves as Reviewer Staff of Policy Alignment at the Directorate General of State Assets (DJKN), the Ministry of Finance, following more than 17 years of career at the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency, the Ministry of Finance.

She has attended a variety of training courses and workshops on performance management, capital markets, infrastructure and asset management organized by various educational institutions in Paris, Hong Kong, Tokyo and Sydney.

Struktur Organisasi

Organization Structure





This page is intentionally left blank
Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Tahunan 2013 Annual Report



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

Sampoerna Strategic Square
North Tower 14th floor
Jl Jenderal Sudirman Kav.45-46
Jakarta 12930 Indonesia
Tel : +62 21 57950550
Fax : +62 21 57950040
info@iigf.co.id
www.iigf.co.id



iigf official



@iigfofficial